

*Tesis*

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN  
(Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar)**

***EFFECTIVENESS OF URBAN SLUM SETTLEMENT HANDLING  
(Case Study : Slum Settlement Of Tallo Urban Village Of Makassar)***



**SA HARUDDIN**  
MPW. 4514039

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN  
(Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar)**



**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

**UNIVERSITAS**

**BOSOWA**

**PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Disusun dan diajukan oleh

**SAHARUDDIN**  
MPW.4514039

**KEPADA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN  
(Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar)**



**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

**UNIVERSITAS**

**BOSOWA**

**PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Disusun dan diajukan oleh

**SAHARUDDIN**  
MPW.4514039

**KEPADA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

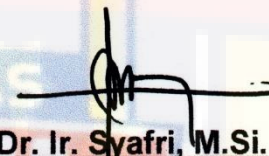
1. Judul : EFEKTIVITAS PENANGANAN  
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN  
(Studi Kasus : Permukiman Kumuh  
Kelurahan Tallo Kota Makassar)
2. Nama Mahasiswa : SAHARUDDIN
3. NIM : MPW 4514039
4. Program Studi : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Menyetujui  
Komisi pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II

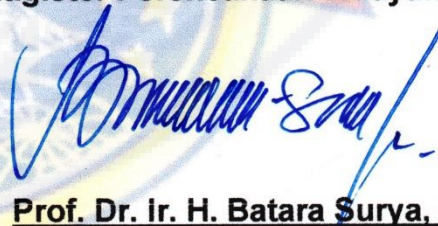
  
Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.

  
Dr. Ir. Syafri, M.Si.

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

  
Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si.

  
Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.



## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/ tanggal : Kamis, 18 Januari 2018

Tesis atas nama : Saharuddin

NIM : MPW 4513051

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.  
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Ir. Syafri, MSi.  
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Prof.Dr.Ir. Tommy S.S. Eisenring, M.Sc. (.....)

2. Dr. Ir. H. Syahriar Tato, MS. (.....)

Makassar, 15 Maret 2018  
Direktur

  
Dr. Muhlis Roslan, SE, M.Si  
NIDN 09 31 08 65 01

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**SAHARUDDIN SAID**, lebih dikenal dengan nama panggilan **PUTE** dilahirkan di Polewali Mamasa, (Sekarang Polewali Mandar) di Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 22 Januari 1974, merupakan anak kelima dari lima bersaudara (Husain, S.Pd., M.Pd., Abd. Rahman, Nurlaela, Rahmawati, Am.d.) dari pasangan suami istri, Ayah (Alm.) H.M.Said Tahhanni dan Ibu Hj. Sitti Ale.

Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 1981 di Sekolah Dasar Inpres No. 018 Kampung Baru Muara Badak Kalimantan Timur dan tamat pada tahun 1987, pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudhatul Mutjahidin Kampung Baru Muara Badak Kalimantan Timur dan tamat pada tahun 1990. Pada tahun yang sama, yakni pada tahun 1990, penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri Samarinda Kalimantan Timur hingga tahun 1992, kemudian ditahun yang sama pindah di Sekolah Menengah Atas Islam Datuk ribandang Makassar Sulawesi Selatan Hingga Tamat pada tahun 1994. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Universitas 45 Makassar (Sekarang Universitas Bosowa) Pada Fakultas Teknik Jurusan Planologi (*Perencanaan Wilayah dan Kota*) dan selesai pada tahun 2001, dengan judul peneitian "**Analisis Perubahan Pola Penggunaan Lahan Di Koridor Jalan Makassar Maros (Lokasi Studi : Jalan Poros Makassar Maros Kecamatan Mandai Kabupaten Maros)**". Selanjutnya pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan Strata Dua (S2) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota pada program pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dan selesai pada tahun 2018, dengan judul penelitian "**Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar)**".

## PERNYATAAN KEORISINILAN TESIS

Nama Mahasiswa : **SAHARUDDIN**

NIM : **MPW. 4514039**

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul : ***“EFEKTIVITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar)”***, merupakan hasil karya sendiri.

Seluruh ide dan gagasan yang ada dalam tesis ini adalah merupakan ide dan gagasan saya sendiri, kecuali beberapa referensi dari berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik (internet) dan kutipan dari informan.

Jika pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, Maret 2018

**SAHARUDDIN**

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-NYA semata sehingga tesis yang berjudul ***“EFEKTIVITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar)”***, terselesaikan, walaupun penulis menyadari bahwa didalamnya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, namun penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, sedangkan manusia hanya dapat berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pembuatan tesis ini tak lepas dari motivasi dan bimbingan dari para pembimbing dan dosen di Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si., dan Pembimbing II Bapak Dr. Ir. Syafri, M.Si. atas bimbingan dan motivasinya sejak penulisan proposal hingga penyelesaian tesis ini, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si. selaku Direktur PPs.
2. Seluruh Dosen Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Seluruh Staf Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
4. Rekan-rekan mahasiswa Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepala Bappeda Kota Makassar, Sekretris Bappeda Kota Makassar, Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar, para Kasubid. Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah



Bappeda Kota Makassar serta rekan-rekan di Kantor Bappeda Kota Makassar tempat penulis bekerja.

6. Lurah Tallo, Ketua BKM Kelurahan Tallo, Ketua RW IV, Ketua RT.A dan RT.B Kelurahan Tallo serta Tokoh Masyarakat di Lokasi Penelitian, atas waktu dan bantuannya dalam wawancara dan tanya jawab.
7. Semua Pihak yang telah membantu penulis, baik selama perkuliahn maupun dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Spesial ucapan terima kasih buat Istri Penulis (Ikha Nurbaeni) dan Anak-anak Penulis (Atharid Thanni Adiputra Sahid, Haura Aqila Dwiputri Sahid, Kalila Faiha Tri Sahid), atas supportnya baik dukungan moril maupun materi juga do'a, dan waktu serta pengertiannya.

Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

Makassar, Maret 2018

**SAHARUDDIN**

## ABSTRAK

SAHARUDDIN, MPW4514039, **“EFEKTIVITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar)”**, (dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si dan Dr. Ir. Syafri, M.Si.)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penanganan permukiman kumuh terhadap kondisi sosial ekonomi serta bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi kekumuhan pada lokasi penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penanganan permukiman kumuh terhadap kondisi sosial ekonomi serta untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi kekumuhan pada lokasi penelitian.

Dari hasil analisa dan pembahasan yang diperoleh melalui uji regresi linier berganda dan analisa statistik deskriptif menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dilokasi penelitian, serta penangaanan permukiman kumuh tidak efektif mengurangi tingkat kekumuhan pada lokasi penelitian.

Kata Kunci : *Pengaruh Penanganan, Permukiman Kumuh, Perkotaan, Efektivitas.*

## ABSTRACT


SAHARUDDIN, MPW4514039, "**THE EFFECTIVENESS OF URBAN SETTLEMENT SETTLEMENT (Case Study: Slum Settlement in Tallo Village, Makassar City)**", (guided by Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si and Dr. Ir. Syafri, M.Si .)

The problem in this study is how the effect of handling slums on socio-economic conditions and how effective it is in reducing slums at the research location.

The aim to be achieved is to find out how the effect of handling slums on socio-economic conditions and to find out how effective they are in reducing slums at the research location.

From the results of the analysis and discussion obtained through multiple linear regression tests and descriptive statistical analysis shows that the handling of slums does not have a significant effect on the socio-economic conditions of the community in the research location, and the management of slums does not effectively reduce the level of slums in the research location.

*Keywords: Effect of Handling, Slum, Urban Settlement, Effectiveness.*



**BUSUWA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENERIMAAN .....	iii
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	iv
PERNYATAAN KEORISINILAN TESIS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Lingkup Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Perkembangan Permukiman Kumuh Perkotaan .....	14
1. Pengaruh Urbanisasi, Kemiskinan dan Pertumbuhan Penduduk ..	14
2. Pendekatan Teori Marginalitas dan Ketergantungan .....	17
3. Pengaruh Perubahan Sosial dan Pendekatan Teori Kebutuhan ..	19
4. Permukiman Kumuh Perkotaan .....	23
a. Pengertian Permukiman Kumuh .....	23
b. Faktor Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh .....	32
B. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan .....	36
1. Kebijakan Dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh	
Perkotaan .....	36
2. Kebijakan Dan Strategi Penataan Permukiman Kumuh	
Kota Makassar .....	39
3. Konsep dan Model Penanganan Permukiman Kumuh .....	40
C. Efektivitas Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh .....	47
1. Konsepsi Pengertian Efektivitas .....	47
2. Pengukuran Efektivitas .....	50
D. Kerangka Pikir Penelitian .....	52

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Jenis Dan Sumber Data .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Populasi Dan Sampel .....	63
F. Teknik Analisis Data .....	64
G. Variabel Penelitian .....	70
H. Defenisi Operasional .....	74
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar .....	79
1. Strategi Penanganan Permukiman Kota Makassar .....	79
2. Profil Kota Makassar .....	85
3. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar .....	97
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	103
1. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Tallo Kota Makassar .....	103
2. Gambaran Umum Wilayah Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar .....	116
C. Pengaruh Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Penelitian ..	127
1. Pengaruh Terhadap Kondisi Sosial .....	127
2. Pengaruh Terhadap Kondisi Ekonomi .....	144
D. Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Penelitian ..	163
1. Pemahaman Terhadap Program Kegiatan .....	164
2. Pencapaian Tujuan Kegiatan .....	165
3. Pencapaian Target Waktu Pelaksanaan .....	165
4. Terbentuk Dan Berfungsinya Kelembagaan .....	166
5. Kepuasan Terhadap Layanan Akses Dan Pemenuhan Kebutuhan Lingkungan Masyarakat .....	166
E. Sintesis Hasil Penelitian .....	182
1. Pengaruh Penanganan Permukiman Kumuh Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pada Lokasi Penelitian .....	182
2. Efektivitas Penanganan Permukiman Dalam Mengurangi Kekumuhan Pada Lokasi Penelitian .....	185
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>188</b>
A. Kesimpulan .....	188
B. Saran dan Rekomendasi .....	189
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>192</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>195</b>
- Tabel Observasi dan Hasil Survei Lapangan	
- Format Kuesioner	
- Hasil Analisis Perhitungan SPSS	
- Dokumentasi	



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Keterangan Tabel	Hal
Tabel. 2.1.	Standar Pengukuran Efektivitas .....	54
Tabel. 3.1.	Data yang dibutuhkan dalam penelitian .....	60
Tabel. 4.1.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kota Makassar ....	87
Tabel. 4.2.	Kawasan Kumuh Tipologi Kumuh Berat .....	100
Tabel. 4.3.	Kawasan Kumuh Tipologi Kumuh Ringan	101
Tabel. 4.4.	Kawasan Kumuh Tipologi Kumuh Sedang	102
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	105
Tabel 4.6	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	106
Tabel 4.7	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	107
Tabel 4.8	Data Jaringan Jalan Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	108
Tabel 4.9	Data Jaringan Drainase Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	109
Tabel 4.10	Sumber Penyediaan Air Minum Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	110
Tabel 4.11	Data Prasarana Sanitasi Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	111
Tabel 4.12	Data Prasarana Persampahan Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	113
Tabel 4.13	Layanan Jaringan Listrik Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	114
Tabel 4.14	Layanan Jaringan Telekomunikasi Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo	115
Tabel 4. 23	Jumlah Penduduk pada Lokasi Penelitian	119
Tabel. 4.24	Kondisi Kepemilikan WC/Jamban Keluarga di Lokasi Penelitian	120
Tabel 4.25	Kondisi Sistem Pembuangan Air Limbah di Lokasi Penelitian	121
Tabel 4.26	Kondisi Air Bersih dan Air Minum di Lokasi Penelitian	121

Tabel 4. 27	Kondisi Bangunan Rumah di Lokasi Penelitian	122
Tabel 4.28	Kondisi Peruntukan Bangunan di Lokasi Penelitian	124
Tabel 4.29	Kondisi Kepemilikan Lahan di Lokasi Penelitian	124
Tabel 4. 30	Jenis Pekerjaan Penduduk di Lokasi Penelitian	125
Tabel 4. 31	Kondisi Pendapatan Masyarakat di Lokasi Penelitian	126
Tabel 4.32	Indikator Variabel Penelitian	127
Tabel 4.33	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Pekerjaan)	128
Tabel 4. 34	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Pekerjaan Tambahan)	129
Tabel 4. 35	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Kepemilikan Kedudukan, Jabatan Formal dan Informal dalam Masyarakat)	130
Tabel 4. 36	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Faktor yang berpengaruh menjadikan Status Sosial dalam Masyarakat)	130
Tabel 4. 37	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat)	131
Tabel 4. 38	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Perbedaan Warga Mampu dan Tidak Mampu)	132
Tabel 4. 39	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan	

	Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Perbedaan Warga Mampu dan Tidak Mampu)	132
Tabel 4. 40	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Peran dan Posisi Sosial Masyarakat (Kondisi Peran dan Posisi Masyarakat dalam Kelembagaan dan kegiatan)	133
Tabel 4. 41	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Peran dan Posisi Sosial Masyarakat (Kondisi Peran aktif Masyarakat dalam Kelembagaan dan kegiatan)	134
Tabel 4. 42	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi Relasi / Hubungan tetangga dalam masyarakat)	135
Tabel 4. 43	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi interaksi saling berkunjung dan saling membantu dalam masyarakat)	135
Tabel 4. 44	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi interaksi saling berkunjung dan saling membantu dalam masyarakat)	136
Tabel 4. 45	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi interaksi sesama warga)	137
Tabel 4. 46	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi	

	Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi status sosial dalam interaksi dan kerjasama)	138
Tabel 4. 47	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi kekerabatan dan kekeluargaan yang terjalin)	138
Tabel 4. 48	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi bertukar informasi dalam masyarakat)	139
Tabel 4. 49	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi bertukar informasi dalam masyarakat)	140
Tabel 4. 50	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi perubahan pola kerjasama)	140
Tabel 4. 51	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi pola kerjasama)	141
Tabel 4. 52	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi perkembangan dan pergeseran pola kerjasama)	141
Tabel 4. 53	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Mobilitas sosial dan pergeseran struktur penduduk (Kondisi perubahan hidup masyarakat)	142
Tabel 4. 54	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Mobilitas sosial dan pergeseran	

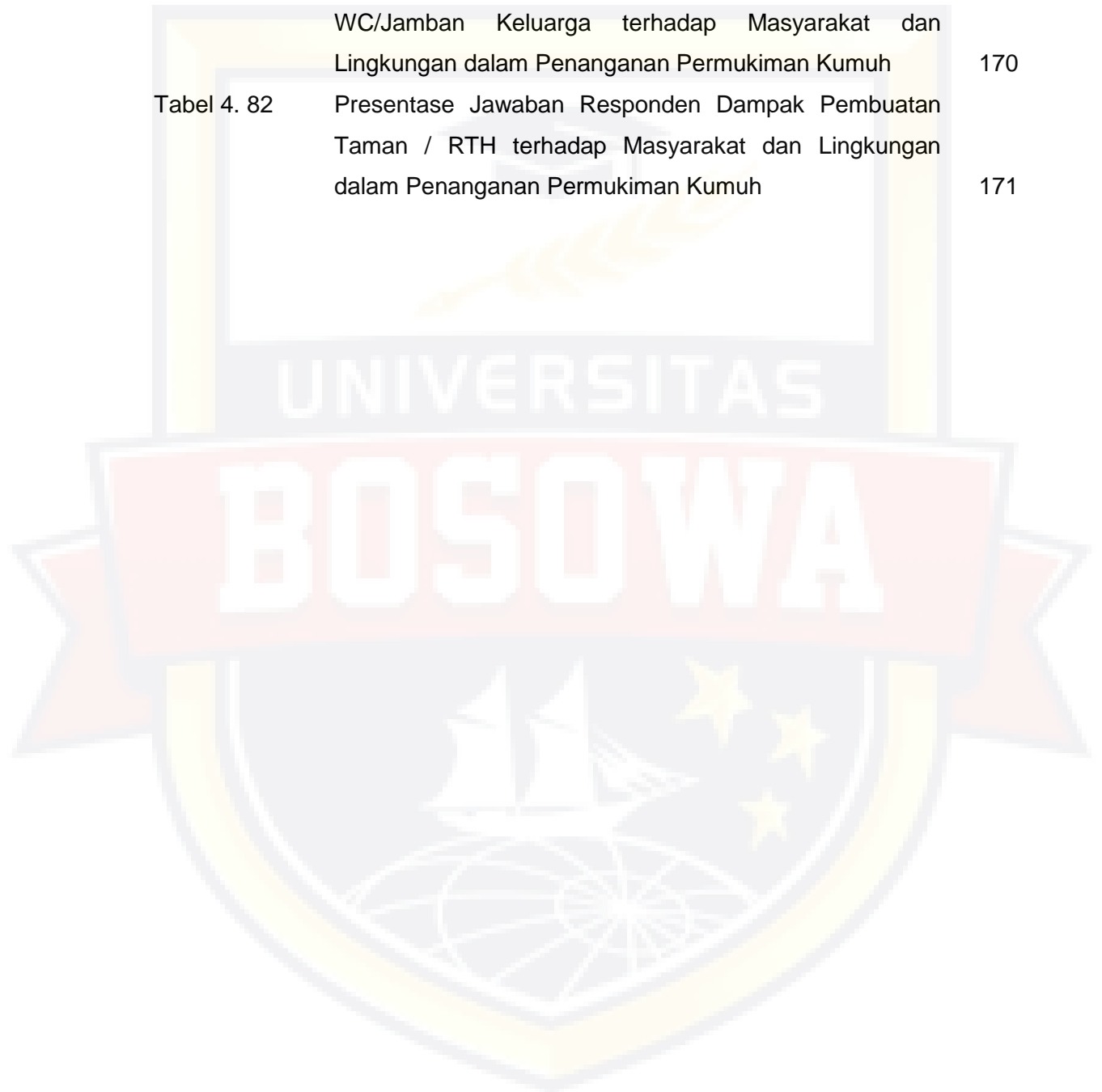
	struktur penduduk (Kondisi komposisi penduduk)	143
Tabel 4. 55	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Mobilitas sosial dan pergeseran struktur penduduk (Kondisi perubahan pemilikan lahan dan bangunan)	143
Tabel 4. 56	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari)	145
Tabel 4. 57	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi rasa aman dari bahaya fisik dan emosional)	145
Tabel 4. 58	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi pemilikan barang dan harta)	146
Tabel 4. 59	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi peningkatan pemilikan barang dan harta)	147
Tabel 4. 60	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi kemampuan untuk mengakses jenjang pendidikan lebih tinggi)	148
Tabel 4. 61	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi kemampuan untuk membayar dan mengakses fasilitas kesehatan)	148
Tabel 4. 62	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi	



	persahabatan dan kasih sayang dalam keluarga dan lingkungan sekitar)	149
Tabel 4. 63	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator pendapatan (Kondisi pendapatan masyarakat)	149
Tabel 4. 64	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator pendapatan (Kondisi pemenuhan kebutuhan pokok dengan kondisi pendapatan masyarakat)	150
Tabel 4. 65	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator pendapatan (Kondisi peningkatan pendapatan)	151
Tabel 4. 66	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator pendapatan (Kondisi kepemilikan pendapatan lain)	151
Tabel 4. 67	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator lapangan usaha dan pekerjaan (Kondisi lapangan usaha dan pekerjaan)	152
Tabel 4. 68	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator lapangan usaha dan pekerjaan (Kondisi lapangan usaha dan pekerjaan)	153
Tabel 4. 69	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator lapangan usaha dan pekerjaan (Kondisi lapangan usaha dan pekerjaan yang tersedia dengan adanya kegiatan)	153
Tabel 4. 70	Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan	

	Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator lapangan usaha dan pekerjaan (Kondisi lapangan usaha dan pekerjaan)	154
Tabel 4. 71	Indikator Variabel Penelitian	163
Tabel 4. 72	Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator pemahaman program dan kegiatan	164
Tabel 4. 73	Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan pencapaian tujuan program dan kegiatan	165
Tabel 4. 74	Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator pencapaian target waktu pelaksanaan kegiatan	165
Tabel 4. 75	Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator terbentuk dan berfungsinya kelembagaan	166
Tabel 4. 76	Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator pemenuhan akses dan harapan masyarakat	167
Tabel 4. 77	Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator pilihan pemenuhan kebutuhan lingkungan dan masyarakat	167
Tabel 4. 78	Presentase Jawaban Responden Dampak Perbaikan dan Rehabilitasi Jalan terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh	168
Tabel 4. 79	Presentase Jawaban Responden Dampak Perbaikan dan Rehabilitasi Rumah terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh	169
Tabel 4. 80	Presentase Jawaban Responden Dampak Perbaikan dan	

	Rehabilitasi Drainase terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh	169
Tabel 4. 81	Presentase Jawaban Responden Dampak Pembuatan WC/Jamban Keluarga terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh	170
Tabel 4. 82	Presentase Jawaban Responden Dampak Pembuatan Taman / RTH terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh	171



## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Keterangan Gambar</b>	<b>Hal</b>
Gambar. 2.2	Kerangka Pikir Penelitian	54
Gambar. 3.1	Rumus Slovin (menentukan jumlah sampel)	64
Gambar. 3.2.	Rumus Penentuan Rata Rata	69
Gambar. 3.3.	Rumus Standar Deviasi	69
Gambar. 3.4.	Variabel Penelitian Rumusan Permasalahan Pertama	70
Gambar. 3.5.	Variabel Penelitian Rumusan Permasalahan Kedua	70
Gambar 4.1	Peta Kelurahan Tallo Kota Makassar	118
Gambar 4.2	Peta Lokasi Penelitian	118
Gambar 4.9	Grafik Histogram pemeriksaan normalitas error rumusan permasalahan pertama.	156
Gambar 4. 10	Grafik Normal PP Plot of regression standardized residual rumusan permasalahan pertama	156
Gambar 4.11	Grafik error konstan rumusan permasalahan pertama	158
Gambar 4.12	Grafik Histogram pemeriksaan normalitas error rumusan permasalahan kedua	173
Gambar 4. 13	Grafik Normal PP Plot of regression standardized residual rumusan permasalahan kedua	173
Gambar 4.14	Grafik error konstan rumusan permasalahan kedua	175

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan penduduk kota-kota di Indonesia baik sebagai akibat pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius. Diantaranya, timbulnya permukiman kumuh. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan akan perumahan, penyediaan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru.

Ketidaksiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, dalam mengantisipasi penambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan permukiman. Pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah. Sehingga, daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman kumuh. Permukiman kumuh ini pada umumnya memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat berat baik dari aspek fisik maupun aspek non fisik, sehingga telah menimbulkan suatu image bahwa kawasan permukiman kumuh identik dengan sebuah kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah yang kumuh dan kotor.



Lingkungan kumuh yaitu daerah pemukiman yang sangat padat penduduknya dan rumah-rumah didalamnya dibangun dengan tehnik konstruksi yang buruk dan menggunakan bahan-bahan yang bermutu rendah. Pola pemukiman tidak berstruktur dan tidak dilengkapi dengan sarana-sarana umum seperti fasilitas air bersih, pembuangan sampah, saluran pembuangan air dan kotoran serta jalan-jalan yang bersih, dan sering kali kondisi ini dihubungkan dengan ongkos sewa yang relatif mahal dan bahaya penggusuran". Perkembangan kota yang lebih cepat menimbulkan berbagai masalah terhadap penyediaan prasarana, sarana dan lingkungan perumahan kota, karena tidak diimbangi dengan pengadaan lapangan kerja yang memadai. Akibatnya penduduk yang berpenghasilan rendah akan menempati lingkungan pemukiman yang sesuai dengan penghasilannya. Disamping penghasilan yang rendah, ketidak pastian tanah yang mereka tempati, menjadikan mereka ragu untuk memperbaiki rumah yang dihuninya. Hal ini menjadikan lingkungan pemukiman kumuh tersebut semakin memburuk.

Selain itu keberadaan pemukiman kumuh seringkali dianggap sebagai sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya. Karena pemukiman yang padat dan banyaknya pendatang disana telah membuat daerah tersebut menjadi tidak ada aman untuk di tinggali. Ditambah dengan tingginya jumlah pengangguran di pemukiman kumuh sehingga memudahkan terjadinya aktivitas kejahatan.

Problematika permukiman kumuh membutuhkan penanganan serius, bahkan penanganan permukiman (rumah-rumah) kumuh ini telah mulai dilaksanakan pada masa kolonial dengan nama Program Perbaikan Kampung

(*Kampung Verbetering Program*), dimasa pemerinatah Orde Baru sampai sekarang program perbaikan permukiman terus dilakukan seperti ; Program MH Thamrin dan WR Supratman, Program Perbaikan Kampung (*Kampoong Improvement Program/KIP*), KIP Komprehensif, Program Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh (P2LPK), Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT), Program Peningkatan Kualitas Lingkungan (PKL), Penanganan Kumuh Berbasis Kawasan, dll, dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Pada Tahun 2000 lalu, agenda penanganan permukiman kumuh telah dicantumkan secara eksplisit dalam RPJP Tahun 2000-2025, dimana dalam RPJP pemerintah menargetkan segala permasalahan “kumuh” dapat teratasi dengan baik di tahun 2025. Akan tetapi berdasarkan arahan RPJMN 2014-2019, target tersebut diharapkan dapat lebih cepat terselesaikan pada tahun 2020. Kemudian pertanyaannya, apakah di tahun 2020 wajah perkotaan benar-benar akan bebas dari permukiman kumuh?.

Para ahli dan praktisi pembangunan kota melihat bahwa belum berhasilnya pembangunan permukiman di berbagai kota besar di Indonesia lebih banyak dikaitkan dengan persoalan urbanisasi (penduduk miskin), keterbatasan lahan perkotaan dan kurang tepatnya program-program pembangunan kota. Interaksi ketiganya telah memunculkan kehidupan masyarakat miskin pendatang dengan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak layak diperkampungan padat penduduk (permukiman/perkampungan kumuh). Namun sebenarnya akar masalah pemicu munculnya permukiman kumuh di perkotaan juga berkaitan dengan masalah paradigma proyek dan pemerataan pembangunan ( Prasojo, 2010).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi kawasan kumuh. Mulai dari program pengentasan kemiskinan yang dianggap sebagai penyebab utama munculnya kawasan kumuh sampai kepada program – program yang lebih spesifik. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satu cara yang ditempuh adalah menata kawasan permukiman kumuh diperkotaan dengan meluncurkan program – program penataan kawasan kumuh yakni program perbaikan fisik permukiman, program perbaikan dan peningkatan ekonomi serta program pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan sosial budaya masyarakat.

Banyak program dan kegiatan yang terlaksana pada kawasan permukiman kumuh, mulai dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, bahkan pihak swasta dengan CSR-nya. Namun seberapa efisien dan efektifkah penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan di lapangan? hal ini terjadi karena beberapa hal kendala dilapangan. Beberapa program dan kegiatan mencoba masuk ke permukiman kumuh tersebut, ternyata hanya bisa pembangunan infrastruktur permukimannya yang bisa dilaksanakan, seperti jalan setapak dan drainasenya saja sedangkan untuk penanganan perumahannya tidak bisa dilaksanakan. karena berbagai kriteria atau persyaratan, seperti kepemilikan lahan dan rumah. Solusi untuk penanganan perumahannya yaitu dengan perbaikan rumah tidak layak huni. Lagi-lagi solusi tersebut terkendala dengan kepemilikan rumah dan lahan. Kebanyakan masyarakat yang menempati rumah tersebut adalah sebagai penyewa atau pengontrak. Program dan kegiatan dari pemerintah tidak bisa memperbaiki rumah yang berada pada permukiman kumuh yang status tanah

dan rumahnya bukan milik pribadi/sendiri. Solusinya adalah pemerintah menyediakan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, atau dengan program pembangunan rusunawa dan rusunami. Lagi-lagi ketersediaan lahan yang menjadi kendala. Ketika rusunawa atau rusunami dibangun, tetapi pembangunan rusunawa/rusunami jauh dari calon penghuninya, maka masyarakat calon penghuni enggan untuk pindah dengan alasan harus mengeluarkan biaya tambahan, seperti biaya naik angkutan ke tempat bekerja, yang rata-rata mereka bekerja di sektor informal atau sebagai buruh harian.

Kota Makassar diidentifikasi telah mengalami pergeseran pemanfaatan lahan akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas sosial ekonomi strategis. Kota Makassar saat ini dihuni oleh penduduk yang beragam etnis dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,18% per tahun. Dengan demikian diperkirakan untuk periode 10 tahun ke depan akan terjadi peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman dengan luasan lahan yang sangat intensif dan bersifat skala besar.

Sesuai dengan perkembangan Kota yang kompleks terjadi, mengakibatkan kota Makassar menjadi Kota Metropolitan di Indonesia yang sesuai dengan atau sejalan dengan pembangunan serta industri yang terdapat maka memberikan dampak terhadap Kota Makassar. Dilihat dari perkembangan global maka diikuti dengan terjadinya urbanisasi maka dampak yang terjadi terlalu banyak konsentrasi yang memberikan efek seperti terjadinya "*slum area*" dan "*Squatter Settlements*" atau pembangunan liar. Urbanisasi terjadi karena dapat menjanjikan bagi setiap masyarakat untuk taraf hidup. Daerah Perkotaan merupakan ruang permukaan yang dimana

terdapat konsentrasi penduduk dengan segala kegiatannya yang membutuhkan tersedianya prasarana ataupun sarana perkotaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jumlah penduduk di daerah perkotaan menunjukkan perkembangan yang makin meningkat karena daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat, yaitu menjanjikan kesempatan kerja yang lebih luas, pendapatan yang lebih tinggi dan berbagai kemudahan lainnya yang beraneka macam.

Penyediaan prasarana perkotaan diarahkan kepada penyelenggaraan fungsi kota, yaitu utama adalah pengadaan tempat tinggal (permukiman), tempat kerja, sistem transportasi, dan lain-lain. Kebutuhan atau permintaan tersedianya prasarana perkotaan di beberapa daerah perkotaan dirasakan terlalu besar dibandingkan dengan yang dibangun. Suplai prasarana perkotaan ternyata tidak mampu mengimbangi yang dibutuhkan, karena lahan perkotaan untuk pembangunan prasarana itu relatif terbatas dan anggaran pembangunan yang tersedia juga sangat terbatas, sedangkan perkembangan perkotaan berlangsung semakin pesat.

Proses perkotaan atau urbanisasi adalah sesuatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara yang sudah maju demikian pula negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Proses perkotaan di negara-negara yang sedang membangun berlangsung relatif pesat, karena daya penarik kota sangat kuat baik bersifat ekonomis maupun bersifat non ekonomis. Keadaan dipedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar. Bagi kota yang padat penduduknya, penambahan yang tiap tahun jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja di dalam wilayahnya, sehingga

dirasakan menambah berat tekanan permasalahan di kota-kota besar, salah satunya kota Makassar. Tekanan ekonomi dan keterdesakan akan tempat tinggal bagi kaum slum pinggiran (Slum Area), hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh. Hal ini terjadi di hampir seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Peran aktif pemerintah kota Makassar dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh, tidak henti-hentinya dilaksanakan agar tercipta lingkungan permukiman yang layak huni, serta mengurangi lingkungan permukiman kumuh, upaya ini sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan tahun 2020 sebagai tahun bebas kumuh. Dimana kegiatan peningkatan kualitas permukiman yang fokus membenahi sampai ketinggian terendah yaitu lingkungan Kelurahan. Tanpa terkecuali Kelurahan Tallo seperti halnya Kelurahan kelurahan lainnya yang ada di Kota Makassar.

Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah banyak terlaksana di Kota Makassar baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Kota Makassar, program kegiatan yang terlaksana diantaranya adalah SLBM, USRI, PAMSIMAS, PNPM-MP, P2KP, NUSSP, PLPBK serta yang terbaru pada tahun ini ada program KOTAKU, yang terlaksana sejak tahun 2009 sampai sekarang. Bahkan dalam visi misi kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD telah banyak melahirkan kegiatan yang sifatnya aplikatif guna mendukung program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Semua kegiatan yang terlaksana dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman dalam mendukung bebas permukiman kumuh



tersebut belum menggambarkan keefektifan, karena tidak adanya tolak ukur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, serta penggambaran kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi dari setiap program belum mampu diterjemahkan dengan baik oleh para pemangku kepentingan bahkan pada tingkatan masyarakat sendiri. Ini terkait tentang bagaimana keberlanjutan serta peran masing masing unsur dalam menjaga dan mengelola program dan kegiatan yang telah berjalan dengan baik, agar mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati.

Kelurahan Tallo merupakan salah satu Kawasan yang memiliki luasan Lingkungan Permukiman Kumuh yang cukup luas, dari hasil penilaian dan identifikasi kekumuhan kawasan tallo masuk dalam kategori kumuh berat (dokumen Identifikasi Kawasan Kumuh Kota Makassar, 2015). Dengan gambaran umum tersebut, kelurahan tallo dilakukan intervensi kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui kegiatan peremajaan lingkungan dengan fokusnya adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Kegiatan Penanganan lingkungan permukiman Kumuh di Kelurahan Tallo yang dilakukan yaitu melalui kegiatan peremajaan lingkungan permukiman, dengan intervensi segala macam bentuk kegiatan fisik dan pembangunan prasarana lingkungan permukiman. Secara konsep, rencana penanganan lingkungan permukiman di Kelurahan Tallo telah berjalan cukup baik, namun bukan tanpa kendala untuk melaksanakannya, mulai dari kesiapan sumber daya manusia hingga pendanaan. Secara umum kegiatan fisik yang terlaksana dalam merubah wajah kawasan mampu membuat efektif dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan dari segi fisik semata, namun pertanyaannya apakah kegiatan fisik yang telah berjalan tersebut mampu

dipertahankan dalam kurun waktu yang lama kedepannya? Apakah kegiatan fisik tersebut berpengaruh positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena permukiman kumuh tidak hanya menyangkut persoalan fisik semata, akan tetapi persoalan lingkungan permukiman kumuh juga adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait efektif tidaknya penanganan permukiman kumuh perkotaan, yang dikhususkan pada Kelurahan Tallo Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Adanya peningkatan dan pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan yang tak terkendali akan berdampak pada permasalahan baru di perkotaan, yaitu timbulnya kawasan yang tidak tertata dan tidak terencana yang lebih mudah dikenali dengan kawasan permukiman kumuh. Begitupula kota makassar dimana banyak sekali kawasan – kawasan atau spot spot kawasan permukiman kumuh yang tersebar di hampir seluruh wilayah kelurahan di Kota Makassar. Dimana isu utama dalam kawasan permukiman kumuh adalah kemiskinan dan rendahnya kualitas dan ketersediaan prasarana lingkungan permukiman.

pemerintah kota makassar melalui juga bantuan pemerintah pusat telah melakukan beberapa upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan prasarana lingkungan permukiman, dengan melibatkan organisasi dan kelembagaan serta masyarakat sendiri di kawasan lingkungan permukiman Kota makassar khususnya di Kelurahan Tallo. Namun pelaksanaannya belum terasa

maksimal karena keterbatasan sumber pendanaan yang tidak mampu mencakup seluruh kawasan kumuh yang ada dikelurahan tallo dan kota makassar umumnya.

Berdasarkan kesimpulan uraian permasalahan diatas serta uraian yang ada dalam latar belakang sebelumnya maka disimpulkan pertanyaan yang menjadi dasar pelaksanaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penanganan permukiman kumuh terhadap sosial ekonomi masyarakat di Lokasi Studi?
2. Apakah penanganan permukiman kumuh di Lokasi Studi efektif mengurangi tingkat kekumuhan kawasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pengaruh penanganan permukiman kumuh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Tallo Kota Makassar.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui apakah penanganan permukiman kumuh efektif mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Kelurahan Tallo Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi arahan serta memberikan gambaran bagi pengembangan program penanganan permukiman kumuh

agar dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi fisik lingkungan permukiman dan sosial ekonomi masyarakat.

- b. Menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui penanganan permukiman kumuh.
- c. Memberikan arahan (*guidance*) serta koridor perbaikan permasalahan bagi wilayah yang akan melaksanakan program penanganan permukiman kumuh agar terlaksana dengan baik.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Studi ini dibatasi pada kajian pengaruh penanganan permukiman kumuh terhadap kondisi sosial ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan perbaikan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui penataan dan penyediaan prasarana fisik lingkungan permukiman untuk mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman. Dalam kajian ini yang menjadi tolak ukur atau indikator sosial ekonomi yang diteliti adalah terkait *Kesejahteraan, Pendapatan, Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja, Struktur Peran dan Posisi Sosial, Pola Interaksi Sosial serta Mobilitas Sosial dan pergedseran struktur penduduk*. Dimana melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara umum berpengaruh positif terhadap sosial ekonomi masyarakat yang ada pada kawasan permukiman. Serta penilaian keefektifan kegiatan penanganan permukiman kumuh berdasarkan indikator yaitu antara lain: Adanya pengaruh, Adanya perubahan dan Memberikan hasil dan manfaat, dalam kegiatan penataan prasarana lingkungan permukiman keterkaitannya dengan kondisi sosial ekonomi.

Penelitian ini secara lingkup wilayah dilaksanakan di Kota Makassar, melihat cakupan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar yang cukup luas yaitu tersebar di 103 lokasi permukiman kumuh dan hampir berada di setiap wilayah kelurahan di Kota Makassar, maka penelitian ini secara lokasi dibatasi pada kawasan permukiman kumuh di wilayah Kelurahan terpilih dan telah melalui kegiatan pemugaran lingkungan permukimannya dalam program penanganan permukiman kumuh perkotaan serta mewakili beberapa karakteristik permukiman kumuh di kota makassar yaitu Kelurahan yang secara wilayah berada di Bantaran Sungai, yang berada di Pesisir Pantai serta Wilayah Kelurahan yang berada pada perkotaan, yaitu pada ORW. 4, RT. A dan RT. B Kelurahan Tallo Kota Makassar.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Substansi pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dalam 5 (lima) bab, yang meliputi sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan kajian pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang lingkup Penelitian dan Sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan terkait landasan dan pijakan teori yang mendukung untuk menjawab rumusan pertanyaan dalam penelitian ini yang menjelaskan antara lain tentang perkembangan kota dan permukiman kumuh, menjelaskan tentang urbanisasi dan kemiskinan, Teori marginalitas dan ketergantungan, pengaruh perubahan sosial dan pendekatan teori

kebutuhan, terkait juga tentang konsep permukiman kumuh perkotaan mulai dari pengertian permukiman kumuh, faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh, penanganan permukiman kumuh perkotaan, efektivitas penanganan permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat serta kerangka pikir dalam memahami penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Metode Analisa, Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Gambaran umum wilayah Studi Mulai dari tingkat Kota Makassar sampai pada Gambaran Lokasi Studi terpilih yaitu Kelurahan Tallo, kemudian selanjutnya dalam bahasan ini juga memuat tentang analisa hasil dan pembahasan mengenai pengaruh penanganan permukiman kumuh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Tallo Kota Makassar serta memuat hasil analisa nilai manfaat Penanganan permukiman terhadap kondisi fisik lingkungan apakah efektif dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman berdasarkan persepsi masyarakat di Kelurahan Tallo.

### BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari rangkaian hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Perkembangan Permukiman Kumuh Perkotaan.**

##### **1. Pengaruh Urbanisasi, Kemiskinan dan Pertambahan Penduduk**

Urbanisasi merupakan proses yang mempengaruhi perkembangan kota-kota di negara-negara berkembang. Urbanisasi yang terjadi disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk perkotaan yang tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk namun juga migrasi yaitu perpindahan penduduk desa ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Urbanisasi menyebabkan kota mengalami perkembangan dan pertumbuhan karena harus memenuhi kebutuhan penduduknya yang semakin banyak. Selain itu, proses perkembangan yang terjadi juga mempengaruhi perubahan ekonomi dan sosial. Perubahan ekonomi yang terjadi diantaranya adalah pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, seperti perdagangan dan industri. Adanya pergeseran sektor lapangan pekerjaan tersebut menyebabkan peningkatan produktivitas ekonomi suatu kota yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan dan aktivitas kota. Sedangkan perubahan sosial yang terjadi dalam proses urbanisasi ini ditunjukkan oleh adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup penduduknya (Mc Gee, 1971 dalam Amelia.R., 2009: 14-16).

Fenomena urbanisasi menyebabkan pertumbuhan wilayah perkotaan yang semakin luas, sehingga akan mempengaruhi struktur fisik kota dimana tidak hanya bagi kota besar tetapi juga bagi kota kecil.



Urbanisasi menghasilkan perubahan, baik konstruktif maupun deskriptif yang bergantung pada berbagai faktor, diantaranya daya dukung kota, terutama daya dukung fisik dan ekonomi, kualitas para urbanit, terutama dalam segi pendidikan dan keterampilan berwiraswasta, serta kebijakan pemerintah setempat dan kebijakan nasional mengenai tata kota dan tatanan pedesaan (Bintarto, 1984:24, dalam Amelia.R., 2009: 14-16). Pertumbuhan ekonomi yang cepat seiring perkembangan kota menghasilkan perubahan penting pada distribusi pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan pertanian dan peningkatan industri serta kontribusi yang stabil dari sektor pelayanan. Perubahan situasi struktural yang cepat tersebut memiliki dampak pada organisasi sosial dan ruang dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menciptakan dinamika perkotaan, perubahan penggunaan lahan, munculnya permukiman legal dan ilegal serta permasalahan lain seperti kerusakan lingkungan, limbah dan transportasi. Pada aspek sosial, wilayah perkotaan yang semakin tumbuh dan berkembang juga menyebabkan berkembangnya heterogenitas (Mc Gee, 1995, dalam Amelia.R., 2009: 14-16).

Adanya heterogenitas yang terlihat dari perbedaan sosial penduduknya menyebabkan pemisahan antara kelompok penduduk berdasarkan perbedaan ekonomi dan sosial penduduknya. Lebih lanjut, pemisahan tersebut terlihat dari adanya sektor formal dan sektor informal. Berdasarkan aspek ekonomi, kegiatan ekonomi formal di perkotaan yang merupakan bentuk baru integrasi global semakin meluas, namun kegiatan tersebut tidak mampu menyerap pekerja dengan pendidikan dan kemampuan rendah. Pada akhirnya, pekerja dengan produktivitas rendah

tersebut bekerja pada sektor informal (Lacabana dan Cariola, 2003, dalam Amelia.R., 2009: 14-16).

Perkembangan kota di dunia baik di negara berkembang maupun negara maju diiringi dengan permasalahan yang hampir sama (Derycke, 1999, dalam Amelia.R., 2009: 14-16), yaitu menurunnya tingkat pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Adanya berbagai kelompok sosial yang berkembang di kota menunjukkan adanya segregasi ruang perkotaan. Hal ini terkait dengan adanya perbedaan pendapatan, kelas sosial, ras dan etnik.

Kemiskinan di perkotaan dipicu oleh perkembangan kota yang semakin pesat, tercermin dari pesatnya perluasan wilayah kota, tingginya tingkat urbanisasi, meningkatnya perkembangan ekonomi yang ditandai adanya konsentrasi berbagai macam kegiatan ekonomi, terutama industri, jasa-jasa modern, dan perdagangan. Perubahan sosial dan modernisasi kehidupan telah mengubah kehidupan pola konsumsi, gaya hidup, dan perilaku sosial menuju pada perbaikan kesejahteraan (Shalimow, 2004 dalam Amelia.R., 2009: 14-16). Kemiskinan merupakan keadaan kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak, karena standar hidup tersebut berbeda-beda, maka tidak ada konsep kemiskinan yang universal (Levitan dalam Effendi, 1993:12 dalam Amelia.R., 2009: 14-16). Sedangkan menurut Sumodiningrat, kemiskinan adalah wujud dari kesenjangan antar kelompok sosial, jika ditinjau dalam segi keruangan, kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada beberapa sektor yang menampung tenaga kerja berlebih dengan tingkat produktivitas yang

rendah, dan ada pula kelompok masyarakat yang belum dapat merasakan hasil-hasil pembangunan secara memadai (Sumodiningrat, 1998 dalam Amelia.R., 2009: 14-16). Kemiskinan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu angka ketergantungan rumah tangga yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya hak kepemilikan dan keamanan aset, pendapatan yang rendah atau pengangguran (Kedir dan McKay, 2005:49 dalam Amelia.R., 2009: 14-16).

## **2. Pendekatan Teori Marginalitas dan Ketergantungan**

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di Indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. sebagian penghuni kota berprinsip sebagai alat mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian prinsip mereka harus hemat dalam arti yang luas, yaitu hemat mendapatkan lahan, pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk dalam mendapatkan bahan dan sistem strukturnya (Sobirin, 2001:41 dalam <https://nabillahwitsqa.wordpress.com/2016/10/11/budaya-permukiman-kumuh/>).

Amartya

Sen

dalam

<http://suraoriginal.blogspot.co.id/2015/04/tulisan-saat-kuliah-ternyata-begini.html>, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk bebas menjadi seseorang yang diinginkan. Tidak hanya dari keterbatasan finansial saja, tetapi juga dari berbagai macam dimensi, antara lain:

- a. Ketidakmampuan untuk memiliki penghasilan yang cukup dan stabil serta tidak adanya kepemilikan terhadap aset produktif;
- b. Tidak adanya aksesibilitas ke perumahan yang aman dan terjamin kepemilikannya;
- c. Tidak adanya aksesibilitas ke pelayanan infrastruktur dan publik;
- d. Tidak adanya aksesibilitas ke jaringan pengaman sosial dan perlindungan terhadap hak-hak legalnya;
- e. Ketidakmampuan untuk memiliki kekuasaan, berpartisipasi dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain.

Berbeda dengan Amartya Sen, A.Ramlan Surbakti (1984) dalam [http://suraoriginal.blogspot.co.id/2015/04/tulisan – saat – kuliah - ternyata-begini.html](http://suraoriginal.blogspot.co.id/2015/04/tulisan-saat-kuliah-ternyata-begini.html). menjelaskan dua teori, yaitu Teori Marjinalitas (Theory of Marginality) dan Teori Ketergantungan (Theory of Dependency) yang memberi gambaran munculnya kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan tersebut dipandang mengejawantah dalam bentuk permukiman-permukiman kumuh perkotaan.

Seperti yang disebutkan Amartya Sen di atas, ketidakmampuan mereka terhadap aksesibilitas ke perumahan formal (karena mahal) yang aman dan terjamin kepemilikannya menyebabkan mereka tinggal di kampung-kampung kota atau menempati lahan-lahan kosong di perkotaan

(permukiman spontan). Dengan kondisi seperti ini yang terjadi adalah penurunan kualitas lingkungan menjadi permukiman-permukiman kumuh.

Teori Ketergantungan mengungkapkan bahwa penghuni permukiman kumuh itu secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat kota, suatu bentuk integrasi yang justru merugikan mereka. Tidak seperti Teori Marjinalitas, Teori Ketergantungan memandang secara sosial mereka memiliki kohesi (keterkaitan) kelompok dan berorganisasi (sederhana).

### **3. Pengaruh Perubahan Sosial dan Pendekatan Teori Kebutuhan**

Soemardjan (1962 dalam Handayani 2014) mengemukakan, perubahan sosial terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kemudian mempengaruhi sistem sosial. Termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hampir sama dengan Soemardjan, Murdiyatomoko (2008 dalam Handayani 2014) juga mendefinisikan perubahan sosial selalu berkaitan dengan nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, lapisan sosial, dan kekuasaan yang berlaku.

Sedangkan perubahan ekonomi masyarakat berhubungan dengan perubahan kondisi mata pencaharian, kondisi pendapatan, jumlah pengeluaran masyarakat, dan kemampuan masyarakat dalam menyisihkan uang untuk menabung guna keperluan perawatan dan pemeliharaan rumah (Pawitro, 2012 dalam Handayani 2014).

Perubahan yang terjadi pada tingkat makro belum tentu memberi implikasi dampak yang sama pada berbagai komunitas. Faktor penyebab

perubahan dapat dibedakan dalam empat perspektif, yaitu materialistis, idealis, mekanisme interaksional dan sumber struktural. Sedangkan pola perubahan dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu linier, siklus, dialektik dan pusat periferi. Pengelompokan teori perubahan sosial juga dilakukan oleh Strasser dan Randall (dalam Batara Surya, 2011: 33-34). Perubahan sosial dapat dilihat dari empat teori yaitu : teori kemunculan diktator dan demokrasi, teori perilaku kolektif, teori inkonsistensi status dan analisis organisasi sebagai sub sistem sosial. (Batara Surya, 2011:34).

Untuk memahami dan memberi kesimpulan dalam perubahan sosial pada kawasan permukiman kumuh Tallo Kota Makassar, yang akan dipakai dalam menilai pengaruhnya adalah terkait konsep tentang peningkatan kualitas ruang yang mempengaruhi perubahan struktur dan kondisi sosial pada tatanan yang lebih mikro.

Bila kelompok yang berkuasa dalam masyarakat berada dalam posisi yang kuat untuk memengaruhi perubahan-perubahan dalam norma sosial, maka mereka juga memiliki kekuasaan dalam memelihara norma-norma sosial yang sudah mereka ciptakan. (Berry dalam Batara Surya, 2011:41)

Menurut Bintarto (1989:31) dalam Indarto 2015, perubahan dalam suatu lingkungan akan dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri, manusia dan pola aktivitasnya. Perubahan yang terjadi dapat dijelaskan kedalam tiga bentuk perubahan yakni perubahan perkembangan, perubahan lokasi dan perubahan perilaku. Penjelasan mengenai perubahan tersebut sebagai berikut:

- Perubahan Perkembangan, yaitu perubahan yang terjadi setempat dimana perubahan-perubahan itu masih dapat dilaksanakan ditempat itu dengan tidak perlu mengadakan suatu perpindahan
- Perubahan lokasi dari suatu unit kegiatan,yakni perubahan yang terjadi di suatu tempat yang mengakibatkan adanya suatu rencana atau gejala perpindahan sesuatu bentuk aktivitas atau perpindahan sejumlah penduduk dari daerah itu ke daerah lain.
- Perubahan Perilaku perubahan ini meliputi perubahan sikap perilaku atau tata laku dari penduduk setempat dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di daerah tersebut.

Menurut (Supartono dkk, 2011 dalam Indarto 2015) Pengaruh terhadap karakteristik yang muncul dalam masyarakat di lingkungannya baik secara sosial maupun ekonomi.Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu variabel untuk dapat melihat kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam jurnalnya menyebutkan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosialnya. Variabel ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan,besarnya pengeluaran perbulan atau belanja atau konsumsi, baik untuk pangan maupun non pangan serta tingkat produksi, investasi dan sebagainya.

Dalam pendekatan teori kebutuhan berangkat dari hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hirarki dari lima kebutuhan Maslow (dalam Batara Surya, 2011:41), hirarki tingkat kebutuhan manusia yaitu :

- Fisiologi : meliputi rasa lapar, haus, berlidung, seksual dan kebutuhan fisik lainnya.



- Rasa aman : meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional.
- Sosial: meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan.
- Penghargaan: meliputi faktor-faktor penghargaan internal seperti otonomi dan pencapaian, dan faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan dan perhatian.
- Aktualisasi diri: meliputi dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya, meliputi pertumbuhan, pencapaian pertumbuhan seseorang dan pemenuhan diri sendiri.

Dasar teori hirarki kebutuhan pada intinya menyebutkan bahwa individu bergerak menaiki tingkat hirarki. Dari sudut motivasi, menyebutkan bahwa meskipun tingkat kebutuhan yang benar benar terpenuhi, akan tetapi pemenuhan hirarki kebutuhan ditujukan memahami kondisi dan situasi dimana orang tersebut berada dan fokus untuk memenuhi kebutuhannya,(dalam Batara Surya, 2011:41). Teori ini di pergunakan untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah dilakukannya penanganan lingkungan fisik permukiman, apakah ini memberi pengaruh atas kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Teori pemenuhan kebutuhan dasar yang dianjurkan oleh mahbub ul haq dari bank dunia dan james grant dari overseas development council (dalam Nursid Sumaatmaja, slide 146). Pendekatan teori ini menitikberatkan pada pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan air bersih, sandang dan partisipasi dalam mengambil keputusan. Titik berat pada

pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*) meningkatkan kemampuan fisik dan non fisik. Dengan mengambil contoh jepang, taiwan dan korea, dilakukan redistribusi aset produksi ke arah industrialisasi yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

#### **4. Permukiman Kumuh Perkotaan**

##### **a. Pengertian Permukiman Kumuh.**

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi serta interaksi dengan kota – kota lain dan daerah hinterland. Kota – kota di indonesia pertumbuhan penduduk tidak di imbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan, bahkan yang terjadi justru sebagian kawasan perkotaan mengalami penurunan lingkungan yang berpotensi menciptakan *slum area* (kumuh). Akibatnya, muncul *slum area* (kumuh) di beberapa wilayah kota merupakan hal yang tidak dapat dihindari yaitu tidak di rencanakan oleh pemerintah tetapi *slum area* (kumuh) ini tumbuh secara alami.

Charles abrams dalam tjuk kuswartojo (2005:3) mengatakan bahwa ia tidak melihat perumahan hanya sebagai wadah fisik, ia menyimpulkan bahwa perumahan bukan hanya lindungan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial. Lanjut charles abrams juga menyimpulkan bahwa masalah perumahan tidaklah sederhana, tidak ada obat mujarab yang

dapat digunakan dan cocok untuk mengatasi masalah disemua negara (abrams dalam kuswartojo, 2005:4). Dalam tulisan charles abrams tidak ada kata permukiman yang muncul, kemungkinan dikarenakan pada masa itu perhatian memang tertuju pada pembangunan perumahan skala besar di eropa dalam rangka membangun kembali permukiman yang hancur akibat perang dunia kedua.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat Lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.(agus s. Sadana, 2014:17)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka pada dasarnya suatu permukiman terdiri dari isi (*contents*) yaitu manusia, baik secara individual maupun dalam masyarakat dan wadah yaitu lingkungan fisik permukiman lingkungan fisik permukiman yang merupakan wadah bagi kehidupan manusia dan merupakan pengejawantahan dari tata nilai, sistem sosial, dan budaya masyarakat yang membentuk suatu komunitas sebagai bagian dari lingkungan permukiman tersebut.

Menurut Rindrojono, (2013) Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat di artikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Menurut Undang–Undang No. 1 pasal 1 ayat 13 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh merupakan akumulasi dari ketidakmampuan masyarakat untuk memelihara rumah dan lingkungannya, serta ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kawasan permukiman serta menyediakan sarana dan prasarana dasar (Buletin Cipta Karya, 2015).

J.F.C. Turner, memberikan konsep rumah dalam suatu permukiman yaitu rumah merupakan bagian yang tidak dapat dilihat sebagai hasil fisik yang rampung semata, melainkan merupakan proses yang berkembang dan berkaitan dengan mobilitas sosial – ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu (Turner, 1972: 204) . Paradigma Turner (Turner, 1985:58) menyebutkan, bahwa “Housing as a participatory process” or “ Housing as as verb”. Pembangunan perumahan merupakan bagian integral dari kehidupan seseorang (keluarga) yang dapat berkembang meningkat sesuai kondisi sumber daya serta pandangan atas kebutuhan sesuai persepsinya. Rumah tidak dapat dilihat sebagai bentuk fisik bangunan menurut standart tertentu (dweling unit), tetapi merupakan proses interaksi rumah dengan penghuni dalam siklus waktu.

Masrun (2009) memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka / rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan.

Charter Adam (1984) menamakan permukiman di lingkungan kumuh sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah. Menurut E.E. Bergel (1970) permukiman kumuh disebutnya sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial. Soemadi (1990) menyatakan perkampungan kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan.

Dengan melihat beberapa teori tersebut di atas maka pengertian permukiman kumuh dalam penelitian ini adalah suatu daerah slum area yang tidak layak huni, tidak memenuhi syarat kesehatan, dengan kondisi lingkungan permukiman tanpa sanitasi, dimana infrastruktur

permukiman tanpa pengelolaan yang baik, bangunan yang relatif kecil, berdempet-dempetan, infrastruktur permukiman sangat kurang, kualitas bangunan rendah dan bersifat kotemporer atau darurat. Munculnya kawasan permukiman kumuh merupakan satu indikasi kegagalan program perumahan yang terlalu berpihak pada produksi rumah langsung terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, dan prioritas program perumahan pada rumah milik dan mengabaikan potensi rumah sewa (Sueca, 2004:56-107). Secara umum, penyebab utama munculnya kumuh dapat berasal dari kondisi fisik dan non fisik penduduk bersangkutan. Kondisi fisik secara jelas dapat dilihat dari kondisi lingkungan penduduk yang rendah serta status kepemilikan lahan yang ilegal, sedangkan non fisik yaitu berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan budaya penduduk tersebut.

Selanjutnya J.F.C Turner, memberikan konsep rumah dalam suatu permukiman yaitu rumah merupakan bagian yang tidak dapat dilihat sebagai hasil fisik yang rampung semata, melainkan merupakan proses yang berkembang dan berkaitan dengan mobilitas sosial – ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu (Turner, 1972: 204) . Paradigma Turner (Turner, 1985:58) menyebutkan, bahwa “Housing as a participatory process” or “ Housing as as verb”. Pembangunan perumahan merupakan bagian integral dari kehidupan seseorang (keluarga) yang dapat berkembang meningkat sesuai kondisi sumber daya serta pandangan atas kebutuhan sesuai persepsinya. Rumah tidak dapat dilihat sebagai bentuk fisik bangunan menurut standart tertentu

(dwelling unit), tetapi merupakan proses interaksi rumah dengan penghuni dalam siklus waktu.

Konsep interaksi antara rumah dan penghuninya (Turner, 1972) adalah apa yang diberikan rumah kepada penghuni, serta dilakukan penghuni terhadap rumahnya. Turner juga berpendapat bahwa masyarakat harus lebih banyak mengatur proses pengadaan rumah, sehingga dapat menghasilkan lingkungan yang lebih baik dalam arti luas.

Ada 3 dasar teori (Turner 1972: 1- 5) yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu:

- Bila penghuni menguasai proses pengambilan keputusan utama dan memiliki keleluasaan untuk memberikan masukan dalam perancangan, pembangunan dan pengelolaannya, maka proses maupun lingkungan yang dihasilkan akan meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat lainnya.
- Bila sebaliknya, maka lingkungan permukiman akan menjadi penghambat untuk pemenuhan diri dan beban ekonomi keluarga.
- Bukan wujud suatu rumah yang terpenting, melainkan dampak terhadap kehidupan penghuninya. Dengan kata lain, kepuasan penghuni tidak selalu sejajar dengan pemakaian standart. Kekurangan dan ketidak sempurnaan rumah jauh lebih dapat diterima bila hal tersebut merupakan akibat tanggung jawab diri sendiri dari pada tanggung jawab pihak lain.

Permukiman kumuh umumnya dikaitkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula



menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras serta di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Ciri lain permukiman kumuh adalah tingkat kepadatan yang tinggi dan kurangnya akses ke fasilitas umum dan sosial. Status permukiman kumuh seringkali tidak jelas, baik dari status administrasi dan hukum tanah, maupun kesesuaian dengan rencana tata ruang kota. Terkait status hukum atas tanah, biasanya hal ini yang membedakan permukiman kumuh (*slum*) dengan permukiman liar (*squatter*).

Johan Silas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan permukiman kumuh adalah:

- Kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh.
- Kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh. Yang menjadi penyebabnya adalah mobilitas sosial ekonomi yang *stagnan*

Dalam tulisannya Surabaya, Pembangunan dan Kehadiran dan Permukiman Kumuh, Johan Silas menjelaskan tentang kriteria pokok permukiman kumuh/marginal :

- berada di lokasi yang tidak legal;

- keadaan fisik yg substandar, penghasilan penghuninya amat rendah (miskin);
- tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota;
- tidak diingini kehadirannya oleh umum, (kecuali yang berkepentingan).

Lebih lanjut Johan Silas menegaskan, pemukiman marjinal selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non formal); ada sistem angkutan yg memadai; dapat dimanfaatkan secara mudah walau tidak selalu murah.

David Satterwhaite menyatakan bhw pemukiman marjinal adalah tidak sah dalam dua hal, yaitu pertama, tanah dihuni secara tidak sah, dan kedua, site serta bangunan dibangun dan dikembangkan secara tidak sah, berlawanan dengan tata guna lahan (*zoning*).

Secara umum, pemukiman marjinal dikelompokkan menjadi empat (4) tipe besar, secara sekuensial terdiri atas:

- Keadannya cukup baik dan berpeluang diresmikan (dilegalkan).
- Keadannya sudah baik, tetapi ada kesulitan untuk menjadi resmi, walaupun bukan harga mati.
- Keadaannya amat terbatas dan tidak berpeluang untuk diadakan pengembangan lebih lanjut.
- Keadaannya sangat darurat, baik tetap maupun mobile.

Menurut Sul Yadi Wardi ST.MT (1997), ciri-ciri pemukiman kumuh : Dilihat dari penggunaan lahan-lahan yang sangat kritis dengan kecenderungan adanya musibah, kepadatan yang tinggi dilihat dari penduduk maupun bangunannya, tidak tersedianya sarana & prasarana

kota yg cukup memadai seperti saluran pembuangan air kotor, pelayanan air bersih dan penerangan listrik.

Mengacu pada penjelasan beberapa teori dan konsep yang diuraikan diatas sebelumnya, berikut ini merupakan pemaparan kesimpulan mengenai kriteria/ indikator penilaian kumuh kawasan permukiman :

- Tanah yang dihuni tidak sah.
- Keadaan prasarana fisik yang substandar.
- Hunian yang ditempati termasuk dalam kategori rumah darurat jika di tinjau dari bahan-bahan bangunan tersebut, seperti seng, kardus, tripleks, dst.
- Kondisinya tidak teratur.
- Dihuni oleh penduduk berpenghasilan rendah.
- Bangunannya dibangun dan dikembangkan secara tidak sah, berlawanan dengan tata guna lahan (*zoning*).
- Memiliki kepadatan yang tinggi dilihat dari penduduk maupun bangunannya.
- Terletak di pusat kota dengan tujuan untuk kemudahan mengakses sistem angkutan umum. Selain itu, agar mereka berada/ tinggal di tempat yang tidak jauh dari sumber mata pencarian mereka sehingga penggunaan biaya transportasi sedikit.
- Tidak tersedianya sarana & prasarana kota yg cukup memadai seperti saluran pembuangan air kotor, pelayanan air bersih dan penerangan listrik.

Permukiman Kumuh yang terjadi berdasarkan pemahaman uraian tersebut diatas terjadi atas dasar keterbatasan secara fisik, sosial dan ekonomi. Namun dalam perkembangan sampai sekarang ini, program penataan kawasan permukiman kumuh lebih banyak menyentuh pada ranah fisik semata, walaupun perencanaan sosial ekonomi telah juga diikutsertakan dalam perencanaan fisik tersebut. Namun tingkat keberhasilan yang terlihat adalah pada estetika semata dalam artian perencanaan fisik lebih dominan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan hasilnya pun lebih kepada peningkatan kualitas lingkungan fisik semata, tanpa memperhatikan kualitas sosial dan ekonomi yang diharapkan guna menurunkan tingkat kekumuhan suatu kawasan permukiman.

#### **b. Faktor Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh**

Menurut Rindrojono (2013), Adapun faktor – faktor yang menyebabkan tumbuhnya di permukiman kumuh di daerah perkotaan, yakni :

##### **a) Faktor Urbanisasi**

Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio – ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa – jasa. Proses Urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang di alami oleh negara – negara yang sedang berkembang dan proses urbanisasi ini berlangsung pesat di karenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun yang bersifat non ekonomi. Selain

itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota – kota besar.

Kota yang mulai padat penduduk dengan penambahan penduduk tiap tahunnya melampaui penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di daerah perkotaan sehingga menambah masalah baru bagi kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa, memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya permukiman liar di daerah pinggiran ini.

#### b) Faktor Lahan Perkotaan

Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, ini merupakan permasalahan yang di hadapi di daerah perkotaan sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan.

Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit – unit hunian di permukiman yang tidak layak.

c) Faktor Prasarana dan Sarana

Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh.

d) Faktor Sosial dan Ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan.

e. Faktor Tata Ruang

Dalam tata ruang, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman

kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan, bahkan jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama tau kampung – kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi.

Menurut Khomarudin (1997), penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

- Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,
- Sulit mencari pekerjaan,
- Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan,
- Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah,
- Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

Menurut Arawinda Nawagamuwa, 2003 keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut. Adapun ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dapat tercermin dari : Penampilan fisik bangunannya yang makin kontruksi, yaitu banyaknya bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta nampak tak terurus maupun tanpa perawatan.

Dari uraian faktor faktor penyebab terjadinya kekumuhan kawasan permukiman diatas merupakan gambaran tingkat kekumuhan terkait prasarana dan sarana serta sosial ekonomi masyarakat, untuk melihat sejauh mana dampak dan pengaruhnya dalam penanganan permukiman kumuh melalui kegiatan peningkatan



kualitas lingkungan permukiman memberikan pengaruh positif terhadap kondisi fisik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

## **B. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan.**

### **1. Kebijakan dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan**

Tjuk Kuswantojo, dkk (2005), menggambarkan ada tiga kebijakan pokok dan strategis nasional terkait perumahan dan permukiman, yaitu : *Pertama*, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Dengan strateginya untuk mewujudkan hal ini adalah dengan pengembangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penataan ruang yang transparan dan partisipatif, pematapan kelembagaan dan pengawasan keselamatan konstruksi. *Kedua*, memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi semua. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, pengembangan perumahan tersebut bertumpu pada kelompok dan pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kebutuhan perumahan akibat bencana dan kerusuhan sosial. *Ketiga*, mewujudkan lingkungan permukiman yang bermutu secara berkelanjutan. Strategi untuk mencapai kondisi ini dilakukan dengan memberi prioritas pada permukiman kumuh di perkotaan dan kawasan pesisir, pengembangan prasarana dan sarana dasar, dan penerapan tata lingkungan.

Lanjut menurut Tjuk Kuswantojo, dkk (2005), meski kebijakan dan strategi ini tampaknya seperti tidak terbantahkan, tapi sebesar apa

tantangan yang dihadapi dan sebesar apa kapasitas yang dimiliki tidak benar-benar diukur. Hal ini sering mengakibatkan, kebijakan dilaksanakan secara ala kadarnya atau hanya berupa eksperimen penerapan kebijakan. Meski ada predikat nasional dalam kebijakan dan strategi ini, efektivitasnya pada tingkat nasional belum pernah dikaji. Dimana kedudukan politis dan legal kebijakan ini memang tidak meyakinkan untuk mendapatkan dukungan pemerintah secara penuh.

Dalam outline Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan yaitu terkait Kebijakan dan Program Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019, yaitu : *Arah Kebijakan*, Menciptakan Lingkungan yang memungkinkan, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, mencegah pembentukan kumuh baru. *Strategi pokok*, menyediakan lahan perumahan untuk MBR, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, fasilitasi pembangunan perumahan swadaya, menangani permukiman kumuh secara komprehensif dan terpadu dengan rencana kota, memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan sistem kota.

Lebih lanjut dalam Buku Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diungkapkan yaitu : *Kebijakan*, Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan di Kawasan Permukiman Kumuh, dengan *Strategi*, menyiapkan landasan penyelenggaraan, membangun sistem dan informasi perumahan dan permukiman kumuh nasional, membangun kelembagaan penanganan di pusat dan daerah, membangun

dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas dan peran masyarakat.

Sampai dengan saat ini, belum ada kebijakan dan strategi khusus untuk mengatasi Kawasan kumuh, kecuali Undang-Undang yang sering dipergunakan sebagai dasar pembangunan permukiman yaitu UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekalipun sebenarnya Penanganan kawasan kumuh tidak cukup diselesaikan melalui penanganan kawasan permukiman, tetapi harus diangkat pada level yang lebih tinggi yaitu di tingkat kota, mengingat kompleksitas persoalannya dan tumbuhnya kawasan kumuh salah satu sebabnya adalah karena urbanisasi ke kota, jadi secara sistemik dia berada pada sistem skala kota.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, dipertegas lagi dan dijelaskan tentang mekanisme dan tata cara arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dengan lingkup atau cakupannya adalah meliputi:

- kriteria dan tipologi;
- penetapan lokasi dan perencanaan penanganan;
- pola-pola penanganan;
- pengelolaan; dan
- pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

## 2. Kebijakan dan Strategi Penataan Permukiman Kumuh Kota Makassar

Strategi pengembangan permukiman kumuh perkotaan, bagi Kota Makassar adalah mewujudkan tersedianya rumah dalam jumlah yang memadai, di dalam lingkungan yang sehat, serta memenuhi syarat-syarat sehat, memberi kepuasan penghuni, kuat dan dalam jangkauan daya beli rakyat banyak (SPPIP Kota Makassar, 2010). Dalam arahan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kota Makassar tahun 2005 – 2025 merumuskan arahan kebijakan pembangunan kawasan dan tata ruang, yang dituangkan dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan diarahkan pada ketersediaan perumahan dan permukiman, sarana transportasi, air bersih, listrik, sarana rekreasi dan wisata, sarana kebersihan dan keindahan kota yang sejalan dengan perkembangan penduduk, tata ruang kota, kemajuan ekonomi yang mendukung, perwujudan Makassar yang berwawasan lingkungan dan bersahabat. Serta penciptaan lingkungan yang bersih, indah, lestari dan sehat yang mendukung terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan kedamaian bagi warga kota.

Dalam rumusan arahan kebijakan RPJMD Kota Makassar terkait kebijakan pembangunan tata ruang dan lingkungan telah dirumuskan arahnya untuk Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan, permukiman dan penataan kawasan kumuh.

Arahan kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh kota makassar sejatinya telah tertuang dalam program dan kegiatan yang lebih aplikatif melalui rencana rencana strategis yaitu antara lain P2WKSS, Bedah Rumah, Apartemen Lorong sampai pada Program dan Kegiatan

Penataan Lorong. Kesemua program ini merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi yang telah tertuang dalam RPJMD kota Makassar.

### 3. Konsep dan Model Penanganan Permukiman Kumuh

Bagaimana penanganan kawasan kumuh menurut UU tersebut. Pola penanganan kawasan kumuh bila mengacu kepada UU. No 1 Tahun 2011 Bab VIII dari mulai pasal 94 s.d 97 terdapat 2 (dua) pola penanganan, yaitu Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Implementasi dari program ataupun kegiatan yang mengarah kepada pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman itu, adalah sebagai berikut: *Pertama*, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui, 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Pengawasan dan Pengendalian; terutama dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberdayaan masyarakat; melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat melalui Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Bisa dikatakan Program PNPM Perkotaan secara umum masuk dalam kategori penanganan kawasan kumuh ini. *Kedua*, peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Pola peningkatan kualitas lingkungan permukiman itu dilaksanakan melalui 3 kategori yaitu: **Pemugaran**; yaitu Kegiatan perbaikan bangunan gedung, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum yang dilakukan tanpa perombakan mendasar dan bersifat parsial, terutama dilakukan kepada kawasan dalam kategori kumuh ringan. Kegiatan “P2KP” banyak bermain di area ini. Peremajaan; yaitu kegiatan yang dilaksanakan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan gedung, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. Biasanya dilakukan kepada kawasan yang masuk dalam kategori Kumuh Sedang. Permukiman Kembali; yaitu dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi dengan klasifikasi status lahan legal, biasanya dilakukan di kawasan yang masuk dalam kategori kumuh berat.

Pola pola penanganan permukiman kumuh ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud meliputi:

- pemugaran;
- peremajaan; atau
- pemukiman kembali.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai macam program kegiatan penanganan infrastruktur permukiman kumuh perkotaan sebagai wujud intervensi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, namun pembangunan infrastuktur tersebut banyak yang tidak berjalan dengan baik, hal tersebut sebagai akibat banyaknya program penanganan kawasan yang di keluarkan oleh pemerintah tanpa ada pelibatan masyarakat aktif secara menyeluruh sehingga pemeliharaan infrastuktur tersebut tidak menjadi efektif. pemerintah mengubah pola pengembangan menuju aktivitas pemberdayaan masyarakat yang disebut Konsep TRIDAYA. Konsep ini memiliki 3 komponen pemberdayaan: (1) pemberdayaan komunitas sosial, (2) pemanfaatan lingkungan fisik, dan (3) peningkatan usaha kecil.

Tujuan penataan permukiman kumuh adalah dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, dan martabat masyarakat penghuni permukiman kumuh terutama golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah melalui fasilitasi penyediaan perumahan layak dan terjangkau dalam lingkungan permukiman yang sehat dan teratur; serta mewujudkan kawasan permukiman yang ditata secara lebih baik sesuai dengan peruntukan dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

Disamping itu melalui penataan lingkungan permukiman diharapkan mampu mendorong penggunaan dan pemanfaatan lahan yang efisien



melalui penerapan tata lingkungan permukiman sehingga memudahkan upaya penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang diperlukan serta dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial antar kawasan permukiman di daerah perkotaan.

Hasyim Basri, dkk. (2010) Dalam [https://www.academia.edu/8895030/model\\_penanganan\\_permukiman\\_kumuh](https://www.academia.edu/8895030/model_penanganan_permukiman_kumuh). Mengungkapkan dan menguraikan beberapa model penanganan permukiman kumuh dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peremajaan merupakan suatu model yang menjadi acuan dalam upaya untuk memperbaiki permukiman yang mengalami degradasi lingkungan. Beberapa model dalam menangani masalah permukiman kumuh diperkotaan antara lain :

**a. Model Land Sharing**

Model land sharing adalah penataan ulang di atas tanah/lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi. Dalam penataan tersebut, masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama sebagaimana yang selama ini dimiliki/dihuni secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran). Beberapa syarat untuk penanganan yang akan dilakukan antara lain:

- Tingkat kepemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas,
- Tingkat kekumuhan tinggi, dengan ketersediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar.

- Tata letak bangunan tidak berpola.

#### ***b. Model Konsolidasi Lahan/ Tanah (Land Consolidation)***

Konsolidasi lahan merupakan suatu kegiatan terpadu menata (kembali) suatu wilayah yang tidak teratur menjadi teratur, lengkap dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan, agar tercapai penggunaan tanah / lahan secara optimal yang pada prinsipnya dilaksanakan atas swadaya masyarakat sendiri.

Konsolidasi lahan juga merupakan suatu sistem pengembangan lahan inkonvensional yang saat ini telah diterapkan di Indonesia, antara lain: Denpasar, Bandung, Palu, Kendari dan beberapa kota lain. Pada prinsipnya secara konseptual konsolidasi lahan kota mengandung tujuan:

- Menggabungkan secara sistematis lahan yang berpencar-pencar dan tidak teratur disesuaikan dengan tata ruang.
- Mendistribusikan lahan yang telah ada dikonsolidasikan kepada pemilik lahan secara proporsional.
- Mengatur bentuk dan letak persil pemilikan.
- Meningkatkan nilai ekonomis melalui pengadaan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai di atas lahan yang disumbangkan oleh pemilik.

Prinsip dasar konsolidasi lahan adalah :

- Kegiatan konsolidasi lahan membiayai dirinya sendiri.
- Adanya land polling yang juga merupakan ciri khas konsolidasi lahan.
- Hak atas tanah sebelum dan sesudah konsolidasi tidak berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.

- Melibatkan peran serta secara aktif para pemilik tanah.
- Tanah yang diberikan kembali pada pemilik mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada sebelum konsolidasi tanah.

### **c) Model Resettlement**

Menurut Johara T.J, (1999). Resettlement atau pemukiman kembali pada umumnya dilakukan melalui program transmigrasi yaitu perpindahan penduduk (migrasi) dari suatu daerah yang rapat penduduknya umumnya di P. Jawa menuju daerah yang masih jarang penduduknya biasanya terdapat diluar P. Jawa dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan diharapkan dapat meningkatkan integrasi nasional dalam ekonomi dan sosial. Pada Departemen Transmigrasi, resettlement masih merupakan pra-desa yaitu tingkat yang lebih rendah dari desa swadaya yaitu permukiman penduduk yang kecil-kecil dan tersebar, yang penduduknya belum menetap pada tempat yang disebut desa.

Resettlement atau pemindahan penduduk pada suatu kawasan yang khusus disediakan. Pemindahan penduduk biasanya memakan waktu dan biaya sosial yang cukup besar, termasuk kemungkinan tumbuhnya kerusuhan atau keresahan masyarakat. Pemindahan ini apabila permukiman berada pada kawasan fungsional yang akan /perlu direvitalisasi sehingga memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah kabupaten/kota.

### **d) Pembangunan Rumah Susun**

Pembangunan rumah susun merupakan suatu model penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan mengubah kondisi

lingkungan permukiman yang sangat padat penduduknya dan dinilai tidak memenuhi syarat lagi sebagai tempat hunian yang layak.

Cara yang dilakukan dalam pembangunan rumah susun adalah dengan memperkecil lahan untuk perumahan tetapi dengan meningkatkan luas lantai. Lahan sisa (residual land) dimanfaatkan untuk penempatan fungsi perkotaan produktif misalnya komersial, perkantoran atau pusat hiburan dan penempatan prasarana lingkungan (jalan dan utilitas umum) dan sarana lingkungan (fasilitas sosial dan fasilitas umum). Rumah susun merupakan sebagai suatu bangunan rumah bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal terdiri atas satuan atau unit dengan batasan yang jelas baik ukuran maupun luasnya.

Pembangunan kembali pada kawasan permukiman kumuh secara vertikal maksimal 4 (empat) lantai dengan maksud sebagai berikut:

- Supaya dapat menampung seluruh penghuni.
- Harga tanah di pusat kota relatif tinggi.
- Sebagian tanah digunakan untuk kebutuhan sosial.
- Sebagian tanah dijual kepada pihak swasta atau pemerintah guna memperkecil biaya pembangunan untuk meringankan harga sewa atau cicilan.
- Sebagian tanah diserahkan pada pemerintah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya sebagai pendukung kawasan.

**e) Program Perbaikan Kampung / Kampung Improvement Program (KIP)**

Program Perbaikan Kampung (KIP) merupakan suatu pola pembangunan kampung yang didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya. Program ini mempunyai prinsip universal yang berlaku dimanamana yakni memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan pemamfaat sumberdaya kota guna memperbaiki taraf hidup dan kemampuan untuk maju. Prinsip dari program perbaikan kampung adalah perbaikan lingkungan kampung-kampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan tinggi.

Menurut Direktorat Cipta Karya, Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman,(1998). Ciri-ciri kondisi kawasan yang dapat diterapkan program perbaikan kampung :

- Berada pada kawasan legal dan sesuai dengan RTR.
- Tingkat kepadatan tinggi, tetapi masih dalam batas kewajaran
- Kualitas PSDPU langka dan terbatas.
- Belum perlu tindakan penataan menyeluruh dan resettlement.
- Dampak permasalahan bersifat lokal.

**C. Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh**

**1. Konsepsi Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah

populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat Hidayat (1986) dalam konsep efektivitas yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Ali Muhidin (2009) dalam Makalah Efektivitas juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Jadi efektivitas disini merupakan kegiatan atau usaha dalam mencapai tujuan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan manfaat dan hasil yang baik bagi penggunanya. Hal ini sejalan dengan pemikiran The Liang Gie (2002:16) yang diungkapkan dalam ensklopedia administrasi, yang mana efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki.

Sementara menurut Eko Budiharjo (1995), bahwa salah satu kendala yang menentukan efektivitas rencana (rencana tata ruang atau rencana sektoral) adalah lemahnya mekanisme

pengendalian pembangunan (development control). Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain; Pemerintah Daerah sering tidak mempunyai akses terhadap rencana-rencana yang pendanaannya dari pemerintah pusat. Selain itu juga karena rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah bisa berubah total akibat adanya faktor lain, misalnya adanya investasi skala besar yang tidak diduga sebelumnya atau bergantinya Pimpinan Daerah sehingga program-program yang pelaksanaannya jangka panjang sering terganggu. Hal lain yang tak kalah pentingnya yang menyebabkan tidak efektifnya adalah tidak adanya penegakan hukum (enforcement), sehingga pelanggaran terhadap rencana jarang sekali diberikan teguran apalagi dikenai sanksi.

Selanjutnya Emerson dalam Handayani (2002:16) mengatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, Hal ini dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan dalam Handayani (1996:16) bahwa "efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit". Hal senada juga dikemukakan oleh Miller dalam Handayani (1996:16) "Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments", yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Pengertian yang



memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di atas, peneliti menggunakan teori Emerson dalam Handayani (2002:16) bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Selain itu juga digunakan pandangan dari pemikiran The Liang Gie (2002:16) yang diungkapkan dalam ensklopedia administrasi, yaitu efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki.

Pengertian efektivitas yang dapat peneliti simpulkan serta yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut "Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana kegiatan tersebut tercapai dan sesuai dengan yang diinginkan serta memberikan efek, hasil dan manfaat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Pengukuran Efektivitas**

Mengukur keefektifan suatu kegiatan amatlah sulit dilakukan karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut perencanaan, maka seorang perencana memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti tercapainya hasil yang telah direncanakan sebelumnya terkait implementasi tujuan dan sasaran. sementara Jika

dilihat dari sudut pandang layanan dan manfaat kegiatan maka suatu kegiatan tersebut harus dapat memberikan hasil dan nilai manfaat yang baik dan besar bagi para penggunanya.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Richard Steer, efektifitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Pandangan ini mengutarakan bahwa untuk mengukur dan menilai efektivitas didasarkan pada hasil dan sasaran yang telah diperoleh.

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan Tujuan dan pendekatan sistem (1997:27-29). Dua pendekatan tersebut antara lain : Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).

Dalam <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>, Semakin banyak Rencana yang dicapai maka semakin efektif suatu kegiatan. sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektifitas”. Bagaimanapun definisi efektifitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Efektivitas dapat pula diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan litbang depdagri dalam budiani (2009) seperti diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel. 2.1. Standar Pengukuran Efektivitas**

No	Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
1	< 40	Sangat Tidak Efektif
2	40 – 59,99	Tidak Efektif
3	60 – 79,99	Cukup Efektif
4	> 80	Sangat Efektif

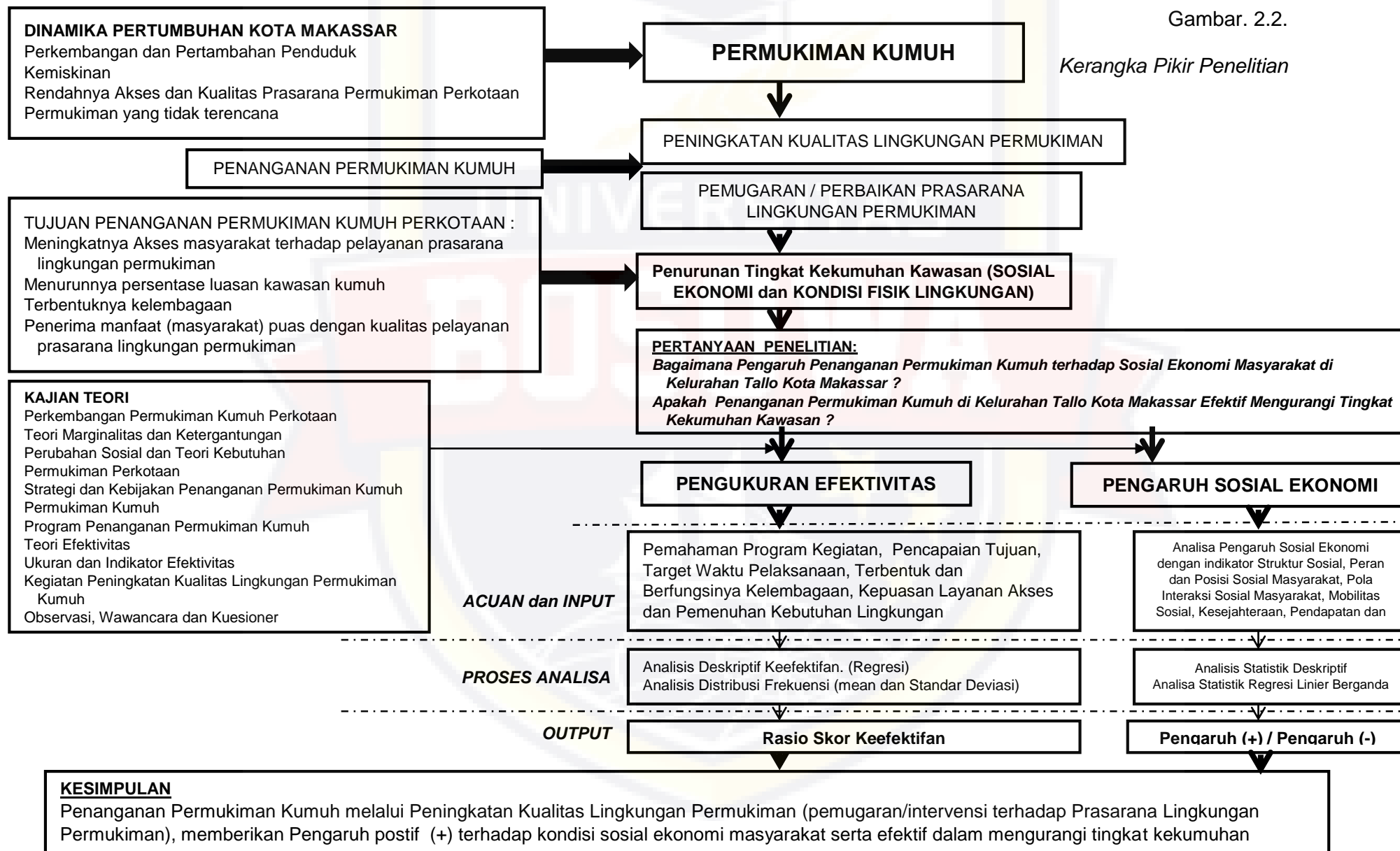
Sumber : Litbang Depdagri 1991, dalam Budiani 2009.

#### **D. Kerangka Pikir Penelitian.**

Merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan, Uma sekaran dalam sugiyono (2014) mengungkapkan bahwa, kerangka berfikir dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting. Secara garis besar kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 2.2. sebagai berikut :





### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, jenis dan metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian terapan. Gay (1977) dalam Sugiyono (2014:4) menyatakan bahwa Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Sedangkan berdasarkan kealamian tempat penelitian, jenis dan metode penelitian ini menggunakan metode survey yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (sugiyono, 2014:5).

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian rasionalistik-positivistik dimana studi dilakukan melalui kajian-kajian teori dan kajian kajian dokumen untuk mencari dan menyusun parameter-parameter serta indikator yang dapat digunakan untuk menilai pengaruh dan efektivitas penanganan permukiman kumuh dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman, selanjutnya parameter – parameter tersebut diterapkan untuk mencari pembuktian secara empiris dengan berdasarkan data yang ada dan ditemukan dilapangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk membuktikan efektivitas tingkat pencapaian tujuan dari diadakannya peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan

prasarana lingkungan permukiman dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan.

Pada penelitian ini, data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan melalui wawancara dengan partisipan atau informan secara mendalam. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai profil dan gambaran kondisi sosial ekonomi yang diukur yaitu nilai dan status kepemilikan lahan serta perubahan kepemilikan lahan. Selain itu, metode ini juga untuk mengetahui manfaat yang diperoleh untuk memberikan gambaran terkait pengaruh dan manfaat dari kegiatan penanganan permukiman kumuh, maka untuk menggunakan instrumen wawancara kepada informan terpercaya yang berasal dari masyarakat atau populasi. Sedangkan untuk metode kuantitatif digunakan untuk menemukan gambaran efektivitas kegiatan penanganan permukiman kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan kawasan dengan menggunakan instrumen angket terhadap pelayanan, manfaat dan pengaruh penanganan permukiman kumuh.

Berdasarkan uraian pendekatan penelitian tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan



gejala bersifat sebab akibat. Dengan demikian peneliti dapat menentukan variabel – variabel dari objek yang diteliti kemudian membuat parameter dan indikator untuk dijadikan ukuran pengaruh dan efektivitas.

## B. Lokasi Penelitian

Kota Makassar berdasarkan SK.Walikota No. 050.05/1341/Kep/IX/2014, tentang Profil Kawasan Kumuh Kota Makassar memiliki 103 kawasan permukiman kumuh yang perlu penanganan, tersebar di 143 Kelurahan pada 14 Kecamatan. Mengingat luasnya cakupan wilayah kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar maka studi ini hanya akan difokuskan pada Kawasan Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo, seluas 41,02 Ha berada di RW 04, prioritas kawasan yang tertangani yaitu RT A dan RT B, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 111 KK.

Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah mewakili kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar yang telah melaksanakan kegiatan penataan lingkungan permukiman dan secara umum juga mewakili tingkat keberhasilan dan kegagalan program penataan lingkungan permukiman pada kawasan, serta secara geografis mewakili beberapa kawasan yang ada di Kota Makassar yaitu berada pada Kawasan Bantaran Sungai, pada wilayah pesisir dan berada pada wilayah perkotaan/pusat kota. Berdasarkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan adalah kumuh berat, juga merupakan kawasan kumuh terluas kedua yang ada di Kota Makassar dengan jumlah rumah tangga terbanyak.

### C. Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini, diperlukan beberapa data selain digunakan sebagai informasi dan obyek penelitian juga dipergunakan sebagai bahan atau dasar dalam mengkaji dan menganalisis efektivitas penataan lingkungan permukiman melalui pengembangan infrastruktur fisik terhadap penurunan kawasan permukiman kumuh di lokasi penelitian. Data-data yang dibutuhkan antara lain program/kegiatan pengembangan infrastruktur melalui program/kegiatan penataan lingkungan permukiman, data pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di lokasi penelitian, data terkait hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman kumuh di lokasi penelitian. Selain itu perlu juga diperkuat dengan data penunjang lainnya yang terkait dengan penataan lingkungan permukiman melalui pengembangan infrastruktur fisik kawasan permukiman dan program/kegiatan penataan lingkungan permukiman berupa aturan dan kebijakan serta perundang-undangan, data profil kawasan, dokumen perencanaan dan literatur lainnya yang diperoleh melalui instansi terkait dan melalui media lainnya.

Berikut rincian data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 3.1. Data yang dibutuhkan dalam penelitian**

No	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data	Ket.
<b>I Data Primer</b>				
1	Jenis dan sebaran prasarana lingkungan permukiman	Primer/Informasi langsung	Lapangan, masyarakat	Observasi dan Dokumentasi
2	Tinjauan Hasil dan Identifikasi Permukiman Kumuh sebelum dan setelah Penanganan	Primer/Informasi langsung	Masyarakat, pengguna aktual, Organisasi	Survei, Observasi, Wawancara dan

	dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman			Kemasyarakatan, Pemerintahan (Kelurahan, Kecamatan Instansi Terkait)	Serta Kajian Dokumen Literatur
3	Akses dan Layanan Prasarana lingkungan Permukiman	Primer/informasi langsung		Masyarakat berdasarkan populasi sampel terpilih / responden	Kuesioner
4	Manfaat dan Hasil Peningkatan Kualitas Prasarana lingkungan Permukiman	Primer/informasi langsung		Masyarakat berdasarkan populasi sampel terpilih / responden	Kuesioner
5	Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat berdasarkan indikator Kesejahteraan, Pendapatan, Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja, Struktur dan Tataan Sosial, Sistem Sosial dan Mobilitas Sosial serta nilai dan status lahan	Primer/informasi langsung		Masyarakat berdasarkan populasi sampel terpilih / responden	Kuesioner
6	Sumber Daya dan Kelembagaan dalam mendukung kegiatan penanganan permukiman kumuh	Primer / Informasi Langsung		Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah.	Wawancara dan Dokumentasi
<b>II Data Sekunder</b>					
1	Profil Wilayah dan Data prasarana lingkungan Permukiman di Lokasi Studi	Sekunder/informasi langsung	tidak	BPS, PU dan Bappeda	Dokumen
2	Data kondisi sosial ekonomi	Sekunder/informasi langsung	tidak	BPS, Kelurahan, Kecamatan, Badan Pertanahan, Badan Pendapatan Daerah dan Bappeda	Dokumen
2	Program/Kebijakan Penanganan Permukiman kumuh	Sekunder/informasi langsung	tidak	PU, Dinas Perumahan dan Bappeda	Dokumen
3	- Kegiatan penataan prasarana lingkungan permukiman ( Tujuan	Sekunder/informasi langsung	tidak	PU, Dinas Perumahan dan Bappeda dan	Dokumen

	dan Sasaran) - Kegiatan penataan prasarana lingkungan permukiman (Konsep dan Model Penanganan)		Lembaga Kemasyarakatan	
4	Dokumen Perencanaan, Kebijakan Program dan Peraturan Perundang-undangan tentang Permukiman	Sekunder/informasi tidak langsung	PU, Dinas Perumahan dan Bappeda	Dokumen
5	Kajian Kepustakaan penangan permukiman perkotaan tingkat pengurangan kekumuhan kawasan	Literatur efektivitas kumuh terhadap pengurangan kawasan	Sekunder/informasi tidak langsung	buku-buku, website, makalah, karya ilmiah, studi penelitian

Sumber : hasil olahan,2017.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Kepustakaan.

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku dan teori-teori atau dokumen-dokumen perencanaan yang berhubungan dengan materi penelitian. Kajian buku, teori dan dokumen dimaksud mencakup tentang Efektivitas Kegiatan dan pengukuran efektivitas, permukiman perkotaan, permukiman kumuh, program dan kegiatan penanganan permukiman, kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh yang didasarkan atas kebijakan nasional sampai ke pada Kota Makassar, prasarana pendukung lingkungan permukiman sampai kepada penerapan konsep dan model penanganan permukiman kumuh baik secara nasional maupun pada tingkat kota

makassar, serta mengkaji sejauh mana perubahan, pengaruh dan manfaat yang diterima dan didapat setelah adanya peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dan melihat sejauh mana kegiatan penanganan permukiman kumuh terlaksana berdasarkan identifikasi tingkat kekumuhan dan sebelum adanya penanganan, apakah kegiatan tersebut membawa hasil dan manfaat yang baik serta sesuai dengan arahan tujuan dan sasaran yang diinginkan dicapai.

## 2. Lapangan.

Penulis langsung turun ke lapangan dengan cara :

### a) Observasi langsung.

Adalah peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dilokasi yang menjadi tempat penelitian atau yang menjadi obyek penelitian. Dengan melihat kondisi penataan prasarana lingkungan permukiman secara langsung yang terdokumentasikan melalui media potographis. Dalam metode observasi ini dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada Kelurahan Tallo di RW 04 RT. A dan RT. B, untuk mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan penanganan permukiman kumuh. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui perbandingan data sekunder yang sudah diperoleh dengan data eksisting di lapangan. Observasi dilakukan untuk mengenali pola guna lahan serta sebaran prasarana lingkungan permukiman, yaitu kondisi permukiman penduduk, jalan, drainase, persampahan, air limbah, air bersih, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau.

b) Wawancara.

Adalah peneliti mengadakan wawancara kepada informan. Yang terdiri atas unsur rumah tangga, masyarakat, lembaga keswadayaan masyarakat, aparat kelurahan, Kecamatan, dinas dan instansi terkait seperti dinas PU dan Bappeda, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan dan efektivitas penataan prasarana lingkungan permukiman kumuh di lokasi studi. Metode wawancara dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan dan program pengembangan yang telah terlaksana, agar mendapatkan informasi dan data dalam menunjang penelitian ini. Juga dalam wawancara ini akan dihimpun data dan informasi dari informan terkait perkembangan nilai lahan, status dan perkembangan kepemilikan lahan pada lokasi apakah sebelum dan setelah penanganan permukiman kumuh mengalami perubahan baik dari segi kepemilikan lahan dan bangunan dan pergesern kependudukan Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan penanganan permukiman kumuh pada Kelurahan Tallo, serta mendapatkan informasi terkait problem dan permasalahan yang akan memicu terkendalanya kegiatan penanganan dan peningkatan kualitas permukiman, tidak lupa pula dalam wawancara ini dihimpun pertanyaan pertanyaan yang mengarah pada sejauh mana keefektifan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman membuahkan hasil, bermanfaat, berpengaruh dan membawa perubahan pada keadaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

c) Kuesioner.

Adalah peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data terhadap responden dengan memberikan seperangkat pertanyaan dan mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang tersedia dengan harapan agar responden memberikan jawaban yang serius dan baik sesuai arahan dan tujuan pertanyaan penelitian. Hal ini ditujukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan dalam penelitian ini. Keterbatasan waktu yang peneliti miliki serta banyaknya populasi yang mencakup dalam wilayah penelitian, yaitu Rumah Tangga (KK) di Kelurahan Tallo Kota Makassar RW. 04, RT. A dan RT B, maka dilakukan pemilihan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dan dibahas pada huruf F. Tentang Populasi dan sampel.

Kuesioner yang dilakukan mencakup tentang gambaran sosial ekonomi masyarakat serta seberapa bermanfaat prasarana lingkungan permukiman terhadap masyarakat sebagai pengguna dan seberapa besar pengaruh dan efek yang dihasilkan kegiatan penanganan permukiman kumuh terkait peningkatan kualitas prasarana permukiman dalam mengurangi kekumuhan kawasan, seberapa besar kelembagaan berperan dalam kegiatan serta mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

## **E. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini teknik sampling yang dipergunakan adalah probability sampling dengan teknik random sampling. Pengambilan sampling

dengan menggunakan Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), sebagai berikut:

**Gambar. 3.1. Rumus Slovin (menentukan jumlah sampel)**

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

$n$  : jumlah sampel (Jumlah Rumah Tangga )

$N$  : jumlah populasi (Jumlah Total Rumah Tangga Wilayah RT A dan RT B)

$E$  : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Batas toleransi kesalahan yang dipergunakan dalam perhitungan sampel ini sebesar 10% atau 0,10. Untuk hasil perhitungan jumlah sampel yang dipakai pada kawasan tersebut adalah :

$$n = 111 / 1 + (958 \times 0,10^2)$$

$$n = 86,88845401 \text{ dibulatkan } n = 78$$

Kesimpulan jumlah sampel yang dibutuhkan pada kawasan studi ini yaitu sebanyak 78 rumah tangga.

## F. Teknik Analisa Data

**Langkah pertama** yang dilakukan sebelum melakukan analisa data secara keseluruhan yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner serta data yang telah dihimpun dari beberapa dokumen baik yang bersumber dari literatur bahan bacaan maupun dari instansi terkait sumber data lainnya, yaitu melakukan pengujian terhadap validitas keberadaan item



item setiap pertanyaan dalam kuesioner, apakah item item tersebut sudah valid atau sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pengujian validitas kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan Uji Validitas Konstruk dan Uji Validitas Isi, dimana Pengujian Validitas Konstruk, digunakan pendapat dari para ahli (judment experts). Untuk itu kuesioner yang telah dibuat berdasarkan teori tertentu, dikonsultasikan kepada ahlinya untuk mendapatkan tanggapan atas kuesioner yang telah kita buat, saran para ahli dapat tanpa perbaikan, dengan perbaikan atau dirombak total. Dan Pengujian validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi kuesioner dengan isi yang terdapat dalam konsep.

Adapaun langkah langkah pengujian validitas kuesioner dalam penelitian ini secara sedrhana diuraikan sebagai berikut:

- a) Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. Dalam hal penelitian ini operasional konsep yang akan diukur adalah sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas prasarana lingkungan permukiman. Dalam melakukan konstruk terhadap validitas kuesioner dengan berkonsultasi kepada ahli dalam hal penelitian ini terhadap dosen pembimbing.
- b) Mempersiapkan tabel dan tabulasi jawaban dari responden, sebagai pengujian validitas awal dalam menilai tingkat keakuratan kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian.

**Langkah kedua** adalah dilakukan analisis data Kualitatif terhadap perkembangan perubahan kondisi sosial ekonomi dengan menggunakan perangkat analisa SPSS versi 22 dari hasil kuesioner dan data sekunder yang

didapatkan terkait variabel Kondisi Penanganan Permukiman Kumuh melalui peningkatan kualitas atau perbaikan fisik lingkungan, berdasarkan hasil kuesioner yang dihimpun dalam penelitian ini dan selanjutnya diolah dalam metode analisa skoring dengan langkah – langkahnya yaitu : mengkode data dan tabulasi terhadap jawaban responden tentang kondisi sosial ekonomi, pemahaman kegiatan, manfaat kegiatan, kondisi dan kualitas prasarana (perbandingan tingkat kekumuhan), akses masyarakat terhadap pelayanan prasarana lingkungan permukiman, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan prasarana lingkungan permukiman, peran masyarakat dan kelembagaan dalam kegiatan. Menentukan kategori jawaban sangat paham / bermanfaat / baik / setuju / perlu / cukup / sesuai atau tidak sangat paham / bermanfaat / baik / setuju / perlu / cukup / sesuai, maka perlu adanya nilai atau skore pembobotan, dalam hal ini dipergunakan *skala likert*, untuk penilaiannya yaitu sebagai berikut :

- a. Sangat Setuju, diberi bobot nilai 5 (lima)
- b. Setuju, diberi bobot atau nilai 4 (empat).
- c. Kurang Setuju, diberi bobot atau nilai 3 (tiga).
- d. Tidak Setuju, diberi bobot atau nilai 2 (dua).
- e. Sangat tidak setuju, diberi bobot nilai 1 (satu)

**Langkah ketiga** Analisis Data Kuantitatif dilakukan untuk mendukung data kualitatif yang mencari pengaruh penataan lingkungan permukiman kumuh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keefektivan kegiatan penataan lingkungan permukiman dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan. Dalam penelitian ini digunakan metode analisa

kuantitatif dengan formulasi yang dibagi kedalam setiap item pertanyaan atau permasalahan penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

- **Analisa Pengaruh Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh**

Terdapat dua teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial, **Statistika deskriptif** yaitu ilmu pengetahuan statistika berupa menyajikan dan menyusun data yang diperoleh dari penelitian. Statistika deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menyerderhanakan data agar mudah dipahami. Bentuk penyajian data dapat berbentuk tabel frekuensi maupun grafik. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah dengan Software Statistical Package for Social Science (SPSS). Tingkat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dan nominal. Dengan menggunakan skala ini, objek penelitian dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan yang berjenjang.

**Statistik inferensial** adalah ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang diperoleh dari suatu bagian populasi tersebut. Untuk itu, pengamatan yang dilakukan terhadap sampel digunakan untuk menarik kesimpulan pada tingkat populasi. Statistika inferensial juga menjelaskan hubungan antar variabel didalam penelitian, mencakup kekuatan dan juga arah hubungannya. Sebelum dilakukan uji korelasi dan regresi data penelitian harus memenuhi syarat yaitu berdistribusi normal. Untuk mengetahui kriteria tersebut maka dilakukan pengujian persyaratan analisis menggunakan Uji Normalitas Error, dengan menggunakan analisa sebagai berikut : Distribusi Histogram, Normal PP

Plot of Regression Standardized Residual, dan Pengujian hipotesis standar residual melalui uji Kolmogorov-sminorv atau Shapiro Wilks.

- **Analisa Efektivitas Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh**

Analisis yang dipergunakan dalam menilai efektivitas penanganan permukiman kumuh melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukimanm berdasarkan ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui Metode Deskriptif terhadap keberadaan variable pencapaian tujuan penanganan permukiman kumuh yaitu Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Pelayanan Prasarana Lingkungan Permukiman, menurunnya Luasan Kumuh Karena Akses dan Layanan Prasarana Lingkungan Permukiman yang lebih baik, Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan untuk mendukung kegiatan penanganan permukiman kumuh, Penerima manfaat puas dengan kualitas dan layanan Prasarana Lingkungan Permukiman, melalui instrumen pencapaian tujuan peningkatan kualitas prasarana lingkungan permukiman yaitu adanya pengaruh, perubahan dan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan. berdasarkan persepsi masyarakat melalui hasil kuesioner yang telah didapatkan dalam pengolahan data kuesioner yang telah diperoleh sebelumnya.

Pengukuran yang dipakai dalam penilaian efektivitas penanganan adalah dengan mempergunakan analisa Hipotesis untuk menjawab pertanyaan permasalahan yaitu bagaimana efektivitas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tallo Kota Makassar dalam memberikan pengaruh, perubahan, Hasil dan manfaat menggunakan perhitungan statistik deskriptif dengan menghitung mean dan standar deviasi untuk

melihat nilai kecenderungan dari pendapat masyarakat. Menurut Dantes (2008) dalam jurnal ilmiah Ni Wayan Budiani (2009) menggunakan kriteria ideal teoritik dan dimodifikasi sebagai berikut:

Untuk mengukur efektivitas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tallo Kota Makassar melalui pencapaian tujuan dengan rumus dan langkah langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung distribusi frekuensi dengan bantuan tabel
- 2) Menentukan rata – rata

$$\bar{X} = \frac{\sum fx}{N}$$

..... **Gambar 3.2. Rumus Penentuan Rata Rata**

- 3) Menghitung Standar Deviasi dengan rumus:

$$SD^2 = \frac{\sum (xi-x)^2}{N-1}$$

..... **Gambar 3.3. Rumus Standar Deviasi**

- 4) Menginterpretasikan dan mendeskripsikan hasil analisa keusioner dengan kriteria ideal teoritik, efektivitas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tallo Kota Makassar.

Menurut Sugiyono (2014) dalam perhitungan efektivitas digunakan skor (skala Likert) yang telah dihasilkan dalam pengumpulan data sebelumnya, apabila skor semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil skor hasilnya menunjukkan pengelolaan semakin tidak efektif.

0,00 - 0,199 = sangat tidak efektif

0,20 - 0,399 = tidak efektif

0,40 - 0,599 = Kurang efektif

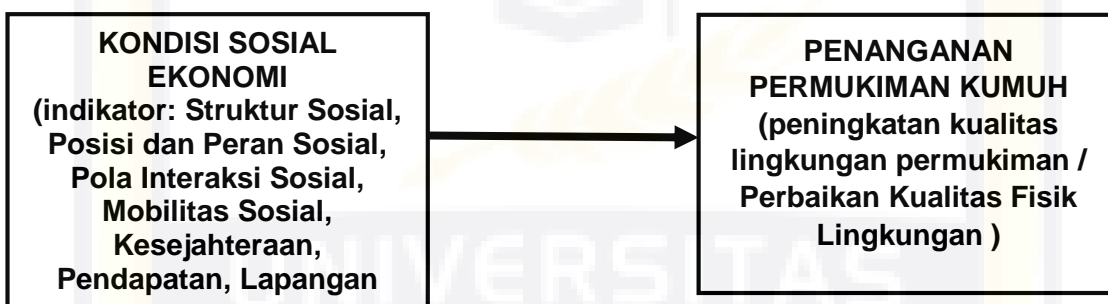
0,60 - 0,799 = efektif

0,80 - 1,000 = sangat efektif

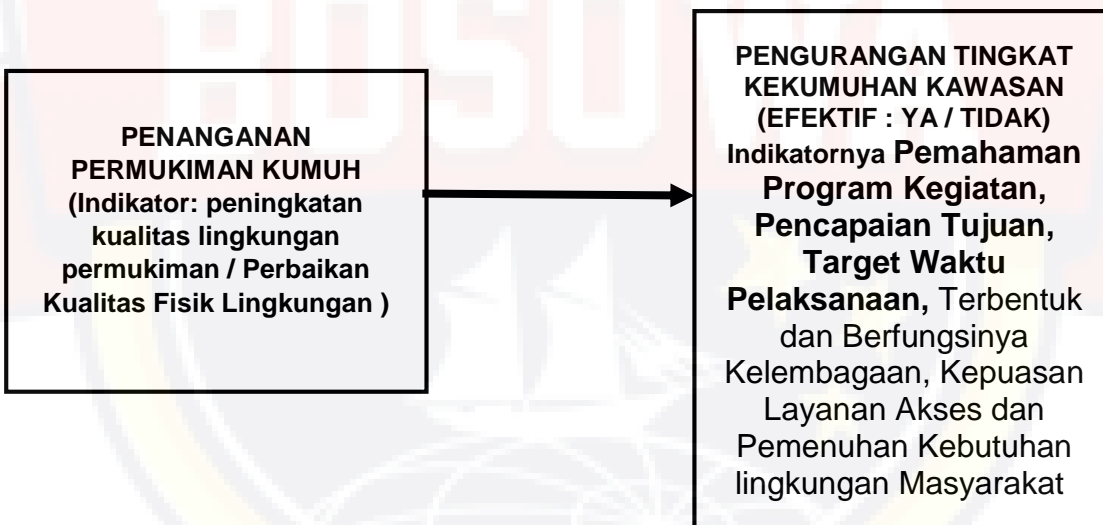
### G. Variabel Penelitian.

Secara umum dapat disimpulkan variabel dalam penelitian ini berdasarkan indikator yang telah diuraikan tersebut diatas dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar.3.4. Variabel Penelitian Rumusan Permasalahan Pertama**



**Gambar.3.5. Variabel Penelitian Rumusan Permasalahan Kedua**



Dari gambar diatas dikemukakan bahwa Penanganan Permukiman Kumuh melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Variabel Independen) akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (Variabel Dependen) serta memberikan Efek positif dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan (Variabel Dependen).

Secara umum bahasan variabel diatas akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

**a. Untuk menjawab rumusan permasalahan pertama yaitu :**

1. Variabel Terikat (Y), Kondisi Sosial Ekonomi.

Variabel terikat atau variabel dependen pertama yaitu kondisi sosial ekonomi lingkungan masyarakat yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent adapun indikator dalam variabel dependen ini yaitu antara lain terkait kesejahteraan, pendapatan, lapangan usaha dan pekerjaan, struktur dan tatanan sosial, peran dan posisi sosial masyarakat, peran interaksi sosial masyarakat, serta mobilitas sosial dan pergeseran struktur masyarakat.

2. Variabel Bebas (X), Penanganan Permukiman Kumuh.

Variabel yang akan dibahas disini adalah variabel bebas atau *independent* menyangkut dimensi Penanganan Permukiman Kumuh, dimana kegiatan penanganan permukiman kumuh adalah rangkaian keseluruhan kegiatan yang dikerjakan secara baik melalui proses perencanaan sampai kepada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kegiatan disini dimaksudkan adalah melalui pemugaran / perbaikan prasarana lingkungan permukiman dengan mengintervensi prasarana kearah lebih baik, untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman, terhadap meningkatkan akses terhadap layanan prasarana lingkungan permukiman. Serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk penilaian efektivitas penanganan permukiman kumuh yang menjadi tolak ukur apakah keberhasilan penanganan permukiman

kumuh tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui intervensi kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas prasarana lingkungan permukiman.

### 3. Hubungan Variabel

Dalam hal ini hubungan variabel dimaksud adalah sebuah tarikan garis, dan apabila ada garis penghubung diantaranya maka ada keterkaitan didalamnya yang secara langsung dapat disimpulkan. Dalam uraian variabel penelitian ini dimana variabel independent mempunyai keterhubungan secara langsung kepada variabel dependent, hal ini diperkuat keterhubungannya dengan adanya pengaruh positif dan kuat terhadap variabel terikatnya. Dimana variabel Y berpengaruh positif dan kuat terhadap pencapaian variabel X.

#### **b. Untuk menjawab rumusan permasalahan kedua:**

##### 1. Variabel Terikat (Y), Penanganan Permukiman Kumuh.

Variabel yang akan dibahas disini adalah variabel terikat atau *dependent* menyangkut dimensi Penanganan Permukiman Kumuh, dimana kegiatan penanganan permukiman kumuh adalah rangkaian keseluruhan kegiatan yang dikerjakan secara baik melalui proses perencanaan sampai kepada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kegiatan disini dimaksudkan adalah melalui pemugaran / perbaikan prasarana lingkungan permukiman dengan mengintervensi prasarana kearah lebih baik, untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman, terhadap meningkatkan akses terhadap layanan prasarana lingkungan permukiman. Serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi lingkungan masyarakat.



Sedangkan untuk penilaian efektivitas penanganan permukiman kumuh yang menjadi tolak ukur apakah keberhasilan penanganan permukiman kumuh tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui intervensi kegiatan perbaikan

## 2. Variabel Bebas ( X), Pengurangan Tingkat Kekumuhan melalui peningkatan Kualitas Fisik Lingkungan

Variabel bebas berikutnya adalah pengurangan tingkat kekumuhan yang dipengaruhi oleh variabel terikat dependen dalam pengujiannya. Indikator variabel ini adalah melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui kegiatan pemugaran dan perbaikan prasarana lingkungan permukiman dengan mengukur pencapaian tujuan kegiatan berdasarkan penilaian persepsi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh yaitu : ada pengaruh, yang dirasakan dalam penanganan permukiman kumuh, baik secara individu, kelompok dan organisasi, ada perubahan, yang dihasilkan dalam penanganan permukiman kumuh, baik secara kualitas dan kuantitas, membawa hasil, bagi masyarakat dan lingkungan melalui perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta kelembagaan yang ada. memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan kelembagaan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan, agar dapat berkelanjutan.

## 3. Hubungan Variabel

Dalam hal ini hubungan variabel dimaksud adalah sebuah tarikan garis, dan apabila ada garis penghubung diantaranya maka ada

keterkaitan didalamnya yang secara langsung dapat disimpulkan. Dalam uraian variabel penelitian ini dimana variabel independent mempunyai keterhubungan secara langsung kepada variabel dependent, hal ini diperkuat keterhubungannya dengan adanya pengaruh positif dan kuat terhadap variabel terikatnya. Dimana variabel Y berpengaruh positif dan kuat terhadap pencapaian variabel X.

#### **H. Defenisi Operasional Penelitian**

Dalam bahasan ini diuraikan mengenai tentang defenisi operasional terkait variabel yang diukur dalam penelitian Pengaruh Sosial Ekonomi dan Efektivitas Penanganan Permukiman Di Kelurahan Tallo Kota Makassar.

Untuk variabel penanganan permukiman defenisi operasional mengacu pada konsep dan model penanganan permukiman yang ada dalam UU No. 1 Tahun 2011, yaitu disebutkan dalam Bab VIII pasal 94 sampai pasal 97 bahwa ada 2 (dua) Konsep terkait penanganan yaitu Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman, dengan implementaasi kegiatan yang mengarah pada tujuan yang menjadi indikator pengukuran dalama penelitian ini yaitu pemugaran dan peremajaan prasarana lingkungan dan bangunan permukimandalam mengurangi tingkt kekumuhan kawasan permukiman di lokasi penelitian.

Untuk variabel Kondisi Sosial Ekonomi Kondisi cenderung merujuk pada kedaan ekonomi dan sosial seseorang dalam kaitannya dengan jabatan (kekuasaan), dan peranan yang dimiliki orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status atau kondisi cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain berdasarkan

suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan, prestise atau kekuasaan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kondisi adalah keadaan atau kedudukan seseorang. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan, kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi. Hal ini ditentukan oleh banyak hal yang mempengaruhi seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani dalam Maftukhah bahwa: Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi.

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani dalam Maftukhah bahwa: Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

Posisi seseorang dalam tatanan masyarakat akan selalu berbeda-beda. Kadang-kadang seseorang akan menempati kedudukan yang lebih tinggi dan yang lainnya menempati kedudukan yang rendah. Perbedaan yang mencolok inilah yang akan menimbulkan adanya stratifikasi dalam masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI,1996:958). Sedangkan

dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu "oikos" yang berarti keluarga atau rumah tangga dan "nomos" yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material.

Kebutuhan pokok dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia. Abraham Maslow dalam Batara Surya, mengungkapkan kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai dan kebutuhan mengaktualisasikan diri. Menurut Melly G Tan dalam <http://digilib.unila.ac.id/873/9/BAB%20II.pdf> bahwa kedudukan sosial ekonomi mencakup 3(tiga) faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Pendapat diatas didukung oleh MaMahbud UI Hag dari Bank Dunia bersama dengan James Grant dari Overseas Development Council mengatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi di titik beratkan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan air yang sehat yang didukung oleh pekerjaan yang layak (Melly dalam <http://digilib.unila.ac.id/873/9/BAB%20II.pdf>). Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupi kebutuhan

hidupnya. Melly G. Tan dalam <http://digilib.unila.ac.id/873/9/BAB%20II.pdf> mengatakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga atau masyarakat itu dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan.

Berikutnya adalah permukiman kumuh definisi operasional yang dipakai adalah berangkat dari rangkuman dari teori yang sudah ada yaitu mulai dari konsep housing atau permukiman JC Turner, EE Bergel, Carter Adam hingga definisi yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman. Dimana peneliti menyimpulkan bahwa definisi Permukiman Kumuh yang nantinya dipakai dalam penelitian ini adalah merupakan Kawasan hunian tempat bermukim yang secara fisik, sosial dan ekonomi tidak tertata dengan baik, tidak layak huni dan tidak memiliki prasarana lingkungan yang memadai atau berkualitas rendah, prasarana tanpa pengelolaan yang baik, serta akses masyarakat terhadap prasarana sangat minim atau terbatas, Rendahnya kualitas prasarana lingkungan permukiman yang memengaruhi tempat bermukim atau hunian. Adapun indikator prasarana lingkungan diambil dari rangkuman beberapa pandangan tentang prasarana permukiman yaitu : Kondisi Bangunan, Jalan Lingkungan, Sistem Air Bersih, Sistem Persampahan, Sistem Air Limbah, Sistem Drainase, Proteksi Kebakaran dan Ruang Terbuka Hijau.

Untuk efektivitas yang dimaksudkan disini adalah diambil dari 2 (dua) pengertian menurut ahli yang digabungkan sesuai dengan kebutuhan dan akan diuji dalam penelitian ini yaitu pengertian efektivitas menurut Emerson dalam Handayani (1996:16) bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Jadi

apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. dan menurut The Liang Gie (2002:16) yang diungkapkan dalam ensklopedia administrasi, yaitu efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki.

Berangkat dari tinjauan teori inilah kemudian peneliti menyimpulkan pengertian efektivitas yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, sebagai dasar tesis untuk mengkajinya lebih lanjut yaitu sebagai berikut “Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana kegiatan tersebut tercapai dan sesuai dengan yang diinginkan serta memberikan efek, hasil dan manfaat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar**

##### **1. Kebijakan dan Strategi Penanganan Permukiman Kota Makassar**

Langkah-langkah untuk pencapaian yang lebih nyata dalam mengakomodasikan kebijakan dan strategi yang terkait dengan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, yang antara lain meliputi, RPJPD, RPJMD, RPIJM dan Kebijakan Sektorial Bidang Perumahan dan Permukiman serta dokumen legal sejenis yang ada untuk dijadikan acuan bagi penyusunan program operasional dibidang permukiman dan infrastruktur perkotaan secara terpadu.

##### **a. RPJPD Kota Makassar**

Arahan kebijakan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Makassar, sebagai berikut :

##### **i. Arah Pembangunan Kota Makassar**

Arah Pembangunan Kota Makassar 2025 di bagi kedalam dua bagian besar, yakni arah pembangunan umum yang sifatnya menyeluruh dan memayungi arah pembangunan sektoral atau arah pembangunan yang bersifat segmentasi, serta arah pembangunan sektoral itu sendiri dengan bagian-bagian yang dianggap penting bagi perkembangan masa depan Kota Makassar.

##### **ii. Umum**

Secara umum pembangunan Kota Makassar diarahkan pada peningkatan kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat dan

pelayanan publik yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur pembangunan, lingkungan fisik, sosial, politik dan ekonomi yang kondusif bagi Makassar yang bermartabat dan manusiawi.

### **iii. Pembangunan Sumberdaya Manusia**

- Pembangunan pendidikan Kota Makassar diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan keterampilan dan wawasan bagi warga Kota Makassar yang memungkinkan terciptanya masyarakat kota yang terdidik, berbudaya, produktif, bermartabat dan manusiawi.
- Pembangunan kesehatan Kota Makassar diarahkan pada tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, lingkungan fisik dan social yang sehat, peningkatan gizi keluarga dan pengurangan jenis serta jumlah penderita penyakit menular yang dapat mewujudkan peningkatan usia harapan hidup, penurunan jumlah kematian bayi dan penurunan jumlah penderita penyakit menular.
- Pembangunan kualitas manusia Kota Makassar juga diarahkan pada meningkatnya kemampuan keterampilan pemuda, perempuan dan usia produktif yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lokal, regional, nasional dan mancanegara serta dapat mewujudkan kemandirian usaha masyarakat.
- Pembangunan kualitas manusia Kota Makassar juga diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan sosial dasar warga kota berupa pelayanan air bersih, energi, kebersihan dan keindahan lingkungan



yang dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan.

#### **iv. Pembangunan Ekonomi**

- Pembangunan ekonomi Kota Makassar diarahkan pada meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan jenis dan kualitas produk unggulan daerah, perluasan akses pasar, penguasaan teknologi produksi dengan dukungan yang kuat oleh lembaga-lembaga keuangan.
- Pembangunan ekonomi Kota Makassar diarahkan pada peningkatan volume dan diversifikasi usaha melalui penyiapan sarana dan prasarana pendukung usaha, penyederhanaan birokrasi, regulasi usaha, dukungan tenaga kerja serta kenyamanan dan keamanan berusaha yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.
- Pembangunan ekonomi Kota Makassar diarahkan pada berkembangnya keuangan daerah melalui diversifikasi pendapatan daerah, intensifikasi PAD, Pemberdayaan Perusahaan Daerah, perluasan akses pembiayaan non PAD serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **v. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang**

##### **▪ Pengembangan Antar Kawasan**

Pengembangan Kota Makassar diarahkan pada pertumbuhan kawasan kota yang seimbang dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, tata ruang kota dan kelestarian

lingkungan yang dapat menjamin kenyamanan lingkungan dan kesinambungan pembangunan. Selain itu, pengembangan Makassar juga diarahkan secara terintegrasi dengan daerah sekitarnya.

▪ **Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kepulauan**

Pembangunan Kota Makassar diarahkan pada berkembangnya wilayah pesisir dan kepulauan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat nelayan, berkembangnya kultur bahari, terpeliharanya potensi kelautan serta pengembangan kerjasama pemanfaatan potensi pesisir dan kepulauan.

▪ **Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan Kota Makassar diarahkan pada ketersediaan perumahan dan permukiman, sarana transportasi, air bersih, listrik, sarana rekreasi dan wisata, sarana kebersihan dan keindahan kota yang sejalan dengan perkembangan penduduk, tata ruang kota, kemajuan ekonomi yang mendukung, perwujudan Makassar yang berwawasan lingkungan dan bersahabat.

▪ **Pembangunan Lingkungan**

Pembangunan Kota Makassar diarahkan pada penciptaan lingkungan yang bersih, indah, lestari dan sehat yang mendukung terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan kedamaian bagi warga kota.

## b. RPJMD Kota Makassar

### i. Visi

Visi RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019 "**Makassar**

**Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua"**

### ii. Misi

- Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
- Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman bersandar dunia
- Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi

Arahan kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Makassar, sebagai berikut :

### c. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan terkait penanganan kawasan permukiman kumuh antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas moda transportasi publik
- Pemenuhan sistem drainase berbasis jaringan dalam penanganan banjir
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman
- Pemenuhan pelayanan sistem jaringan utilitas kota berbasis box culvert
- Penataan komprehensif pinggiran kanal secara partisipatif
- Peningkatan luas dan sebaran ruang terbuka hijau
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan serta modernisasi penanganan sampah

- Pengendalian pencemaran dan konsistensi pelaksanaan Amdal
- Pembangunan perumahan korban bencana, pengembangan rumah layak huni
- Pengembangan sistem dan jaringan perpipaan terpadu dan pelayanan air bersih

#### **d. Strategi Pembangunan**

Strategi pembangunan terkait penanganan kawasan permukiman kumuh antara lain sebagai berikut :

- Pengembangan moda transportasi publik
- Pengembangan sistem drainase berbasis jaringan terpadu
- Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan kawasan permukiman
- Pengembangan unit terintegrasi jaringan utilitas kota
- Penanaman budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah
- Perluasan jangkauan pelayanan air bersih

#### **e. Program Pembangunan**

Program pembangunan terkait penanganan kawasan permukiman kumuh sebagai berikut :

- Program pengembangan kewirausahaan
- Pengembangan ekonomi kreatif
- Pembangunan saluran drainase
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman
- Pengendalian banjir kawasan permukiman
- Pengelolaan ruang terbuka hijau
- Peningkatan pengelolaan persampahan

- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Pengembangan perumahan

## **2. Profil Wilayah Kota Makassar**

### **a. Keadaan Topografi**

Keadaan topografi wilayah Kota Makassar berdasarkan sumber data yang diperoleh berada pada ketinggian 0 sampai 15 M dari permukaan air laut, dan berada pada kisaran lereng 2-18%. Selanjutnya berdasarkan kondisi tersebut, keadaan iklim Kota Makassar termasuk kategori iklim tropis, temperatur rata-rata harian berkisar antara 24,5°C - 31,8°C.

### **b. Keadaan Geologi**

Keadaan geologi Kota Makassar berdasarkan data yang diperoleh terdiri atas; relief kasar yang merupakan morfologi daratan, sungai, dan pantai. Morfologi yang menonjol di Kota Makassar adalah kerucut gunung api Lompobattang, gunung Batu Rape dan gunung Cindako. Morfologi tersebut tersusun oleh batuan gunung api berumur pliosen atau kurang lebih 5 juta tahun lalu (gunung Baturape/Cindako), dan berumur plistosen atau kurang lebih 1,8 juta tahun (formasi Lompobattang).

### **c. Hidrologi**

Keadaan hidrologi Kota Makassar, berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan ditemukan daerah-daerah kawasan kota yang mengalami genangan periodik. Sumber air permukaan berasal dari sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Pada kondisi tertentu terutama pada saat musim hujan sungai tersebut mempengaruhi sebahagian

wilayah Kota Makassar. Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo diidentifikasi merupakan ancaman banjir perkotaan.

#### **d. Jenis Tanah**

Jenis tanah yang terdapat di Kota Makassar antara lain jenis tanah Aluvial, penyebarannya disepanjang pantai, membujur dari Kecamatan Tamalate, Mariso, Ujung Pandang, Wajo, Ujung Tanah, Tallo dan Biringkanaya dengan tingkat kedalaman efektif tanah antara 20-40 cm memiliki tekstur tanah sedang sampai halus, secara umum lokasi di daerah pinggiran Kota Makassar saat ini dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

#### **e. Tata Guna Lahan**

Kondisi tata guna lahan Kota Makassar secara umum terdiri atas; permukiman dan bangunan lainnya (perkantoran, Perumahan dan Permukiman, pendidikan, jasa, fasilitas sosial), sawah tadah hujan, dan lahan yang tidak diusahakan atau lahan kosong. Pergeseran pemanfaatan lahan kawasan Kota Makassar secara umum telah mengalami perubahan yang cukup drastis, akibat terjadinya peningkatan pembangunan aktivitas sosial ekonomi.

#### **f. Demografi dan Kependudukan**

Hingga akhir tahun 2016 jumlah penduduk di Kota Makassar menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan Kota Makassar saat ini dihuni penduduk kurang lebih 1.408.072 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu

disiapkan dimasa yang akan datang. Secara umum kondisi demografi dan kependudukan Kota Makassar dijelaskan pada kajian berikut.

#### **i. Pertumbuhan, Kepadatan dan Penyebaran Penduduk**

Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata laju tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar selama dua tahun terakhir dirinci berdasarkan kecamatan mengalami kenaikan sebesar 1,12% per tahun. Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di Kota Makassar berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bahagian yaitu; kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Makassar dengan kepadatan penduduk sebesar 33.155 jiwa/km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tamalanrea dengan jumlah sebesar 3.393 jiwa/km<sup>2</sup>. Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Data yang diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di Kota Makassar secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan kota.

**Tabel 4.1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kota Makassar**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
1	Mariso	57.790	1,82	31.753
2	Mamajang	60.236	2,25	26.772
3	Tamalate	183.039	20,21	9.057
4	Rappocini	158.325	9,23	17.153
5	Makassar	83.550	2,52	33.155
6	Ujung Pandang	27.802	2,63	10.571
7	Wajo	30.258	1,99	15.205
8	Bontoala	55.578	2,10	26.466
9	Ujung Tanah	48.133	5,94	8.103
10	Tallo	137.260	5,83	23.544
11	Panakukang	145.132	17,05	8.512
12	Manggala	127.915	24,14	5.299
13	Biringkanaya	185.030	48,22	3.837

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
14	Tamalanrea	108.024	31,84	3.393
<b>Jumlah</b>		<b>1.408.072</b>	<b>175,77</b>	<b>8.011</b>

**Sumber : Kota Makassar Dalam Angka, 2014**

## ii. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Makassar berdasarkan hasil catatan registrasi yang diperoleh didominasi oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 154.744 jiwa dan penduduk terkecil berusia antara 60-64 dengan jumlah penduduk sebanyak 29.331 jiwa.

## iii. Struktur Penduduk Menurut Usia Sekolah

Berdasarkan klasifikasinya, struktur penduduk menurut usia sekolah di Kota Makassar didasarkan pada jenis dan tingkatan pendidikan. Hasil pendataan yang diperoleh menunjukkan jumlah usia sekolah di Kota Makassar didominasi oleh kelompok sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP), dengan jumlah masing-masing sebesar 150.255 murid SD dan 62.758 siswa SMP.

## iv. Struktur Penduduk Menurut Usia Kerja

### ▪ Usia Produktif

Berdasarkan ketetapan pemerintah, kelompok usia kerja berada pada kelompok usia antara usia 15 - 64 tahun untuk kategori usia produktif. Hasil catatan pada Biro Pusat Statistik menunjukkan jumlah usia yang tergolong usia produktif di Kota Makassar sebesar 1.239.006 jiwa dari total jumlah penduduk yang ada saat ini.



#### ▪ Usia Tidak Produktif

Kategori penduduk tidak Produktif terdiri dari penduduk usia anak-anak atau usia sekolah (usia 0-14 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun keatas). Berdasarkan hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik diperoleh gambaran jumlah penduduk usia anak-anak sebanyak kurang lebih 409.216 jiwa sedangkan usia lanjut sebesar 48.116 jiwa. Dengan demikian penduduk usia tidak produktif di Kota Makassar pada tahun 2013 kurang lebih 457.332 jiwa atau 32,48% dari total penduduk Kota Makassar.

#### v. Penduduk Menurut Rasio dan Jenis Kelamin

Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang ada di 14 wilayah kecamatan di Kota Makassar turut mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat secara umum. Jika pertumbuhan jumlah penduduk dalam keadaan konstan akan mengakibatkan berlakunya hukum ekonomi (*supply and demand*) terutama yang tergolong dalam usia kerja. Rasio jenis kelamin di Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel berikut.

#### vi. Struktur Penduduk Berdasarkan Agama

Sikap dan perilaku manusia dalam melaksanakan kehidupannya pada dasarnya dilandasi dengan keyakinan dan agama yang dianut dan menjadi pedoman yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Struktur penduduk menurut pemeluk agama di Kota Makassar didominasi oleh penduduk yang menganut agama islam.

### **vii. Adat Istiadat dan Kebiasaan Penduduk**

Adat istiadat merupakan karakteristik masyarakat suatu daerah yang dijunjung tinggi secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu aspek yang turut menentukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan. Kebiasaan yang masih mengakar sampai saat ini di Kota Makassar antara lain :

- Kultur individualisme cukup tinggi dengan kategori masyarakat heterogen.
- Upacara adat, antara lain; perkawinan, khitanan, kematian, syukuran kelahiran bayi dan pesta adat lainnya.

### **viii. Karakteristik Ekonomi Kota Makassar**

#### **▪ Perkembangan Sektor-Sektor Kegiatan Ekonomi**

Pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk terciptanya sistem kegiatan pembangunan baru, khususnya perdagangan sebagai media sirkulasi aliran barang dan jasa sesuai fungsi dan visi pengelolaan pembangunan Kota Makassar, dengan memperluas sistem jaringan aliran barang dan jasa. Sistem perkotaan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem komunikasi dan transportasi dan mengatur tata niaga untuk menjaga persaingan tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan mengingat fungsi dan kedudukan Kota Makassar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pola penyebaran sarana ekonomi kota dimasa yang akan datang dilakukan melalui

relokasi/pemindahan ke lokasi yang lebih strategis serta ditunjang penyediaan sarana dan prasarana pelengkap dengan membenahi sistem pengelolaan kawasan yang telah berkembang saat ini. Fasilitas perdagangan utama Kota Makassar yang telah berfungsi saat ini antara lain; pasar sentral Kota Makassar dan pusat-pusat perbelanjaan di kawasan perkotaan dan yang berlokasi di pusat. Dengan demikian untuk masa yang akan datang masih memerlukan peningkatan dan pembangunan pusat-pusat aktivitas baru terutama di daerah pinggiran kota untuk mendukung fungsi Kota Makassar sebagai pusat pengembangan wilayah utama di Sulawesi Selatan.

#### ▪ **Pertumbuhan Ekonomi**

Kegiatan ekonomi di Kota Makassar telah memperlihatkan angka pertumbuhan yang cukup menggembirakan, indikator tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya incam pendapatan per kapita masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut berimplikasi pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di dominasi oleh perkembangan sektor pertanian, industri, listrik gas dan air bersih, angkutan dan komunikasi serta bank dan lembaga keuangan.

### **ix. Fasilitas Sosial Ekonomi**

#### ▪ **Fasilitas Sosial**

Fasilitas sosial diartikan sebagai wadah aktivitas yang melayani kebutuhan penduduk bersifat memberi kepuasan sosial,

mental, dan spiritual dalam bentuk: peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi.

▪ **Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas Pendidikan yang terdapat di Kota Makassar untuk kegiatan proses belajar dan mengajar terdiri atas; TK, SD, SLTP, SLTA dan PT.

▪ **Fasilitas Peribadatan**

Penduduk di Kota Makassar umumnya beragama islam. Jumlah fasilitas peribadatan yang ada saat ini sebanyak 923 buah mesjid, tersebar di masing-masing kecamatan.

▪ **Fasilitas Kesehatan**

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan. Jenis fasilitas kesehatan di Kota Makassar terdiri atas; rumah sakit umum, puskesmas, puskesmas pembantu, apotek dan toko obat.

**x. Fasilitas Ekonomi**

Fasilitas ekonomi diartikan wadah untuk melakukan aktifitas ekonomi dalam bentuk fasilitas industri, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya sedangkan fasilitas sosial yang dimaksud adalah fasilitas perumahan dan permukiman.

▪ **Fasilitas Industri**

Jenis industri di Kota Makassar yang dikembangkan masyarakat saat ini menurut klasifikasinya terdiri atas, jenis industri rumah tangga dan aneka industri. Jumlah dan jenis industri yang diusahakan masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut.

#### ▪ Fasilitas Perdagangan

Fasilitas perdagangan yang terdapat di Kota Makassar antara lain; pasar umum, mall, koperasi, pertokoan dan perbankan. Keberadaan fasilitas tersebut, digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus berfungsi untuk perputaran roda ekonomi. Jumlah dan jenis fasilitas perdagangan di Kota Makassar tidak diperoleh data mengenai banyaknya fasilitas perdagangan yang ada saat ini.

#### ▪ Fasilitas Perumahan dan Permukiman

Klasifikasi perumahan di Kota Makassar pada dasarnya dilihat dari segi: luas kavling, tipe perumahan, kondisi perumahan, dan pola pembentukan permukiman. Kondisi perumahan di Kota Makassar dibedakan atas tiga jenis, antara lain; rumah permanen, semi permanen, dan darurat/temporer. Hasil survey dilapangan secara umum kondisi bangunan/rumah yang ada mayoritas termasuk dalam klasifikasi permanen, semi permanen dan sebagian kecil temporer.

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat/perorangan, masih bersifat alami. Pola perumahan yang terbentuk cenderung mengelompok (*concentrik*) pada suatu kawasan, dan berkembang secara linear mengikuti jaringan jalan dan garis pantai. Usaha Perumahan dan Permukiman yang dilakukan masyarakat, termasuk yang dibangun oleh pengembang di Kota Makassar terdiri atas usaha Perumahan dan Permukiman kecil, menengah dan besar.

## **xi. Sarana dan Prasarana**

### **▪ Prasarana Jalan**

Sistem transportasi sangat penting untuk mendukung angkutan barang dan penumpang. Sistem transportasi yang digunakan masyarakat saat ini dalam pengangkutan sangat ditentukan dengan ketersediaan prasarana jalan terutama dukungan prasarana ke kawasan perkotaan. Berdasarkan kondisi prasarana jalan yang dimanfaatkan masyarakat terdiri atas, jalan aspal, pengerasan dan jalan tanah.

### **▪ Jaringan Telepon**

Jaringan telepon di Kota Makassar, sebahagian besar menggunakan sistem sambungan STO disamping itu tersedia fasilitas telepon berupa telepon seluler. Distribusi sistem sambungan terpasang ke unit sambungan antara lain; perumahan, pemerintahan dan fasilitas sosial ekonomi.

### **▪ Jaringan Listrik**

Jaringan listrik di Kota Makassar yang telah terpasang saat ini mengikuti jalur jalan, dengan menggunakan travo pembatas. Distribusi jaringan listrik di Kota Makassar termasuk dalam kategori jaringan tegangan tinggi, menengah dan jaringan tegangan rendah. Pelayanan distribusi jaringan listrik antara lain sambungan ke unit perumahan penduduk, fasilitas sosial, perdagangan dan pemerintahan.

#### ▪ Air Minum

Sarana air minum yang dimanfaatkan masyarakat kawasan pesisir untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada umumnya bersumber dari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumur dangkal/sumur dalam). Potensi air bersih yang bersumber dari PDAM, secara umum masih dominan dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan. Tidak diperoleh data mengenai syarat higienis air bersih/minum yang dikonsumsi masyarakat.

#### ▪ Drainase

Kondisi permukaan lahan di Kota Makassar relatif datar hingga bergelombang, serta dilalui oleh sungai Tallo dan sungai Jenneberang yang berfungsi sebagai jaringan drainase primer. Kondisi jaringan drainase yang ada saat ini sepenuhnya belum berfungsi optimal dan hanya terdapat pada jalur jalan utama kota. Di beberapa kawasan jaringan drainase yang ada masih alami terutama di daerah pinggiran kota. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada luapan air permukaan yang belum tersalurkan dengan baik, mengingat tidak semua jalur jalan yang ada memiliki saluran drainase. Genangan air hujan tidak dapat dihindari pada tempat dan kawasan tertentu. Terjadinya luapan air sungai pada musim hujan mengakibatkan genangan air sehingga pengadaan jaringan drainase sangat penting peranannya untuk mengalirkan air hujan dan air permukaan.

Drainase berfungsi untuk menyalurkan air hasil buangan rumah tangga dan air hujan, disamping itu drainase juga berfungsi

untuk penanggulangan banjir perkotaan. Kondisi sistem drainase Kota Makassar terdiri dari drainase primer (sungai dan laut), drainase sekunder dan drainase tersier (drainase pada unit-unit permukiman).

#### ▪ Air Limbah/MCK

Salah satu sumber pencemaran lingkungan adalah air limbah. Air limbah di Kota Makassar secara umum bersumber dari; limbah rumah tangga, limbah industri, limbah kapal, dan hasil buangan dari aktivitas sosial ekonomi. Berdasarkan karakteristiknya limbah hasil buangan di Kota Makassar terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Hasil observasi lapangan yang dilakukan menunjukkan penanganan limbah di Kota Makassar sepenuhnya belum dikelola secara optimal (tanpa melalui treatment). Jika tidak diantisipasi sejak awal akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Kondisi ini secara umum terjadi di daerah kawasan kumuh Kota Makassar.

#### ▪ Persampahan

Sampah merupakan sumber bibit penyakit yang harus memerlukan penanganan. Sumber sampah yang ada di Kota Makassar bersumber dari; sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari berbagai fasilitas. Sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar saat ini ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sampah antara lain; bak sampah, kontainer, motor sampah dan mobil sampah.



### **3. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar**

Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, antara lain kawasan permukiman kumuh yang berada di pinggiran kota, pusat kota dan daerah pasang surut.

#### **a. Kawasan permukiman kumuh yang berada dipinggiran kota**

Kawasan permukiman kumuh yang berada di pinggiran kota antara lain sebagai berikut :

- i. Kawasan Permukiman Kumuh Barombong
- ii. Kawasan Permukiman Kumuh Mangasa
- iii. Kawasan Permukiman Kumuh Parangtambung
- iv. Kawasan Permukiman Kumuh Untia

#### **b. Kawasan permukiman kumuh yang berada di pusat kota**

Kawasan permukiman kumuh yang berada di pinggiran kota antara lain sebagai berikut :

- i. Kawasan Permukiman Kumuh Banta-Bantaeng
- ii. Kawasan Permukiman Kumuh Bunga Eja Beru
- iii. Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Buyang
- iv. Kawasan Permukiman Kumuh Layang
- v. Kawasan Permukiman Kumuh Lette
- vi. Kawasan Permukiman Kumuh Maradekayya Utara
- vii. Kawasan Permukiman Kumuh Mariso
- viii. Kawasan Permukiman Kumuh Pampang
- ix. Kawasan Permukiman Kumuh Pannampu
- x. Kawasan Permukiman Kumuh Patingalloang
- xi. Kawasan Permukiman Kumuh Patingalloang Baru

- xii. Kawasan Permukiman Kumuh Rappocini
- xiii. Kawasan Permukiman Kumuh Rappokalling
- xiv. Kawasan Permukiman Kumuh Sinrijala
- xv. Kawasan Permukiman Kumuh Tammua
- xvi. Kawasan Permukiman Kumuh Tidung
- xvii. Kawasan Permukiman Kumuh Wala-Walayya

**c. Kawasan permukiman kumuh yang berada di daerah pasang surut**

Kawasan permukiman kumuh yang berada di daerah pasang surut antara lain sebagai berikut :

- i. Kawasan Permukiman Kumuh Barrang Caddi
- ii. Kawasan Permukiman Kumuh Barrang Lompo
- iii. Kawasan Permukiman Kumuh Bontorannu
- iv. Kawasan Permukiman Kumuh Buloa
- v. Kawasan Permukiman Kumuh Cambayya
- vi. Kawasan Permukiman Kumuh Gusung
- vii. Kawasan Permukiman Kumuh Kaluku Bodoa
- viii. Kawasan Permukiman Kumuh Kodingareng
- ix. Kawasan Permukiman Kumuh Maccini Sombala
- x. Kawasan Permukiman Kumuh Mattoangin
- xi. Kawasan Permukiman Kumuh Panambungan
- xii. Kawasan Permukiman Kumuh Tallo
- xiii. Kawasan Permukiman Kumuh Tammalabba
- xiv. Kawasan Permukiman Kumuh Tanjung Merdeka
- xv. Kawasan Permukiman Kumuh Ujung Tanah

Sedangkan penetapan lokasi kawasan kumuh Kota Makassar Menurut SK. Walikota Makassar No. 050.05/1341/Kep/IX/2014 terbagi 3 (tiga) Tipologi antara lain kumuh berat, kumuh ringan dan kumuh sedang sebagai berikut :



Tabel 4. 2. Kawasan Kumuh Tipologi Kumuh Berat

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi			Korrdinat		Jumlah Rumah Tangga	Legalitas Lahan	Tipologi Kumuh
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Lintang	Bujur			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MARADEKAYA UTARA	0.93	RW.03	MARADEKAYA UTARA	MAKASSAR	5° 8' 26.84"LS	119° 25' 35.2"BT	133	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
2	KAMPUNG BUYANG	2.81	RW.04/05	KAMPUNG BUYANG	MARISO	5° 9' 33.41"LS	119° 24' 25.09"BT	104	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
3	LETTE	3.51	RW. 01/05	LETTE	MARISO	5° 9' 21.49"LS	119° 24' 22.69"BT	315	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
4	MARISO	3.68	RW. 03/06	MARISO	MARISO	5° 9' 29.13"LS	119° 24' 28.38"BT	183	(75% Milik Pribadi, 25 % Negara)	BERAT
5	MATTOANGIN	3.36	RW. 01/02	MATTOANGIN	MARISO	5° 9' 39.45"LS	119° 24' 21.19"BT	101	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
6	PANNAMBUNGAN	5.94	RW. 05/07/08	PANNAMBUNGAN	MARISO	5° 9' 10.06"LS	119° 24' 30.31"BT	189	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
7	BONTORANNU	6.74	RW. 01/02/04	BONTORANNU	MARISO	5° 9' 52.04"LS	119° 24' 21.09"BT	247	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
8	MANGASA	22.71	RW. 01/02/06/10	MANGASA	TAMALATE	5° 11' 18.37"LS	119° 26' 5.57"BT	255	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
9	PARANG TAMBUNG	42.84	RW. 07/12/14	PARANG TAMBUNG	TAMALATE	5° 11' 25.8"LS	119° 25' 18.95"BT	606	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
10	TANJUNG MARDEKA	18.61	RW. 03/04/05	TANJUNG MARDEKA	TAMALATE	5° 11' 5.82"LS	119° 24' 18.09"BT	224	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
11	BAROMBONG	32.73	RW. 01/02/04	BAROMBONG	TAMALATE	5° 13' 46.16"LS	119° 23' 3.79"BT	201	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
12	MACCINI SOMBALA	30.27	RW. 03/05/06/07	MACCINI SOMBALA	TAMALATE	5° 10' 4.49"LS	119° 24' 19.15"BT	340	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
13	PAMPANG	24.59	RW. 01/02/06/07/08	PAMPANG	PANAKKUKANG	5° 8' 4.91"LS	119° 26' 57.52"BT	166	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
14	SINRIJALA	5.68	RW. 02/04/05	SINRIJALA	PANAKKUKANG	5° 8' 14.27"LS	119° 26' 13.04"BT	112	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
15	RAPPOKALLING	11.18	RW. 03/05	RAPPOKALLING	TALLO	5° 7' 24.6"LS	119° 26' 36.91"BT	266	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
16	BUNGA EJA BERU	12.62	RW. 01/04	BUNGA EJA BERU	TALLO	5° 7' 24.93"LS	119° 25' 24.8"BT	279	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
17	PANNAMPU	18.16	RW. 03/04/05	PANNAMPU	TALLO	5° 6' 56.16"LS	119° 25' 28.22"BT	363	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	BERAT
18	TAMMUA	2.08	RW. 01/04	TAMMUA	TALLO	5° 6' 46.83"LS	119° 25' 28.98"BT	123	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
19	WALA-WALAYA	4.68	RW. 04/05	WALA-WALAYA	TALLO	5° 7' 18.08"LS	119° 26' 24.58"BT	174	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
20	TALLO	41.02	RW. 02/03/04/05	TALLO	TALLO	5° 6' 16.44"LS	119° 26' 29.65"BT	958	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
21	BULOVA	1.26	RW. 02/04/05	BULOVA	TALLO	5° 6' 43.78"LS	119° 26' 31.79"BT	105	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
22	KALUKU BODOA	19.21	RW. 05/07	KALUKU BODOA	TALLO	5° 6' 46.66"LS	119° 26' 2.93"BT	264	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
23	LAYANG	5.72	RW. 01/02/05/06	LAYANG	BONTOALA	5° 7' 9.72"LS	119° 25' 19.12"BT	219	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
24	PATTINGALLOANG	1.92	RW. 05	PATTINGALLOANG	UJUNG TANAH	5° 6' 50.36"LS	119° 25' 15.83"BT	122	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
25	PATTINGALLOANG BARU	4.14	RW. 02/03	PATTINGALLOANG BARU	UJUNG TANAH	5° 6' 47.03"LS	119° 25' 27.38"BT	203	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
26	TAMALABBA	2.53	RW. 01/02	TAMALABBA	UJUNG TANAH	5° 6' 52.74"LS	119° 24' 47.26"BT	76	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
27	CAMBAYA	5.55	RW. 01/02/03/04/05	CAMBAYA	UJUNG TANAH	5° 6' 36.83"LS	119° 25' 34.18"BT	341	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
28	KODINGARENG	9.51	RW. 01/02/03/04/05/06	KODINGARENG	UJUNG TANAH	5° 8' 53.48"LS	119° 15' 52.91"BT	305	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
29	BARRANG CADDI	4.49	RW. 01/02/03/04/05/06	BARRANG CADDI	UJUNG TANAH	5° 4' 52.17"LS	119° 19' 13.59"BT	434	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
30	BARRANG LOMPO	12.49	RW. 01/04	BARRANG LOMPO	UJUNG TANAH	5° 2' 54.72"LS	119° 19' 44.81"BT	123	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	BERAT
31	UJUNG TANAH	1.89	RW. 01/02	UJUNG TANAH	UJUNG TANAH	5° 7' 6.71"LS	119° 24' 39.42"BT	117	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
32	GUSUNG	2.38	RW. 01/02/03	GUSUNG	UJUNG TANAH	5° 6' 44.30"LS	119° 25' 23.92"BT	153	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
33	UNTIA	7.13	RW. 03/04/05	UNTIA	BIRINGKANAYA	5° 4' 31.26"LS	119° 29' 1.49"BT	59	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
34	RAPPOCINI	10.38	RW. 03/05	RAPPOCINI	RAPPOCINI	5° 9' 11.38"LS	119° 25' 53.57"BT	171	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT
35	BANTA-BANTAENG	6.74	RW. 04/06	BANTA-BANTAENG	RAPPOCINI	5° 9' 38.19"LS	119° 25' 37.24"BT	194	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	BERAT
36	TIDUNG	4.54	RW. 01/08	TIDUNG	RAPPOCINI	5° 9' 55.67"LS	119° 26' 34.13"BT	107	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	BERAT

Sumber : Identifikasi Kawasan Kumuh, Bappeda Kota Makassar, 2015

Tabel 4. 3. Kawasan Kumuh Tipologi Kumuh Ringan

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi			Korrdinat		Jumlah Rumah Tangga	Legalitas Lahan	Tipologi Kumuh
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Lintang	Bujur			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PAI	3.91	RW. 03/04/05	PAI	BIRINGKANAYA	5° 5'46.68"LS	119°30'33.92"BT	68	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	RINGAN
2	DAYA	4.72	RW. 02/03/04	DAYA	BIRINGKANAYA	5° 6'35.13"LS	119°30'34.40"BT	52	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	RINGAN
3	BULUROKENG	9.53	RW. 02/03/04/05	BULUROKENG	BIRINGKANAYA	5° 4'49.75"LS	119°29'57.45"BT	205	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	RINGAN
4	SUDIANG	6.46	RW. 01/02/04/13/22	SUDIANG	BIRINGKANAYA	5° 5'45.71"LS	119°32'8.72"BT	222	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	RINGAN
5	SUDIANG RAYA	3.33	RW. 02/06/07/09	SUDIANG RAYA	BIRINGKANAYA	5° 5'55.69"LS	119°32'2.13"BT	106	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	RINGAN
6	PACCERAKKANG	6.03	RW. 02/04/15/20	PACCERAKKANG	BIRINGKANAYA	5° 8'3.83"LS	119°31'23.17"BT	231	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	RINGAN
7	BULOGADING	3.63	RW. 04	BULOGADING	UJUNG PANDANG	5° 8'19.26"LS	119°24'25.57"BT	118	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	RINGAN
8	LAE-LAE	6.74	RW. 03	LAE-LAE	UJUNG PANDANG	5° 8'13.02"LS	119°23'28.43"BT	103	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	RINGAN
9	MALOKU	5.16	RW. 02	MALOKU	UJUNG PANDANG	5° 8'28.29"LS	119°24'29.05"BT	128	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	RINGAN
10	LOSARI	4.18	RW. 01	LOSARI	UJUNG PANDANG	5° 8'38.75"LS	119°24'34.68"BT	112	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	RINGAN
11	BUTUNG	5.74	RW. 01/02/03	BUTUNG	WAJO	5° 7'27.32"LS	119°24'45.57"BT	137	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	RINGAN
12	PATTUNUANG	1.25	RW. 01/02	PATTUNUANG	WAJO	5° 7'50.71"LS	119°24'26.87"BT	114	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	RINGAN
13	ENDE	2.83	RW. 01/02/03	ENDE	WAJO	5° 7'39.73"LS	119°24'49.69"BT	92	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	RINGAN
14	MAMPU	3.35	RW. 01/02/04	MAMPU	WAJO	5° 7'11.83"LS	119°24'42.44"BT	120	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	RINGAN
15	MELAYU BARU	16.53	RW. 01/02/04	MELAYU BARU	WAJO	5° 7'37.02"LS	119°24'35.73"BT	119	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	RINGAN
16	TAMANGAPA	3.63	RW. 03/04/05/06	TAMANGAPA	MANGGALA	5°11'10.40"LS	119°29'45.90"BT	65	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	RINGAN
17	MANGGALA	0.66	RW. 06/09	MANGGALA	MANGGALA	5° 9'52.72"LS	119°28'41.07"BT	87	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	RINGAN

Sumber : Identifikasi Kawasan Kumuh, Bappeda Kota Makassar, 2015

Tabel 4. 4. Kawasan Kumuh Tipologi Kumuh Sedang

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi			Korrdinat		Jumlah Rumah Tangga	Legalitas Lahan	Tipologi Kumuh
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Lintang	Bujur			
1	BARA-BARAYA TIMUR	0.93	RW. 01/02/04	BARA-BARAYA TIMUR	MAKASSAR	5° 8'36.63"LS	119°25'59.46"BT	156	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
2	BARA-BARAYA UTARA	3.47	RW. 01	BARA-BARAYA UTARA	MAKASSAR	5° 8'30.43"LS	119°25'50.40"BT	173	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
3	BARA-BARAYA SELATAN	2.26	RW. 01	BARA-BARAYA SELATAN	MAKASSAR	5° 8'48.65"LS	119°25'42.82"BT	175	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
4	MACCINI	1.82	RW. 04	MACCINI	MAKASSAR	5° 8'9.40"LS	119°25'52.07"BT	118	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
5	MACCINI GUSUNG	7.41	RW. 02/03	MACCINI GUSUNG	MAKASSAR	5° 8'13.33"LS	119°25'32.99"BT	183	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
6	BARA-BARAYA	0.95	RW. 01/02/03	BARA-BARAYA	MAKASSAR	5° 8'40.34"LS	119°25'46.43"BT	142	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
7	BARANA	2.03	RW. 03/04	BARANA	MAKASSAR	5° 8'19.69"LS	119°25'33.01"BT	97	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
8	LARIANG BANGNGI	2.40	RW. 01/03	LARIANG BANGNGI	MAKASSAR	5° 8'17.55"LS	119°25'16.10"BT	80	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
9	MACCINI PARANG	1.01	RW. 03	MACCINI PARANG	MAKASSAR	5° 8'27.86"LS	119°25'59.45"BT	105	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
10	MARADEKAYA	2.45	RW. 03/04	MARADEKAYA	MAKASSAR	5° 8'36.59"LS	119°25'21.77"BT	146	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
11	MARADEKAYA SELATAN	1.43	RW.001	MARADEKAYA SELATAN	MAKASSAR	5° 8'41.13"LS	119°25'22.42"BT	115	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
12	MARICAYA BARU	8.48	RW. 03/04/05	MARICAYA BARU	MAKASSAR	5° 8'53.84"LS	119°25'35.02"BT	193	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
13	KUNJUNG MAE	4.57	RW. 02/03	KUNJUNG MAE	MARISO	5° 8'59.73"LS	119°24'41.98"BT	123	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	SEDANG
14	MARIO	1.68	RW. 01/03	MARIO	MARISO	5° 9'20.41"LS	119°24'55.67"BT	121	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	SEDANG
15	TAMARUNANG	2.88	RW. 04	TAMARUNANG	MARISO	5° 10'7.35"LS	119°24'25.31"BT	115	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	SEDANG
16	JONGAYA	3.20	RW. 01/02/08/13	JONGAYA	TAMALATE	5° 10'24.81"LS	119°25'5.84"BT	129	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
17	MANNURUKI	4.16	RW. 03/04/08	MANNURUKI	TAMALATE	5° 10'35.99"LS	119°25'42.17"BT	113	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
18	PA'BAENG-BAENG	3.57	RW. 07/08	PA'BAENG-BAENG	TAMALATE	5° 10'18.24"LS	119°25'18.95"BT	152	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	SEDANG
19	BALANG BARU	21.24	RW. 02/04/05/09	BALANG BARU	TAMALATE	5° 11'1.69"LS	119°24'46.80"BT	178	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	SEDANG
20	TAMAMAUNG	4.90	RW. 06	TAMAMAUNG	PANAKKUKANG	5° 8'42.95"LS	119°26'22.79"BT	218	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
21	KARUWISI	2.91	RW. 02/03/04	KARUWISI	PANAKKUKANG	5° 8'33.87"LS	119°26'13.97"BT	127	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
22	KARUWISI UTARA	5.65	RW. 08	KARUWISI UTARA	PANAKKUKANG	5° 7'58.19"LS	119°26'11.28"BT	138	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
23	PANAUKANG	7.49	RW. 01/02/04	PANAUKANG	PANAKKUKANG	5° 8'18.73"LS	119°27'44.65"BT	127	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
24	PANDANG	11.58	RW. 01/02/03	PANDANG	PANAKKUKANG	5° 8'34.70"LS	119°27'6.42"BT	161	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
25	MASALE	6.15	RW. 03	MASALE	PANAKKUKANG	5° 9'16.50"LS	119°26'37.61"BT	99	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
26	LAKKANG	11.57	RW. 01/02	LAKKANG	TALLO	5° 7'15.03"LS	119°27'55.78"BT	101	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	SEDANG
27	LEMBO	4.53	RW. 01/02/05	LEMBO	TALLO	5° 7'15.66"LS	119°25'31.82"BT	187	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
28	RAPPOJAWA	2.76	RW. 01	RAPPOJAWA	TALLO	5° 7'27.69"LS	119°26'14.02"BT	96	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
29	SUANGGA	1.04	RW. 05	SUANGGA	TALLO	5° 7'17.74"LS	119°25'52.52"BT	84	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
30	BUNGA EJAYA	1.22	RW. 02/03/05	BUNGA EJAYA	BONTOALA	5° 7'32.91"LS	119°25'17.37"BT	152	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
31	BONTOALA TUA	1.20	RW. 03/05	BONTOALA TUA	BONTOALA	5° 7'36.95"LS	119°25'18.09"BT	104	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
32	TOMPO BALANG	1.67	RW. 01/02/04	TOMPO BALANG	BONTOALA	5° 8'2.89"LS	119°25'33.20"BT	82	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
33	WAJO BARU	5.21	RW. 02/05	WAJO BARU	BONTOALA	5° 7'58.61"LS	119°25'24.08"BT	163	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
34	BARAYA	2.77	RW. 03/04/05/06	BARAYA	BONTOALA	5° 7'40.62"LS	119°25'27.60"BT	169	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
35	CAMBA BERUA	1.32	RW. 04	CAMBA BERUA	UJUNG TANAH	5° 8'40.53"LS	119°25'45.68"BT	93	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	SEDANG
36	TAMALANREA	7.43	RW. 06/18	TAMALANREA	TAMALANREA	5° 8'26.38"LS	119°31'1.82"BT	139	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	SEDANG
37	BIRA	22.98	RW. 03/04/05/06	BIRA	TAMALANREA	5° 5'27.19"LS	119°28'43.28"BT	116	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	SEDANG
38	PARANGLOE	7.40	RW. 01/03/04/05	PARANGLOE	TAMALANREA	5° 5'51.92"LS	119°28'12.67"BT	91	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	SEDANG
39	TAMALANREA JAYA	8.40	RW. 01/02/03/06	TAMALANREA JAYA	TAMALANREA	5° 8'43.25"LS	119°30'5.18"BT	87	(70% Milik Pribadi, 30 % Negara)	SEDANG
40	PA'BATANG	1.82	RW. 01/02	PA'BATANG	MAMAJANG	5° 9'45.84"LS	119°24'58.67"BT	123	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
41	SAMBUNG JAWA	4.15	RW. 02/03/04	SAMBUNG JAWA	MAMAJANG	5° 10'19.39"LS	119°24'13.13"BT	108	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
42	MAPPALA	3.06	RW. 11	MAPPALA	RAPPOCINI	5° 10'26.41"LS	119°27'7.98"BT	157	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
43	BALLAPARANG	4.39	RW. 04/05/06	BALLAPARANG	RAPPOCINI	5° 8'56.40"LS	119°25'48.74"BT	105	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
44	BUAKANA	4.71	RW. 01/02/03/06	BUAKANA	RAPPOCINI	5° 9'33.78"LS	119°25'57.11"BT	177	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
45	KARUNRUNG	21.31	RW. 01/04/05	KARUNRUNG	RAPPOCINI	5° 10'57.44"LS	119°26'59.23"BT	203	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
46	GUNJUNG SARI	4.61	RW. 01/02/03/06	GUNJUNG SARI	RAPPOCINI	5° 10'55.84"LS	119°27'4.60"BT	95	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
47	MALIMONGAN	2.67	RW. 01/03/04/05/06	MALIMONGAN	WAJO	5° 7'5.26"LS	119°24'48.15"BT	130	(85% Milik Pribadi, 15 % Negara)	SEDANG
48	BATUA	9.64	RW. 03	BATUA	MANGGALA	5° 9'15.13"LS	119°27'54.32"BT	147	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	SEDANG
49	BORONG	5.90	RW. 01/02/10/11/12	BORONG	MANGGALA	5° 9'52.00"LS	119°27'49.64"BT	152	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	SEDANG
50	BANGKALA	1.94	RW. 04/11/12/16	BANGKALA	MANGGALA	5° 10'24.53"LS	119°29'16.04"BT	158	(80% Milik Pribadi, 20 % Negara)	SEDANG

Sumber : Identifikasi Kawasan Kumuh, Bappeda Kota Makassar, 2015

## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Tallo Kota Makassar**

#### **a. Kondisi Fisik Wilayah**

Berdasarkan data BPS (2016), Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km<sup>2</sup> atau 3,32% dan luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan yang dimiliki terdiri dari sektor pertanian yakni hanya 25 ha (lahan sawah dan tegalan/kebun) dan sektor perikanan darat (tambak) 293 ha. Total produksi pertanian tahun 2008 sebesar 49,15 ton sedangkan di subsektor perikanan 2.585,90 ton. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrovenya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Pada bagian barat pantai kecamatan ini sudah ada kegiatan reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai lahan kegiatan industri pengolahan kayu. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai

Tallo. Ditinjau dan pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

Berdasarkan profil kumuh Kota Makassar Jumlah Kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Tallo berjumlah 11 kawasan yaitu, Kawasan kumuh Kelurahan Bunga Eja Baru (RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04), Kawasan Kumuh Kelurahan Lakkang (RW 01 dan RW 02), Kawasan Kumuh Kelurahan Lembo (RW 01), Kawasan kumuh Kelurahan Rappojawa (RW 04 dan RW 05), Kawasan kumuh Kelurahan Rappokalling (RW 01, RW 03, dan RW 05), Kawasan kumuh Kelurahan Suangga (RW 05), Kawasan kumuh Kelurahan Buloa (RW 05), Kawasan kumuh Kelurahan Kaluku Bodoa (RW 04 dan RW 05), Kawasan kumuh Kelurahan Wala-Walaya (RW 04), Kawasan kumuh Kelurahan Panampu (RW 01 dan RW 02), Kawasan kumuh Kelurahan Tallo (RW 04 dan RW 05).

#### **b. Aspek Kependudukan**

Berdasarkan data yang di peroleh Jumlah penduduk Kecamatan Tallo yang berada pada 11 lokasi kawasan kumuh. Jumlah penduduk terbanyak pada kawasan permukiman kumuh Kecamatan Tallo berada pada kumuh kelurahan Panampu dengan jumlah penduduk 21.085 jiwa dengan kepadatan penduduk 1155 Jiwa/Ha dan jumlah yang penduduk yang paling sedikit berada pada kumuh Kelurahan Buloa yaitu 464 jiwa dengan dengan kepadatan penduduk 368 Jiwa/Ha.



Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo

No	Lokasi			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW/RT/ LINGKUNGAN		
1		Bunga Eja Baru	RW 01	9184	728
			RW 02		
			RW 03		
			RW 04		
2		Lakkang	RW 01	952	82
			RW 02		
3		Lembo	RW 01	3.216	715
4		Rappojawa	RW 04	2.589	959
			RW 05		
5	TALLO	Rappokalling	RW 01	6441	580
			RW 03		
			RW 05		
6		Suangga	RW 05	1.289	1239
7		Buloa	RW 05 / RT 03	464	368
8		Kaluku Bodoa	RW 04	8.240	429
			RW 05		
9		Wala-Walaya	RW 04	1.818	395
10		Pannampu	RW 01	21.085	1155
			RW 02		
11		Tallo	RW 04	800	20
			RW 05		

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar Tahun 2015

### c. Kondisi Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana pada suatu wilayah merupakan salah faktor yang berpengaruh terhadap sistem pusat pelayanan dalam kawasan. Demikian halnya pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan terhadap masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam rangka mendorong masyarakat ke arah pembangunan yang lebih dinamis. Kondisi sarana dan prasarana pada kawasan kumuh Kecamatan Tallo dapat di gambarkan sebagai berikut;

### 1) Sarana Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Menunjuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengesampingkan pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah. Adapun ketersediaan sarana pendidikan pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo yaitu, Taman Kanak-Kanak berjumlah 13 unit dan Sekolah Dasar 14 unit.

**Tabel 4.6 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo**

No	LOKASI			Sarana Pendidikan					
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW/RT/ LINGKUNGAN	T K	SD	SLT P	SLT A	Perguruan Tinggi	Lainnya
1		Bunga Eja Baru	RW 01	5	2	-	-	-	-
			RW 02						
			RW 03						
			RW 04						
2		Lakkang	RW 01	1	1	1	-	-	-
3		Lembo	RW 01	4	4	2	-	-	-
4	TALLO	Rappojawa	RW 04	-	-	-	-	-	-
5		Rappokalling	RW 03	2	1	1	-	-	-
			RW 05						
6		Suangga	RW 05	-	-	-	-	-	-
7		Buloa	RW 05 / RT 03	-	-	-	-	-	-
8		Kaluku Bodoa	RW 04	-	4	-	-	-	-
			RW 05						
9		Wala-Walaya	RW 04	1	2	-	-	-	-

10	Pannampu	RW 01	-	-	-	-	-	-
		RW 02						
11	Tallo	RW 04	-	-	-	-	-	-
		RW 05						

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar Tahun 2015

## 2) Sarana Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM, maka program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada calon generasi pemuda khususnya bayi dan anak usia dibawah lima tahun. Jumlah sarana kesehatan pada kawasan kumuh Kecamatan Tallo yaitu, 5 unit Posyandu.

**Tabel 4.7 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo**

No	LOKASI			Sarana Kesehatan			
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW/RT/ LINGKUNGAN	Posyandu	Pustu	Puskesmas	Rumah Sakit
1		Bunga Eja Baru	RW 01	5	1	-	-
			RW 02				
			RW 03				
			RW 04				
2		Lakkang	RW 01	-	1	1	-
			RW 02				
3	TALLO	Lembo	RW 01	-	1	-	-
4		Rappojawa	RW 04	-	1	-	-
			RW 05				
5		Rappokalling	RW 03	-	-	-	-
			RW 05				
6		Suangga	RW 05	-	1	-	-
7		Buloa	RW 05 / RT 03	-	-	-	-
8		Kaluku Bodoa	RW 04	-	-	1	-

		RW 05				
9	Wala-Walaya	RW 04	-	-	-	-
10	Pannampu	RW 01	-	-	-	-
		RW 02				
11	Tallo	RW 04	-	-	-	-
		RW 05				

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar

Tahun 2015

### 3) Jaringan Jalan

Sistem transportasi sangat penting untuk mendukung angkutan barang dan penumpang. Sistem transportasi yang digunakan masyarakat saat ini dalam pengangkutan sangat ditentukan dengan ketersediaan prasarana jalan terutama dukungan prasarana ke kawasan perkotaan. Adapun data terkait jaringan jalan serta kualitas jalan pada kawasan kumuh Kecamatan Tallo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.8 Data Jaringan Jalan Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LINGKUNGAN /RT/RW	KONDISI JARINGAN JALAN			
				UTAMA		LINGKUNGAN	
				P (m)	L (m)	P (m)	L (m)
1		Bunga Eja Baru	RW 01	860,04	4,4	193,67	3
			RW 02				
			RW 03				
			RW 04				
2		Lakkang	RW 01	300	1,6	1500	2 sd/ 3
			RW 02				
3	TALLO	Lembo	RW 01	642,88	5 sd/ 6	418,41	1,5 sd/ 3
4		Rappojawa	RW 04	765,01	3sd/ 6	63,53	2,5
			RW 05				
5		Rappokalling	RW 01	612,89	4 sd/ 6	425,18	2 sd/ 4
			RW 03				
			RW 05				
6		Suangga	RW 05	127,73	8	40	1,5



7	Buloa	RW 05	-	-	-	-	-	-	2,5	1	-
8	Kaluku Bodoa	RW 04	-	-	-	-	-	-	200	2,5	-
		RW 05									
9	Wala-Walaya	RW 04	-	-	-	-	-	-	1,25	0,7	-
10	Pannampu	RW 01	-	-	-	-	-	-	3,5	2,5	-
		RW 02									
11	Tallo	RW 04	-	-	-	-	-	-	300	2,5	-
		RW 05									

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar Tahun 2015

### 5) Penyediaan Air Minum

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunkan jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015. Kekurangan air bersih akan menyebabkan penyakit bahkan kematian. Ini yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah bekerjasama dengan instansi terkait serta masyarakat. Adapun penyediaan air pada kawasan kumuh Kecamatan Tallo bersumber dari PDAM maupun Sumur Bor yang digunakan oleh masyarakat setempat.

**Tabel 4.10 Sumber Penyediaan Air Minum Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo**

No	LOKASI			SARANA PELAYANAN AIR MINUM				
	KECAMATAN AN	KELURAHAN AN	RW/RT/LINGKUNGAN	PDAM	Sumur Bor/Pompa	Air Sungai	Air Hujan	Air Kemasaan
1		Bunga Eja Baru	RW 01					
			RW 02					
			RW 03	x	x	-	-	x
			RW 04					
2	TALLO	Lakkang	RW 01	x	x	-	-	x
			RW 02					
3		Lembo	RW 01	x	x	-	-	x
4		Rappojawa	RW 04	x	x	-	-	x
			RW 05					

5	Rappokalling	RW 01					
		RW 03	x	x	-	-	x
		RW 05					
6	Suangga	RW 05	x	x	-	-	x
7	Buloa	RW 05	-	-	-	-	x
8	Kaluku Bodoa	RW 04	-	-	-	-	
		RW 05					
9	Wala-Walaya	RW 04	-	x	-	-	
10	Pannampu	RW 01	-	-	-	-	x
		RW 02					
11	Tallo	RW 04	-	-	-	-	x
		RW 05					

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar Tahun 2015

## 6) Prasarana Sanitasi

Komponen yang termasuk dalam ruang lingkup prasarana sanitasi sendiri mempunyai beragam versi antara lain, di negara-negara berkembang ruang lingkup sanitasi dibatasi pada pengelolaan pembuangan tinja dan air limbah rumah tangga (domestik) ditambah atau tanpa penyediaan air minum. Artinya penyediaan air minum merupakan komponen program tersendiri. Pada kawasan kumuh Kecamatan Tallo secara keseluruhan telah menggunakan jamban pribadi.

**Tabel 4.11 Data Prasarana Sanitasi Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo**

No	LOKASI			MCK/Jamban Umum	Jamban Keluarga (Pribadi)	Tidak Memiliki Jamban
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW/RT/LINGKUNGAN			
1	TALLO	Bunga Eja Baru	RW 01			
			RW 02			
			RW 03	-	2005	269
			RW 04			
2		Lakkang	RW 01			
			RW 02	10	223	72

3	Lembo	RW 01	-	384	-
4	Rappojawa	RW 04	-	625	23
		RW 05			
5	Rappokalling	RW 01		891	325
		RW 03	150		
6	Suangga	RW 05	3	225	75
7	Buloa	RW 05	-	67	12
8	Kaluku Bodoa	RW 04	-	1931	-
		RW 05			
9	Wala-Walaya	RW 04	-	445	-
10	Pannampu	RW 01	-	978	-
		RW 02			
11	Tallo	RW 04	-	133	-
		RW 05			

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar

Tahun 2015

## 7) Prasarana Persampahan

Mengamati permasalahan penanganan sampah di lapangan seperti menumpuknya sampah di pinggir jalan (karena keterlambatan pengangkutan atau tidak terangkut ke TPA), rute dan jadwal pengangkutan yang tidak pasti, makin banyaknya TPA liar dan pembuangan sampah ke sungai karena tidak adanya pelayanan yang memadai, kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang *open dumping* sehingga kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi serta ketidakpedulian masyarakat akan perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Pada kawasan permukiman kumuh



Kecamatan Tallo keseluruhan wilayah telah terfasilitasi tempat pembuangan sementara berupa bak-bak sampah dan tong sampah.

**Tabel 4.12 Data Prasarana Persampahan Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo**

No	LOKASI			Bak/Tong Sampah	TP S	TP A	Sistem Pengangkutan			
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW/RT/LINGKUNGAN				Gerobak Dorong	Gerobak Motor	Mobil Sampah	Lainnya
1		Bunga Eja Baru	RW 01 RW 02 RW 03 RW 04	2.28	4		6	3	3	
2		Lakkang	RW 01 RW 02	299						
3		Lembo	RW 01	789				2	1	
4		Rappojawa	RW 04 RW 05	642	1			4	1	
5	TALLO	Rappokallin g	RW 01 RW 03 RW 05	845				8	2	
6		Suangga	RW 05	295				1	1	
7		Buloa	RW 05							
8		Kaluku Bodoa	RW 04 RW 05	10				4	2	
9		Wala-Walaya	RW 04	1	1			1		
10		Pannampu	RW 01 RW 02	6	2			5		
11		Tallo	RW 04 RW 05	10	2			4		

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar Tahun 2015

## 8) Jaringan Listrik

Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber tegangan, sumber arus, dan saklar (switch). Istilah sirkuit listrik sedikit dibedakan dari jaringan listrik, di mana jaringan listrik

membahas penggunaan sirkuit listrik dalam skop yang lebih luas seperti dalam jaringan distribusi pembangkit listrik dari generator pembangkit sampai pada pelanggan listrik di masing-masing rumah. Sebetulnya kedua macam rangkaian ini menggunakan prinsip dasar yang sama, hanya dalam jaringan listrik dibahas mengenai jalur transmisi yaitu mengenai sifat kabel pada frekuensi tinggi. kawasan kumuh Kecamatan Tallo secara keseluruhan telah dilayani sambungan listrik PLN.

**Tabel 4.13 Layanan Jaringan Listrik Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo**

No	LOKASI			Terlayani Jaringan Listrik	Belum Terlayani Jaringan Listrik	Kapasitas Listrik (Daya Listrik)
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW/RT/ LINGKUNGAN			
1		Bunga Eja Baru	RW 01	x	-	900-1.300 VA
			RW 02			
			RW 03			
			RW 04			
2		Lakkang	RW 01	x	-	900-1.300 VA
			RW 02			
3		Lembo	RW 01	x	-	900-1.300 VA
4		Rappojawa	RW 04	x	-	900-1.300 VA
			RW 05			
5	TALLO	Rappokalling	RW 01	x	-	900-1.300 VA
			RW 03			
			RW 05			
6		Suangga	RW 05	x	-	900-1.300 VA
7		Buloa	RW 05	x	-	900-1.300 VA
8		Kaluku Bodoa	RW 04	x	-	900-1.300 VA
			RW 05			
9		Wala-Walaya	RW 04	x	-	900-1.300 VA
10		Pannampu	RW 01	x	-	900-1.300 VA
			RW 02			
11		Tallo	RW 04	x	-	900-1.300 VA
			RW 05			

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar Tahun 2015

### 9) Jaringan Telekomunikasi

Perangkat telekomunikasi bertugas menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain. Kedua pemakai ini bisa berdekatan tetapi bisa berjauhan. Teknik telekomunikasi dikembangkan manusia untuk menebus perbedaan jarak yang jauhnya bisa tak terbatas menjadi perbedaan waktu yang sekecil mungkin. Kawasan kumuh Kecamatan Tallo secara keseluruhan telah dijangkau oleh jaringan telekomunikasi (jaringan kabel dan BTS).

**Tabel 4.14 Layanan Jaringan Telekomunikasi Pada Kawasan Kumuh Kecamatan Tallo**

No	LOKASI			Terlayani Jaringan Telekomunikasi	Tidak Terlayani Jaringan Telekomunikasi
	KECAMATAN	KELURAHAN	RW/RT/ LINGKUNGAN		
1		Bunga Eja Baru	RW 01	x	-
			RW 02		
			RW 03		
			RW 04		
2		Lakkang	RW 01	x	-
			RW 02		
3		Lembo	RW 01	x	-
4		Rappojawa	RW 04	x	-
			RW 05		
5	TALLO	Rappokalling	RW 01	x	-
			RW 03		
			RW 05		
6		Suangga	RW 05	x	-
7		Buloa	RW 05	x	-
8		Kaluku Bodoa	RW 04	x	-
			RW 05		
9		Wala-Walaya	RW 04	x	-
10		Pannampu	RW 01	x	-
			RW 02		
11		Tallo	RW 04	x	-
			RW 05		

Sumber : Hasil Survey identifikasi kawasan permukiman kumuh kota makassar, Bappeda Kota Makassar

Tahun 2015

## 10) Sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran

Kawasan kumuh identik dengan bencana kebakaran. Rapatnya bangunan dan banyaknya sambungan listrik oleh warga lingkungan setempat merupakan sebagian kecil faktor yang memicu terjadinya kebakaran pada kawasan kumuh. Sehingga idealnya sebuah kawasan tak terkecuali kawasan kumuh idealnya harus tersedia sarana proteksi kebakaran berupa hydrant kebakaran, mobil pemadam kebakaran, akses jalan yang dapat dijangkau mobil pemadam kebakaran dan sarana prasarana proteksi kebakaran lainnya. Pada kawasan kumuh Kecamatan Tallo belum terdapat sarana proteksi kebakaran sehingga pengadaan dan penyediaan sarana proteksi kebakaran sangat penting sebagai bentuk proteksi terhadap bencana kebakaran pada kawasan kumuh Kecamatan Tallo.

## 2. Gambaran Umum Permukiman Kumuh lokasi Penelitian (RT. A dan RT B RW 04 Kelurahan Tallo)

### 1) Kondisi Fisik Kawasan

Kelurahan Tallo adalah Kelurahan di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan luas **59,520 Ha**, dibagi **dalam 5 RW** dan **26 RT**, dengan luas masing-masing :

RW. 01 : 8,005 Ha

RW. 02 : 4,484 Ha

RW. 03 : 9,761 Ha

RW. 04 : 14,280 Ha

RW. 05 : 22,990 Ha

Secara Geografis, Kelurahan Tallo berbatasan dengan Kelurahan dan Kecamatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Kelurahan Buloa dan Kelurahan Kaluku Bodoa
- Kecamatan Tallo
- Sebelah Barat : Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah
- Sebelah Timur : Sungai Tallo

Kelurahan Tallo secara administratif terletak di Kecamatan Tallo, Daerah Tingkat II Kota Makassar. Posisi Geografis Kantor Kelurahan terletak di S 05°06'26,7" dan E 119°26'22,9". Berdasarkan pencatatan Stasiun meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 77 persen, temperatur udara sekitar 26,2-29,3c, dan rata-rata kecepatan angin 5,2 knot.

Musim hujan berlangsung dari bulan Nopember – April, sedangkan musim kemarau, dimulai bulai Mei – Oktober, temperatur udara rata-rata periode 1996 – 2000 adalah 26,50°C, kelembapan udara 89,20% dengan persentase penyinaran matahari maksimum sebesar 89,0% terjadi pada bulan Agustus, minimum sebesar 15% yang terjadi pada bulan Desember.

Untuk lokasi penelitian Kelurahan Tallo berada pada RW.4 / RT.A dan RT.B yaitu wilayah Mangarabombang, lokasi penelitian ini memiliki luas ± **4,2 Ha**, yang berada sepanjang pesisir pantai utara Kelurahan Tallo, yang terdiri dari area pemukiman pantai.

Gambar 4.1 Peta Kelurahan Tallo Kota Makassar



Gambar 4.2 Peta Lokasi Penelitian



## 2) Kondisi Demografi dan Kependudukan

Jumlah Penduduk Kelurahan Tallo pada data terakhir adalah 1.977 KK atau 9.258 jiwa terdiri dari 4.735 jiwa Penduduk Laki-laki dan 4.513 jiwa Penduduk Perempuan dan khusus RW.04 sebanyak 515 KK, atau 2.066 Jiwa terdiri dari 1.048 jiwa Penduduk Laki-laki dan 1.018 jiwa Penduduk Perempuan. Sedangkan pada lokasi penelitian jumlah Penduduknya yaitu 530 jiwa atau 111 KK.

**Tabel 4. 23 Jumlah Penduduk pada Lokasi Penelitian**

NO	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki - Laki	Perempuan	
1	111	264	266	530

*Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015*

## 3) Sarana dan Prasarana

### a. Jalan dan Jembatan

Kondisi jaringan jalan di lokasi penelitian secara keseluruhan terintegrasi pada jaringan jalan kelurahan. Secara umum jenis jaringan jalan yang ada di Kelurahan Tallo khususnya pada lokasi penelitian merupakan jalan setapak dengan material berupa beton dengan lebar 5-6 m, paving blok dengan lebar 1-3 m dan tanah dengan lebar sekitar 1 m.

### b. Drainase

Penyediaan prasarana drainase di lokasi penelitian pada umumnya masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari beberapa ruas jalan kelurahan yang ada pada lokasi penelitian hanya beberapa yang terdapat jaringan drainase dengan kondisi yang permanen. Hal ini menunjukkan sistem jaringan pembuangan air limbah maupun air

hujan tidak tersedia dengan baik dan tidak berjalan sesuai fungsi dan kapasitasnya, sebab jaringan yang adapun tidak berjalan sesuai fungsinya.

### c. Sektor Sanitasi

Ketersediaan MCK di masing - masing rumah tangga masih kurang, sebab masih terdapatnya masyarakat yang tidak mempunyai WC, sehingga masih mrnggunakan lahan - lahan kosong dan sungai sebagai aktifitas mandi cuci kakus. MCK umum tidak tersedia saat ini sehingga warga membuat jamban yang pembuangannya langsung ke Laut atau sekitar Sungai Tallo dengan kondisi yang seadanya dan kurang layak.

**Tabel. 4.24 Kondisi Kepemilikan WC/Jamban Keluarga di Lokasi Penelitian**

No	Aktifitas MCK	Jumlah (KK)	%
1	WC Pribadi	55	48.62
2	WC Umum	7	6.422
3	Laut / Sungai / Kebun	49	44.95
	<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015*

### d. Sektor Air Limbah

Secara umum sistem pembuangan limbah pada rumah tangga tidak tersedia. Sebagian besar masyarakat langsung membuang limbah rumah tangganya ke Laut yang terletak di belakang rumah masing-masing warga, hal ini juga disebabkan oleh tidak terfasilitasinya jaringan drainase sebagai salah satu alat yang mengalirkan kotoran rumah tangga ke pembuangan akhir.



**Tabel 4.25 Kondisi Sistem Pembuangan Air Limbah di Lokasi Penelitian**

No	Pembuangan Limbah	Jumlah (KK)	%
1	Terintegrasi ke drainase	40	35.45
2	Tdk Ada	71	64.55
<b>Total</b>		<b>111</b>	<b>100</b>

Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015

#### e. Sektor Air Bersih dan Air Minum

Dari hasil pemetaan, menggunakan air PDAM, air sumur, dan air dari Program PAMSIMAS untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan untuk air minum sebagian masyarakat menggunakan air PDAM untuk di masak dan sebagian lagi memilih untuk membeli air galon. Namun kondisi kuantitas air bersih dari sumber PDAM yang tersedia kurang mencukupi kebutuhan

**Tabel 4.26 Kondisi Air Bersih dan Air Minum di Lokasi Penelitian**

NO	Sumber Air	Jumlah	%
1	PAM	102	91.8
2	Air Sumur	1	0.9
3	Beli	8	7.3
<b>Total</b>		<b>111</b>	<b>100</b>

Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015

#### f. Sistem Persampahan

Kondisi persampahan yang ada pada lokasi penelitian yakni tersedianya bak sampah / tempat penampungan sementara yang berada di wilayah RT. A, namun kondisi ini tidak menjamin terpeliharanya lingkungan dengan baik akibat masih banyaknya warga yang membuang sampahnya di pesisir laut / dilaut.

#### 4. Prasarana Lainnya

##### a. Kondisi Lingkungan Permukiman

Kondisi bangunan rumah tinggal di Kelurahan Tallo beraneka ragam hal ini disebabkan oleh kondisi geografisnya yang beraneka ragam pula, untuk di daerah dataran bentuk rumah adalah rumah batu 1 sampai 2 lantai dengan konstruksi yang sudah umum digunakan.

Pada umumnya kondisi bangunan rumah yang terdapat di Lokasi Penelitian yaitu berbentuk rumah panggung dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya, bentuk bangunan rumah yang terdapat di kawasan prioritas dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 4. 27 Kondisi Bangunan Rumah di Lokasi Penelitian**

No.	Jenis Bangunan Rumah	Jumlah	Presentase (%)
1	Batu 1 Lantai	32	27.59
2	Batu 2 Lantai	2	1.72
3	Panggung 1 Lantai	51	43.97
4	Panggung 2 Lantai	26	22.41
	<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015*

##### b. Pemerintahan

Sarana Pemerintahan di Kelurahan Tallo hanya berupa Kantor Kelurahan Tallo yang menjadi Pusat Pemerintahan Kelurahan, melaksanakan kegiatan administrasi yang dapat memperlancar aktifitas masyarakat dengan Pemerintah setempat. Pada kawasan Prioritas tidak terdapat sarana pemerintahan.

**c. Pendidikan**

Sarana pendidikan di Kelurahan Tallo terdiri dari : 1 Unit Taman Kanak-kanak, 1 Unit Sekolah Dasar, 1 Unit Madrasah Tsanawiyah (SMP) dan Madrasah Aliyah (SMA). Untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah berada pada satu lokasi.

**d. Kesehatan**

Sarana Kesehatan yang ada di Kelurahan Tallo hanya berupa 5 unit Posyandu di 5 RW dalam wilayah Kelurahan Tallo dan tidak ada Puskesmas Pembantu.

**e. Peribadatan**

Untuk sarana peribadatan terdapat 4 buah Masjid, dimana sebagian besar masyarakat kelurahan Tallo beragama Islam. Selain itu, juga terdapat Taman Pendidikan Al-Qur'an yang lokasinya berada di Baruga.

**f. Ruang Terbuka Hijau**

Untuk Ruang Terbuka Hijau di lokasi penelitian sangat minim, hanya ada beberapa tanah atau lahan kosong di beberapa titik tertentu, itu pun ukurannya sempit, akan tetapi masih bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka yang ada kondisinya tidak terawat, namun anak-anak di sekitar kawasan ini masih menggunakan ruang terbuka tersebut untuk bermain.

**g. Pemanfaatan lahan**

Pemanfaatan lahan pada lokasi penelitian sebagian besar diisi oleh permukiman kumuh. Berdasarkan pemetaan swadaya pada

tahun 2014 bahwa luas kawasan prioritas 4,2 Ha, 57% permukiman, 2,3% Ruang terbuka serta 38% Pesisir pantai.

Pada wilayah penelitian tersebut terdapat fungsi lahan permukiman dan fasum. Adapun penggunaan lahannya adalah sebagai berikut :

- Permukiman (Bangunan Rumah) :  $\pm$  1.3 Ha
- Fasum/Jalan :  $\pm$  1.0 Ha
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) :  $\pm$  0.8 Ha
- Pesisir Pantai :  $\pm$  1.1 Ha

**Tabel 4.28 Kondisi Peruntukan Bangunan di Lokasi Penelitian**

No	Peruntukan Bangunan	Jumlah	%
1	Rumah Tinggal	103	94.50
2	Rmh Warung/Toko	3	0.92
3	Fungsi Lain	5	4.59
<b>Total</b>		<b>111</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015

#### h. Kepemilikan Lahan

**Tabel 4.29 Kondisi Kepemilikan Lahan di Lokasi Penelitian**

No	Status Lahan	Jumlah	%
1	Hak Milik	71	63.96
2	Hak Pakai	29	26.13
3	Belum Bersertifikat	9	8.11
4	Tanah Negara	2	1.80
<b>Total</b>		<b>111</b>	<b>100</b>

Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015

### 5. Kondisi Perekonomian

Di lokasi penelitian jenis mata pencahariannya sangat beragam, mulai dari Nelayan PNS, Tukang las, Buruh, Pedagang dll. Sebagian besar masyarakatnya adalah dalam usia pelajar. Sedangkan untuk para

ibu-ibu yang ada di kawasan prioritas hampir 100% berprofesi sebagai IRT. Angka pengangguran di kawasan prioritas ini cukup tinggi yaitu mencapai 8.5%. Berikut merupakan Jenis Pekerjaan Masyarakat di Kawasan Prioritas

**Tabel 4. 30 Jenis Pekerjaan Penduduk di Lokasi Penelitian**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS Guru	1	0.2
2	Tukang Jahit	1	0.2
3	Tukang Las	5	0.9
4	Supir	3	0.6
5	Montir bengkel	3	0.6
6	Nelayan	16	3
7	Buruh	19	3.6
8	Pensiunan	3	0.6
9	Pengangguran	45	8.5
10	Bidan/perawat	5	0.9
11	IRT	120	22.6
12	Honoror	3	0.6
13	Pelajar	126	23.8
14	Lainnya	107	20.2
15	Belum usia kerja	45	8.5
16	PNS Kantoran	1	0.2
17	TNI/POLRI	1	0.2
18	Pengusaha	3	0.6
19	Pedagang	21	4
20	Tukang Batu	2	0.4
21	Total	530	100

Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015

Dari mata pencaharian masyarakat yang ada di kawasan ini, kita dapat melihat tingkat pendapatan masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada table di bawah.

**Tabel 4. 31 Kondisi Pendapatan Masyarakat di Lokasi Penelitian**

No	Pendapatan	Jumlah	%
1	<500.000	9	8.18
2	500.000-1.000.000	39	35.45
3	1.000.000-2.000.000	50	44.55
4	>2.000.000	13	11.82
<b>Total</b>		<b>111</b>	<b>100</b>

Sumber : Dokumen RTPLP-PLPBK Kelurahan Tallo, Bappeda Makassar 2015

Selain itu dari segi jumlah pendapatan masyarakat di kawasan prioritas sebagian besar berkisar di bawah Dua juta rupiah perbulan. Dari jumlah pendapatan yang diketahui, tingkat perbandingan pengeluaran dan pendapatan masyarakat juga perlu diketahui, dibawah ini merupakan kondisi pengeluaran setiap KK yang berada di kawasan prioritas.

#### **6. Kondisi Sosial Masyarakat**

Sumber daya manusia yang berusaha di dalam penangkapan ikan di laut yaitu nelayan, pedagang ikan dan pengolah ikan yang tersebar di 5 RW Kelurahan Tallo. Jika dilihat dari perkembangan jumlah Nelayan di Kelurahan Tallo yang cenderung meningkat rata-rata 3,5% setiap tahunnya, maka keadaan nelayan cukup potensial untuk diberdayakan. Ditinjau jumlah penduduknya, Kelurahan Tallo memiliki potensi SDM sangat beragam dengan usia produktif 15-60 tahun atau sekitar 80,62% dengan tingkat Pendidikan terbanyak adalah SLTP/Sederajat, Masyarakat Tallo juga masih menjaga Potensi Budaya yang dimilikinya antara lain Tradisi **Gandrang Bulo** dan lainnya.

### C. Pengaruh Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Penelitian

Pengaruh Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial ekonomi berdasarkan Variabel dan indikator yang disusun sedemikian rupa untuk menjawab rumusan permasalahan yang menjadi bagian dari penelitian ini, adapun gambaran variabel beserta indikator dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Untuk menjawab Rumusan Permasalahan Pertama dipakai variabel berikut:

**Tabel 4.32 Indikator Variabel Penelitian**

<b>Variabel Dependen/Terikat (Y)</b>	<b>Variabel Independen/Bebas (X)</b>
Kondisi Sosial Ekonomi	Penanganan Permukiman Kumuh /
Indikator Penilaiannya adalah :	Peningkatan Kualitas Lingkungan.
a. Struktur Sosial	Indikatornya, Kondisi Perbaikan
b. Peran dan Posisi Sosial dalam Masyarakat	Fisik Lingkungan Meliputi :
c. Pola Interaksi Sosial Masyarakat	a. Perbaikan dan Rehabilitasi Jalan
d. Mobilitas Sosial dan Pergeseran Struktur Penduduk Masyarakat	Lingkungan
e. Tingkat Kesejahteraan	b. Perbaikan dan Rehabilitasi
f. Pendapatan	Rumah Masyarakat
g. Lapangan Usaha dan Pekerjaan	c. Perbaikan dan Rehabilitasi
	Drainase
	d. Pembuatan WC/Jamban
	Keluarga
	e. Pembuatan Taman / RTH

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017*

#### 1. Pengaruh Terhadap Kondisi Sosial

Pengaruh penanganan permukiman kumuh dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penanganan permukiman kumuh tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan indikator yang telah disusun diatas. Adapun secara terperinci pengaruh tersebut digambarkan sebagai berikut :

**a. Pengaruh terhadap Variabel Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Indikator Struktur Sosial Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Fisik Permukiman.**

Kondisi sosial ekonomi yang dijadikan indikator pengaruhnya perbaikan jalan adalah terhadap struktur sosial, peran dan posisi sosial dalam masyarakat, pola interaksi sosial, mobilitas sosial, tingkat kesejahteraan, pendapatan serta lapangan usaha dan pekerjaan. Pengukurannya adalah bagaimana pengaruhnya perbaikan jalan tersebut terhadap kondisi sosial masyarakat pada lokasi penelitian ORW 4, RT. A dan RT B Kelurahan Tallo Kota Makassar

**Tabel 4.33**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Pekerjaan)**

<b>N O</b>	<b>KONDISI PEKERJAAN</b>	<b>FREKUEN SI</b>	<b>PRESENTAS E (%)</b>
1	SEDIKIT MENGUNTUNGKAN KARNA IKUT TERLIBAT BEKERJA DALAM KEGIATAN TERSEBUT	6	7.41
2	SEDIKIT MENGUNTUNGKAN DAPAT MEMBUKA USAHA WARUNG DI SEKITAR TAMAN BERMAIN	9	11.11
3	TIDAK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN / PENDAPATAN TETAP TIDAK MENINGKAT	4	4.94
4	PEKERJAAN MASIH TETAP SAMA	3	3.70
5	KEGIATAN TERSEBUT, TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	59	72.84
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Dari tabel tersebut diatas digambarkan bahwa adanya kegiatan perbaikan jalan tidak memengaruhi kondisi pekerjaan masyarakat terlihat dari jawaban responden yaitu Kegiatan Tersebut Tidak Berhubungan



dengan Bidang Pekerjaan sebesar 59 %, ada sedikit pengaruh namun tidak signifikan melihat presentase jawabannya yaitu Sedikit Menguntungkan Karena ikut terlibat dalam Kegiatan Tersebut sebagai Buruh sebanyak 7,41%. Dan adapula yang memberi respon tidak meningkatkan perekonomian / pendapatan tetap tidak meningkat sebanyak 4,94%.

**Tabel 4. 34**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Pekerjaan Tambahan)**

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN TAMBAHAN</b>	<b>FREKUENS I</b>	<b>PRESENTAS E (%)</b>
1	MENJAHIT	1	1.23
2	WARUNG / DAGANG	6	7.41
3	PERBAIKAN LISTRIK	1	1.23
4	GURU MENGAJI	1	1.23
5	JUAL IKAN	3	3.70
6	TIDAK ADA	69	85.19
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Dari tabel diatas presentase jawaban responden disimpulkan bahwa kegiatan penanganan permukiman kumuh tidak memengaruhi dan tidak meningkatkan pekerjaan tambahan responden terlihat dari jawaban responden sebanyak 85,19 % menjawab tidak ada pekerjaan tambahan. Sementara pekerjaan tambahan yang ada adalah umumnya mereka telah miliki jauh sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan.

**Tabel 4. 35**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Kepemilikan Kedudukan, Jabatan Formal dan Informal dalam Masyarakat)**

NO	JABATAN/KEDUDUKAN FORMAL DAN INFORMAL SERTA KEDUDUKAN PENTING DALAM MASYARAKAT	FREKUENS I	PRESENTASE (%)
1	KETUA RT	2	2.47
2	KETUA KSM	1	1.23
3	TIDAK ADA	78	96.30
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Berdasarkan jawaban responden terkait kepemilikan jabatan dan kedudukan penting baik formal maupun informal dalam masyarakat sebanyak 96,30% menjawab tidak ada. Sementara 3,70% menjawab ada yaitu sebagai ketua RT dan ketua BKM.

**Tabel 4. 36**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Faktor yang berpengaruh menjadikan Status Sosial dalam Masyarakat)**

NO	FAKTOR YANG BERPERAN MENJADIKAN STATUS SOSIAL DALAM MASYARAKAT	FREKUENS I	PRESENTAS E (%)
1	PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN YANG TINGGI	36	44.44
2	KEMAMPUAN SECARA EKONOMI	41	50.62
3	PEKERJAAN	4	4.94
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Berdasarkan tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terhadap kondisi status sosial dalam masyarakat adalah Kemampuan Secara Ekonomi sebesar

50,62% dan Faktor Pendidikan dan Pengetahuan yang tinggi sebesar 44,44% sisanya adalah Pekerjaan sebesar 4,94%.

**Tabel 4. 37**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat)**

NO	PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	TIDAK MEMENUHI, KARNA TIDAK ADA KERJA TAMBAHAN	15	18.52
2	KURANG MEMENUHI, BANYAK KEBUTUHAN DAN PENGELUARAN	46	56.79
3	SAMA SAJA DENGAN SEBELUMNYA / DARI DULU	2	2.47
4	KURANG TERPENUHI, KARNA BANYAK YANG HARUS DIPENUHI	16	19.75
5	YA TERPENUHI, KARNA MASIH BEKERJA	2	2.47
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Berdasarkan hasil tabel diatas diperoleh bahwa kondisi pemenuhan kebutuhan masyarakat cenderung kurang memenuhi, dilihat dari presentase sebesar 56,79. Kondisi ini terkait banyaknya kebutuhan dan pengeluaran. Dan kurang terpenuhi karena banyaknya kebutuhan sebesar 19,75%. Sementara yang menjawab terpenuhi dengan alasan karena masih berpenghasilan atau bekerja sebesar 2,47%. Dan sama sekali tidak memenuhi sebesar 18,52%.

**Tabel 4. 38**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Perbedaan Warga Mampu dan Tidak Mampu)**

NO	KONDISI PERBEDAAN WARGA MAMPU DAN TIDAK MAMPU	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN	50	61.73
2	PERBEDAAN HANYA TERKAIT DENGAN KONDISI RUMAH	26	32.10
3	TERHADAP PELUANG USAHA DAN MODAL	5	6.17
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa kondisi perbedaan warga mampu dengan tidak mampu dengan adanya kegiatan ini didapatkan nilai 64,73% perbedaanya terletak pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari saja, 32,10% perbedaannya hanya terkait kondisi fisik rumah, 6,17% terkait peluang usaha karena yang mampu memiliki modal.

**Tabel 4. 39**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Struktur Sosial Masyarakat (Kondisi Perbedaan Warga Mampu dan Tidak Mampu)**

NO	PERBEDAAN INTERAKSI WARGA MAMPU DENGAN WARGA TIDAK MAMPU	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
1	SAMA SAJA, TIDAK ADA PERBEDAAN DALAM INTERAKSI	15	18.52
2	TIDAK MEMANDANG STATUS/KELAS SOSIAL SEMUA WARGA SAMA	33	40.74
3	MASIH TETAP BERINTERAKSI BERSAMA	29	35.80
4	WARGA MAMPU KURANG BERINTERAKSI	4	4.94
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>59.26</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

**b. Pengaruh terhadap Variabel Kondisi Sosial Masyarakat dengan Indikator Peran dan Posisi Sosial Masyarakat terhadap Penanganan Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Fisik Permukiman.**

Kondisi sosial ekonomi dengan indikator peran dan posisi sosial masyarakat didapati dari uraian tabulasi terhadap kondisi peran dan posisi masyarakat dalam kelembagaan dan kegiatan, serta peran aktif masyarakat dalam kelembagaan dan kegiatan.

**Tabel 4. 40**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Peran dan Posisi Sosial Masyarakat (Kondisi Peran dan Posisi Masyarakat dalam Kelembagaan dan kegiatan)**

NO	PERAN DAN POSISI DALAM KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1	SEBAGAI MASYARAKAT BIASA	7	8,64
2	PARTISPAN / IKUT MEMBANTU SAJA	19	23,46
3	BERPERAN KARENA TENAGA DIBUTUHKAN	4	4,94
4	IKUT MEMBANTU JIKA TIDAK MELAUT	10	12,35
5	TIDAK ADA ( MENIKMATI SAJA)	41	50,62
	<b>JUMLAH RESPONDEN</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Dari tabel diatas didapatkan nilai 23,46% hanya sebagai partipan saja / ikut membantu saja dalam kegiatan dan organisasi, ada pula yang ikut berperan karena memang tenaganya dibutuhkan senilai 4,94%, karena umumnya masyarakat ada nelayan maka waktu luangnya dipergunakan untuk ikut berperan dalam kelembagaan dan kegiatan jika kegiatan utamanya sebagai nelayan tidak berjalan didapati nilai sebesar 12,35%, namun adapula yang hanya menikmati saja kondisi tersebut

senilai 50,62% dan berposisi sebagai masyarakat biasa yang pasif sebesar 8,64%. Sementara tingkat keaktifan masyarakat dalam kegiatan digambarkan dengan nilai 35,80% itu aktif sementara yang tidak aktif senilai 64,20% dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 4. 41**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Peran dan Posisi Sosial Masyarakat (Kondisi Peran aktif Masyarakat dalam Kelembagaan dan kegiatan)**

NO	KONDISI PERAN AKTIF DALAM KEMASYARAKATAN DAN KEGIATAN DILINGKUNGAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	YA, AKTIF	29	35,80
2	TIDAK AKTIF	52	64,20
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

***c. Pengaruh terhadap Variabel Kondisi Sosial Masyarakat dengan Indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat terhadap Penanganan Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Fisik Permukiman.***

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan indikator pola interaksi sosial masyarakat didapatkan dalam uraian tabulasi terhadap kondisi relasi/hubungan tetangga, interaksi saling berkunjung dan saling membantu, kondisi kekerabatan dan kekeluargaan yang terjalin, kondisi status sosial dalam interaksi dan kerjasama, kondisi interaksi sesama warga, kondisi bertukar informasi dan pola kerjasama yang terbangun serta pergeserannya.

**Tabel 4. 42**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi Relasi / Hubungan tetangga dalam masyarakat)**

NO	BAGAIMANA RELASI / HUBUNGAN KE TETANGGA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	CUKUP BAIK	5	6,17
2	BAIK SAJA	8	9,88
3	BAIK	28	34,57
4	SANGAT BAIK	3	3,70
5	MASIH TERJALIN BAIK	8	9,88
6	BIASA SAJA	4	4,94
7	TETAP AKRAB	2	2,47
8	MAKIN ERAT PERSATUANNYA	12	14,81
9	LEBIH BAIK LAGI HUBUNGANNYA	8	9,88
10	SALING BANTU	2	2,47
11	MAKIN MENJAUH	1	1,23
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Dari tabulasi nilai diatas didapatkan bermacam variasi kondisi relasi / hubungan tetangga yang terjalin dalam masyarakat, namun yang paling besar responnya adalah kondisinya baik sebesar 34,57% dan yang terkecil adalah semakin menjauh sebesar 1,23%.

**Tabel 4. 43**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi interaksi saling berkunjung dan saling membantu dalam masyarakat)**

NO	INTERAKSI, SALING BERKUNJUNG DAN SALING MEMBANTU DALAM MASYARAKAT	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	MASING MASING PUNYA URUSAN	1	1,23
2	JIKA TIDAK SIBUK	23	28,40
3	KERJASAMA DALAM SEGALA HAL	10	12,35
4	KALAU ADA ACARA / KEPERLUAN	19	23,46
5	MENJAGA KEKOMPAKAN / SILATURAHMI	20	24,69
6	SALING MEMBERI INFORMASI	4	4,94
7	KARNA JALAN SUDAH BAIK	3	3,70
8	INGIN INTERKSI TAPI JAUH	1	1,23
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Dari tabel kondisi diatas didapatkan bahwa nilai interaksi saling berkunjung dan saling membantu dalam masyarakat masih terjaga dengan baik hal ini dapat dilihat dari nilai yang didapatkan yaitu 28,40% sering berkunjung jika tidak sibuk, sementara untuk nilai demi menjaga kekompakan dan silaturahmi sebesar 24,69%, dan kalau ada acara atau keperluan sebesar 23,46%. Adapun nilai pengaruh terhadap kondisi interaksi dan saling berkunjung didapatkan dari pertemuan rutin dan tidak rutin yang terselenggara didapatkan pada tabel berikutnya yaitu pertemuan nelayan sebesar 6,17%, rapat / pertemuan sosialisasi sebesar 12,35%, namun yang paling besar menggambarkan bahwa tidak ada atau tidak pernah ada pertemuan rutin yang terselenggara sebesar 60,49%. Sementara yang menjawab ada tapi tidak rutin sebesar 14,81%.

**Tabel 4. 44**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi interaksi saling berkunjung dan saling membantu dalam masyarakat)**

NO	APAKAH ADA PERTEMUAN RUTIN UNTUK MEMPERERAT KEKERABATAN DAN KEKELUARGAAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	PERTEMUAN NELAYAN	5	6,17
2	RAPAT (KERJA BAKTI, SOSIALISASI)	10	12,35
3	ADA TAPI TIDAK RUTIN	12	14,81
4	TIDAK ADA/TIDAK PERNAH	49	60,49
5	TIDAK ADA SAMA SEKALI/TIDAK TAHU	5	6,17
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Mempertegas kondisi interaksi sesama warga didapati nilai terbesar yaitu sebesar 56,79% dengan respon kadang-kadang



berinteraksi jika ada waktu luang dan ada kepentingan dan keperluan, dan selalu datang bertamu dan membantu karna lingkungan sudah baik sebesar 29,63%, sementara adapaula respon tidak pernah senilai 13,58% dengan alasan kecuali ada undangan.

**Tabel 4. 45**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi interaksi sesama warga)**

NO	KONDISI INTERAKSI SESAMA WARGA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	KADANG, KADANG KALAU ADA WAKTU / ADA KEPERLUAN / KEPENTINGAN	46	56,79
2	TIDAK PERNAH, KECUALI ADA UNDANGAN	11	13,58
3	YA, SELALU DATANG SEKEDAR BERTAMU, MEMBANTU, KARNA JALAN SUDAH BAIK	24	29,63
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Untuk respon dalam tabel dibawah disebutkan pengaruh terhadap kondisi status sosial dalam interaksi dan kerjasama, apakah memberikan pengaruh terhadap kondisi penanganan permukiman didapatkan nilai sebesar 53,09% bahwa kaya dan miskin sama saja tidak ada perbedaan yang didapati dan prinsip dalam interaksi dan kerjasama, tidak ada jarak satu sama lain sebesar 20,99%, karena perbedaan status bukan satu alasan untuk saling bekerjasama dan berinteraksi sebesar 7,41%, namun adapula yang mengaggap bahwa memang berbeda karena orang mampu/kaya hanya berinteraksi dengan sesama mereka dan ingin dihormati dan orang mampu sangat kurang mau berinteraksi dan kerjasama sebesar 14,81% dan 3,70%.

**Tabel 4. 46**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi status sosial dalam interaksi dan kerjasama)**

NO	FAKTOR KEKAYAAN BERPENGARUH TERHADAP HUBUNGAN INTERAKSI DAN KERJASAMA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	YA BERBEDA, ORANG MAMPU MENGANGGAP DIRINYA DIATAS / INGIN DIHORMATI DAN DIHARGAI	12	14,81
2	YA. ORANG MAMPU KURANG MAU BERKOMUNIKASI DAN BERINTERAKSI	3	3,70
3	TIDAK ADA JARAK SATU SAMA LAIN	17	20,99
4	KAYA MISKIN SAMA SAJA	43	53,09
5	PERBEDAAN STATUS BUKAN MENJADI ALASAN	6	7,41
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Gambaran tabel dibawah didapatkan kondisi perkembangan kekeluargaan dan kekerabatan yang terjalin dalam masyarakat yaitu terbesar dengan nilai 34,57%, dengan respon cukup baik dan baik terjalin dengan baik, sementara nilai terendah dengan nilai 4,94% dengan respon tidak akrab.

**Tabel 4. 47**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi kekerabatan dan kekeluargaan yang terjalin)**

NO	KONDISI KEKERABATAN DAN KEKELUARGAAN YANG TERJALIN DALAM MASYARAKAT	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	SALING HORMAT MENGHORMATI	2	2,47
2	BIASA SAJA, SEPERTI BIASANYA, SAMA SAJA, MASIH MUDAH BERINTERAKSI	21	25,93
3	CUKUP BAIK, BAIK, TERJALIN DENGAN BAIK	28	34,57
4	SANGAT BAIK/BAGUS, LEBIH SERING INTERAKSI	12	14,81
5	AKRAB DENGAN LAINNYA, ADA	14	17,28

	KEAKRABAN, ERAT SILATURAHMINYA		
6	TIDAK AKRAB	4	4,94
	<b>JUMLAH RESPONDEN</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Gambaran kondisi bertukar informasi dalam masyarakat yang terjalin antara lain senilai 30,86% dengan respon untuk sekedar memberi informasi dan demi menjaga silaturahmi dan keakraban, sementara respon tidak berdampak didapatkan nilai 7,41% karena tidak bertukar informasi dengan tetangga.

**Tabel 4. 48**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi bertukar informasi dalam masyarakat)**

NO	DAMPAK KEGIATAN DALAM BERTUKAR INFORMASI DENGAN TETANGGA	FREKUENS I	PRESENTASE (%)
1	AGAR LINGKUNGAN LEBIH AMAN	12	14,81
2	UNTUK SEKEDAR MEMBERI INFORMASI DAN INFORMASI SAMPAI SERTA MERATA	25	30,86
3	UNTUK BERTUKAR PIKIRAN DAN MENGINGATKAN SATU SAMA LAIN	13	16,05
4	SALING MEMBERI INFORMASI DEMI MENJALIN SILATURAHMI DAN MENJAGA KEAKRABAN	25	30,86
5	TIDAK BERDAMPAK, KAREANA TIDAK BERTUKAR INFORMASI DENGAN TETANGGA	6	7,41
	<b>JUMLAH RESPONDEN</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Sementara frekuensi bertukar informasi didapatkan dalam tabel dibawah yaitu sering dan kadang kadang menjadi respon terbesar dengan jumlah 86,42%, sementara tidak pernah dan sama sekali tidak pernah senilai 12,35% dan 1,23%

**Tabel 4. 49**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi bertukar informasi dalam masyarakat)**

NO	KONDISI BERTUKAR INFORMASI SESUDAH ADANYA KEGIATAN	FREKUENS I	PRESENTASE (%)
1	SANGAT SERING	0	0,00
2	SERING	36	44,44
3	KADANG - KADANG	34	41,98
4	TIDAK PERNAH	10	12,35
5	SAMA SEKALI TIDAK PERNAH	1	1,23
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Adapun gambaran perubahan pola kerjasama yang terjadi dalam lingkungan masyarakat didapati bahwakerjasama semakin baik untuk menjaga lingkungan tetap baik dan bersih sebesar 39,51%, dan kerjasama dan komunikasi semakin baik dan lancar sebesar 24,69%, masih terjalin dengan baik karena tetap dari dulu terjhaga dengan baik sebesar 27,16%, sementara yang merespon dengan mengatakan tidak ada kerjasama / masih kurang kerjasama yang terjalin sebesar 4,94%.

**Tabel 4. 50**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi perubahan pola kerjasama)**

NO	PERUBAHAN POLA KERJA SAMA ANTAR WARGA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	KERJASAMA SEMAKIN BAIK, UNTUK MENJAGA LINGKUNGAN TETAP BAIK DAN BERSIH	32	39,51
2	TIDAK ADA KERJASAMA /MASIH KURANG KERJASAMA	4	4,94
3	MASIH TERJALIN DENGAN BAIK, SAMA SEPERTI DULU	22	27,16
4	KERJASAMA DAN KOMUNIKASI SEMAKIN BAIK DAN LANCAR	20	24,69
5	SEMAKIN BAIK, SALING MENJAGA DAN MENGINGATKAN	3	3,70
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Adapun pola kerjasama yang terjalin meliputi antara lain gotong royong sebesar 80,25% dan kekerabatan dan kekeluargaan sebesar 11,11% sementara yang merespon tidak ada sebesar 8,64%.

**Tabel 4. 51**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi pola kerjasama)**

NO	POLA KERJASAMA WARGA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	GOTONG ROYONG	65	80,25
2	KEKERABATAN / KEKELUARGAAN	9	11,11
3	TIDAK ADA	7	8,64
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Adapun nilai pergeseran pola kerjasama yang terjadi sebesar 55,56% mengatakan telah terjadi pergeseran, sementara 41,98 mengatakan tidak terjadi pergeseran atau perubahan, dan 2,47% merespon dengan mengatakan bahwa sama saja kondisinya dengan yang dulu.

**Tabel 4. 52**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Pola Interaksi Sosial Masyarakat (Kondisi perkembangan dan pergeseran pola kerjasama)**

NO	PERKEMBANGAN DAN PERGESERAN POLA KERJASAMA DALAM MASYARAKAT	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	ADA PERGESERAN/PERUBAHAN	45	55,56
2	TIDAK ADA PERGESERAN	34	41,98
3	SAMA SAJA	2	2,47
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

**d. Pengaruh terhadap Variabel Kondisi Sosial Masyarakat dengan Indikator Mobilitas Sosial Masyarakat dan pergeseran Struktur penduduk terhadap Penanganan Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Fisik Permukiman.**

Untuk pengaruh terhadap indikator mobilitas sosial dan pergeseran struktur penduduk digambarkan dalam tabulasi perubahan hidup dan perubahan pemilikan lahan, bangunan dan komposisi penduduk.

**Tabel 4. 53**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Mobilitas sosial dan pergeseran struktur penduduk (Kondisi perubahan hidup masyarakat)**

NO	KONDISI PERUBAHAN HIDUP	FREKUENS I	PRESENTASE(%)
1	TIDAK ADA PERUBAHAN, PENDAPATAN MASIH SEPerti BIASANYA	9	11,11
2	TIDAK ADA PERUBAHAN, TETAP SAMA SEPerti BIASANYA	20	24,69
3	TIDAK BERPENGARUH, KARNA TIDAK MEMENGARUHI PENGHASILAN	37	45,68
4	ADA SEDIKIT PERUBAHAN, PENDAPATAN BERTAMBAH DENGAN ADANYA USAHA TAMBAHAN	8	9,88
5	ADA PERUBAHAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR SAJA	7	8,64
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pengaruh kegiatan terhadap perubahan hidup masyarakat diperoleh nilai terbesar yaitu 45,68% tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan karena tidak memengaruhi penghasilan dan pendapatan, sementara yang merespon dengan ada perubahan yang dirasakan walau sedikit karena adanya tambahan pendapatan melalui usaha tambahan karena lingkungan menjadi lebih

baik dan ramai sebesar 18,52% dan yang tidak merasakan adanya perubahan sebesar 35,80% dengan respon pendapatan masih tetap sama dengan sebelumnya tidak ada pengaruh perubahan yang dirasakan.

**Tabel 4. 54**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Mobilitas sosial dan pergeseran struktur penduduk (Kondisi komposisi penduduk)**

NO	PERUBAHAN KOMPOSISI DAN STRUKTUR PENDUDUK	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	MASIH TETAP SAMA	11	13,58
2	SAMA SAJA TIDAK BERUBAH	46	56,79
3	MASIH PENDUDUK LAMA	9	11,11
4	PENDUDUKNYA TETAP (WARGA ASLI)	10	12,35
5	ADA PENDATANG	5	6,17
	<b>JUMLAH RESPONDEN</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Untuk pengaruh terhadap pergeseran penduduk tidak ada pengaruhnya karena penduduk masih dominan adalah warga lama yang bermukim sebesar 93,83% dengan respon bahwa penduduk masih sama tidak berubah masih warga asli/penduduknya tetap, sementara respon dengan adanya pendatang hanya sebesar 6,17%.

**Tabel 4. 55**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator Mobilitas sosial dan pergeseran struktur penduduk (Kondisi perubahan pemilikan lahan dan bangunan)**

NO	PERUBAHAN PEMILIKAN LAHAN DAN BANGUNAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	LAHAN MASIH TETAP	22	27,16
2	TIDAK ADA MASALAH	44	54,32
3	LAHAN MILIK UMUM/PEMERINTAH	8	9,88
4	ADA YANG PINDAH	3	3,70
5	KARENA LINGKUNGAN BAIK (LAHAN AKAN MAHAL)	4	4,94

KEMUNGKINAN MENJUAL		
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Untuk kondisi pemilikan lahan dan bangunan sesuai tabel diatas digambarkan bahwa hanya kurang lebih 8,64% saja yang meresponden mengatakan bahwa ada yang pindah dan akan mulai berpikir untuk menjual lahan perkiraan lahan akan mahal karena lingkungan menjadi lebih baik, selebihnya sebesar 81,36% menjawab dengan variasi pemikiran yaitu karena lahannya masih tetap, masih hak milik tidak ada masalah dan sebagian lagi adalah lahan pemerinta yang tidak mungkin diperjualbelikan.

## **2. Pengaruh Terhadap Kondisi Ekonomi**

### ***a. Pengaruh terhadap Variabel Kondisi Ekonomi Masyarakat dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat terhadap Penanganan Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Fisik Permukiman.***

Untuk pengaruh terhadap indikator kesejahteraan digambarkan dalam tabulasi kondisi pemenuhan kebutuhan pokok, kondisi rasa aman dari bahaya fisik dan emosional, kepemilikan barang dan harta, kemampuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, kemampuan untuk membayar dan mengakses fasilitas kesehatan, persahabatn dan kasih sayang dalam keluarga dan lingkungan sekitar.



**Tabel 4. 56**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari)**

NO	KONDISI PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	BAIK, BISA MEMENUHI / MENCUKUPI	16	19,75
2	SAMA SEPERTI BIASANYA / BIASA SAJA / TETAP	3	3,70
3	TIDAK ADA PENGARUH/KURANG TERPENUHI	7	8,64
4	MASIH BUTUH TAMBAHAN	24	29,63
5	TIDAK ADA PENINGKATAN/PERUBAHAN	31	38,27
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Dari tabel diatas digambarkan bahwa kondisi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari masih bergantung pada pekerjaan dan pendapatan ini tergambar dari nilai terbesar yang ada yaitu 38,27% tidak ada peningkatan pendapatan dan masih butuh tambahan penghasilan guna pemenuhan kebutuhan pokok sebesar 29,63%, namun tidak semuanya merespon dengan negatif adapula respon baik dan bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan pokoknya dengan pendapatan yang ada sekarang sebesar 19,75%, yang menyatakan sama saja tidak ada perubahan dan pengaruh sebesar 12,34%.

**Tabel 4. 57**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi rasa aman dari bahaya fisik dan emosional)**

NO	KONDISI RASA AMAN DARI BAHAYA FISIK DAN EMOSIONAL	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	AMAN	51	62,96
2	RASA WAS WAS, JIKALAU HUJAN	4	4,94
3	LEBIH NYAMAN DAN AMAN	25	30,86
4	SANGAT AMAN	1	1,23

<b>JUMLAH RESPONDEN</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>
-------------------------	-----------	---------------

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Dari tabel diatas pengaruh terhadap kondisi rasa aman dari bahaya fisik dan emosional mengalami peningkatan dan mencapai angka 94,05%, hanya 4,94% saja masih merasa khawatir dan was was terhadap bahaya alam jika hujan turun.

Sementara pada tabel dibawah diperlihatkan bagaimana kondisi pemilikan barang dan harta yang menjawab 98,77% tidak ada barang dan harta umumnya merespon dengan sama seperti biasa tidak ada peningkatan dan perubahan karena tidak berpengaruh. Hanya 1,23% menjawab ada sedikit perubahan pemilikan barang dan harta.

**Tabel 4. 58**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi pemilikan barang dan harta)**

<b>NO</b>	<b>KEPEMILIKAN BARANG DAN HARTA</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>PRESENTASE (%)</b>
1	ADA (SEDIKIT)	1	1,23
2	TIDAK ADA (UMUMNYA MASIH SEPERTI BIASA, TIDAK ADA PENINGKATAN DAN PENGARUH)	80	98,77
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Untuk peningkatan pemilikan barang dan harta dengan adanya kegiatan diperlihatkan pada tabel berikut dimana sebesar 93,82% merespon dengan menjawab tidak ada perubahan karena tidak berpengaruh. Sementara yang ada perubahan dan pengaruh sebesar 6,17%.

**Tabel 4. 59**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi peningkatan pemilikan barang dan harta)**

NO	KONDISI PENINGKATAN KEPEMILIKAN BARANG DAN HARTA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	SANGAT ADA PERUBAHAN (ADA PERUBAHAN TAPI SEDIKIT)	0	0,00
2	BERUBAH	5	6,17
3	KURANG ADA PERUBAHAN	1	1,23
4	TIDAK ADA PERUBAHAN (TIDAK BERPENGARUH)	75	92,59
5	SANGAT TIDAK BERUBAH (TIDAK BERHUBUNGAN)	0	0,00
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Untuk tabel dibawah ini digambarkan tentang kondisi kemampuan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, responden menjawab dengan variasi namun jawaban terbanyak adalah masih kurang mampu dan tidak mampu karena kondisi biaya pendidikan mahal serta tidak mampu karena kondisi perekonomian yang rendah atau kurang. Sementara untuk kemampuan mengakses fasilitas kesehatan dengan membayar dapat dilihat pada tabel berikutnya didmana didapati pengaruhnya tidak terlalu banyak karen umumnya masih mampu berobat walaupun mahal karena kondisi dan keadaan yang mengharuskan untuk bisa sehat seniali 29,63%, kepemilikan kartu berobat gratis sebesar 17,28% dan yang kurang mampu atau tidak mampu berada pada kisaran 45,67% dengan respon berharap ada bantuan, tidak mampu secara ekonomi dan biaya berobat yang mahal.

**Tabel 4. 60**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi kemampuan untuk mengakses jenjang pendidikan lebih tinggi)**

NO	KEMAMPUAN UNTUK MENGAkses PENDIDIKAN LEBIH TINGGI	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	MAMPU, KARNA MASIH BEKERJA	25	30,86
2	KURANG MAMPU, BIAYA PENDIDIKAN MAHAL	31	38,27
3	TIDAK MAMPU, EKONOMI RENDAH	25	30,86
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

**Tabel 4. 61**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi kemampuan untuk membayar dan mengakses fasilitas kesehatan)**

NO	KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR DAN MENGAkses FASILITAS KESEHATAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	YA, ADA KARTU KIS / KARTU BEROBAT GRATIS	14	17,28
2	TERGANTUNG PELAYANAN	6	7,41
3	BERHARAP BANTUAN	1	1,23
4	TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI	16	19,75
5	BIAYA BEROBAT MAHAL	20	24,69
6	HARUS MEMBAYAR KARNA INGIN SEHAT (MAU TIDAK MAU)	24	29,63
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Untuk gambaran tabel berikut adalah tentang kondisi persahabatan dan kasih sayang dalam keluarga dengan presentase pengaruh terbesarnya sebesar 34,57 masih baik, tidak ada respon yang berpengaruh negatif hanya menggambarkan bahwa pengaruhnya sama saja kondisi sebelumnya saling menyangi dan menjaga kerukunan dengan baik sebesar 16,05%

**Tabel 4. 62**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator kesejahteraan (Kondisi persahabatan dan kasih sayang dalam keluarga dan lingkungan sekitar)**

NO	KONDISI PERSAHABATAN DAN KASIH SAYANG DALAM KELUARGA DAN LINGKUNGAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	BAIK	28	34,57
2	SANGAT BAIK	2	2,47
3	SEMAKIN ERAT, MAKIN BAIK, LEBIH RUKUN	8	9,88
4	SAMA SAJA, SALING MENYAYANGI DAN MENJAGA KERUKUNAN	13	16,05
5	MASIH TERJALIN ERAT DAN TERJALIN DENGAN BAIK	11	13,58
6	TETAP BAIK, BIASA SAJA	19	23,46
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

**b. Pengaruh terhadap Variabel Kondisi Ekonomi Masyarakat dengan Indikator Pendapatan Masyarakat terhadap Penanganan Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Fisik Permukiman.**

Untuk pengaruh terhadap indikator pendapatan digambarkan dalam tabulasi kondisi pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan pendapatan, pemilikan pendapatan lain.

**Tabel 4. 63**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator pendapatan (Kondisi pendapatan masyarakat)**

NO	KONDISI PENDAPATAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	MASIH SAMA, TIDAK ADA PENGARUH	20	24,69
2	TIDAK ADA PERUBAHAN / TETAP	48	59,26
3	YA, SEDIKIT MEMBAIK	3	3,70
4	SEDIKIT MENURUN	2	2,47
5	TIDAK MENENTU (KURANG)	8	9,88
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Berdasarkan gambar tabel diatas didapatkan bahwa pengaruh terhadap kondisi pendapatan respon yang didapatkan sebesar 59,26% menjawab tidak ada perubahan /tetap sama saja seperti sebelumnya, sedangkan respon positif sebesar 3,70% sedikit membaik, sementara yang tidak berpengaruh sebesar 24,69%.

**Tabel 4. 64**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator pendapatan (Kondisi pemenuhan kebutuhan pokok dengan kondisi pendapatan masyarakat)**

NO	PEMENUHAN KEBUTUHAN SEHARI HARI	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	TIDAK MEMENUHI, KARENA EKONOMI RENDAH/KURANG MAMPU	21	25,93
2	TIDAK MEMENUHI PEKERJAAN DAN PENGHASILAN TIDAK MENENTU	26	32,10
3	KURANG MEMENUHI, TIDAK ADA PENGHASILAN TAMBAHAN	9	11,11
4	KURANG MEMENUHI, TERGANTUNG BANYAKNYA TANGKAPAN HASIL LAUT	14	17,28
5	KURANG MEMENUHI, PENGELUARAN LEBIH BANYAK DARI PENDAPATAN	11	13,58
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Tabel pengaruh yang diuraikan diatas menggambarkan terkait pemenuhan kebutuhan pokok dengan kondisi pendapatan yang ada respon yang didapatkan adalah negatif dengan pengaruh kurang memenuhi karena tidak ada penghasilan tambahan, tergantung hasil tangkapan dan pengeluaran yang semakin meningkat sementara pendapatan tidak bertambah dengan nilai sebesar 41,97%, sedangkan yang respon tidak memenuhi karena ekonomi rendah/kurang dan penghasilan yang tidak menentu sebesar 58,03%.

Kondisi peningkatan pendapatan digambarkan pada tabel dibawah ini yaitu 83,95% respon tidak ada, karena sumber pendapatan / penghasilan bukan dari kegiatan tersebut dan tidak berhubungan dengan pekerjaan.

**Tabel 4. 65**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator pendapatan (Kondisi peningkatan pendapatan)**

NO	PENINGKATAN PENDAPATAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
1	TIDAK ADA, SUMBER PENGHASILAN BUKAN DARI KEGIATAN TERSEBUT DAN TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	68	83,95
2	TIDAK BEKERJA	10	12,35
3	TIDAK ADA PENGHASILAN LAIN	1	1,23
4	PENDAPATAN MENURUN	1	1,23
5	TIDAK ADA PERUBAHAN / SAMA SAJA	1	1,23
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Sejalan dengan presentase sebelumnya respon terhadap penghasilan tambahan / pemilikan pendapatan lain sebanyak 77,78% menjawab tidak ada atau tidak memiliki tambahan pendapatan diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 66**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator pendapatan (Kondisi pemilikan pendapatan lain)**

NO	SUMBER PENDAPATAN LAIN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	ADA	18	22,22
2	TIDAK ADA	63	77,78
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

**c. Pengaruh terhadap Variabel Kondisi Ekonomi Masyarakat dengan Indikator Kondisi Lapangan Usaha dan Pekerjaan terhadap Penanganan Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Fisik Permukiman.**

Untuk pengaruh terhadap indikator lapangan usaha dan pekerjaan digambarkan dalam tabulasi kondisi lapangan usaha dan pekerjaan, kondisi lapangan usaha dan pekerjaan dengan adanya kegiatan, lapangan usaha dan pekerjaan yang tersedia.

**Tabel 4. 67**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator lapangan usaha dan pekerjaan (Kondisi lapangan usaha dan pekerjaan)**

<b>NO</b>	<b>KONDISI LAPANGAN USAHA DAN PEKERJAAN</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>PRESENTASE (%)</b>
1	TERSEDIA LAPANGAN USAHA DAN PEKERJAAN	7	8,64
2	BANYAK WARGA YG DIPEKERJAKAN DENGAN ADANYA KEGIATAN	14	17,28
3	TIDAK BERPENGARUH / BIASA SAJA	14	17,28
4	TIDAK BERUBAH / SAMA SAJA SUSAH DAPAT KERJA	8	9,88
5	ADA PELUANG USAHA / ADA KEMUDAHAN	13	16,05
6	TIDAK ADA, HANYA MENYANGKUT PERBAIKAN LINGKUNGAN TIDAK ADA LAPANGAN USAHA	25	30,86
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017



**Tabel 4. 68**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator lapangan usaha dan pekerjaan (Kondisi lapangan usaha dan pekerjaan)**

NO	KONDISI LAPANGAN USAHA DAN PEKERJAAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	SANGAT TERSEDIA	0	0,00
2	TERSEDIA	13	16,05
3	KURANG TERSEDIA	22	27,16
4	TIDAK TERSEDIA	46	56,79
5	SANGAT TIDAK TERSEDIA	0	0,00
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Dari tabulasi diatas dapat digambarkan bahwa kegiatan tersebut membawa pengaruh positif yang tidak besar ini terlihat dari nilai yang ada sebesar 25,92% ada lapangan usaha dan pekerjaan dimana masyarakat ikut bekerja sebagai buruh dalam kegiatan tersebut, sementara peluang usaha ada terbuka sedikit ada kemudahan dengan nilai 16,05%, sementara yang merespon dengan negatif bahwa tidak ada pengaruh dan tidak ada karena menyangkut perbaikan lingkungan tidak ada lapangan usaha nilainya sebesar 40,74%, sementara yang menyebutkan tidak ada perubahan/sama saja susah untuk dapat pekerjaan 9,88%.

**Tabel 4. 69**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator lapangan usaha dan pekerjaan (Kondisi lapangan usaha dan pekerjaan yang tersedia dengan adanya kegiatan)**

NO	LAPANGAN USAHA / PEKERJAAN YANG TERSEDIA DENGAN ADANYA KEGIATAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	TIDAK ADA	52	64,20
2	ADA, BURUH BANGUNAN/TUKANG BATU	8	9,88
3	DAGANG/JUALAN/WARUNG	13	16,05
4	KURANG TAHU	3	3,70
5	USAHA INDUSTRI PERIKANAN	5	6,17
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

**Tabel 4. 70**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat indikator lapangan usaha dan pekerjaan (Kondisi lapangan usaha dan pekerjaan)**

NO	KONDISI LAPANGAN USAHA DAN PEKERJAAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	MENYERAP TENAGA KERJA/ BISA IKUT BEKERJA	16	19,75
2	BISA BERDAGANG/BUKA USAHA WARUNG/PELUANG USAHA LEBIH BAIK	28	34,57
3	TERGANTUNG KEBERADAAN MODAL DAN TEMPAT	7	8,64
4	MEMBAWA DAMPAK LEBIH BAIK	23	28,40
5	USAHA INDUSTRI PERIKANAN	7	8,64
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Dari uraian tabulasi diatas dapat digambarkan pengaruh terhadap penyediaan lapangan usaha dan pekerjaan serta lapangan usaha apa saja yang dapat terbuka dengan kegiatan tersebut didapatkan respon negatif yaitu tidak ada pengaruh karena tidak ada lapangan usaha dan pekerjaan tersedia sebesar 64,20%, sementara sisanya sebesar 32,10% menjawab ada peluang usaha dan pekerjaan diantaranya adalah sebagai buruh dalam kegiatan tersebut, berdagang/warung dan industri perikanan. Sementara dari tabel diatas juga didapatkan pengaruh terhadap kondisi pekerjaan apakah ada dampaknya terhadap lapangan usaha dan pekerjaan sebesar 19,75 menjawab menyerap tenaga kerja / bisa ikut bekerja, bisa berdagang/buka usaha warung sebesar 34,57% dan membawa dampak lebih baik sebesar 28,40%.

Berdasarkan hasil pembahasan kondisi sosial ekonomi diatas maka selanjutnya adalah menganalisisnya kedalam persamaan regresi

dengan menggunakan SPSS versi 22, Regresi linier berganda/majemuk digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan jumlah variabel independen lebih daripada satu, model matematis dalam regresi linier berganda adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Dimana

**Y** = Variabel Dependen (Nilai Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat)

**X** = Variabel Independen ( Nilai Kondisi fisik penanganan lingkungan permukiman kumuh)

**$\beta$**  = koefisien regresi

**e** = error

dengan asumsi regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

- a.  $e_i = N(0, \sigma^2)$ , error mengikuti fungsi distribusi normal
- b.  $\text{Var} = \sigma^2$  varians error konstan atau varians error bersifat homoskedastisitas (tidak ada masalah dengan heteroskedastisitas)
- c.  $\text{Cov} = 0$ , variabel diantara pengamatan error bersifat independen (tidak ada masalah otokorelasi)
- d. Tidak ada masalah multikolinieritas (terdapat korelasi tinggi diantara variabel independen)

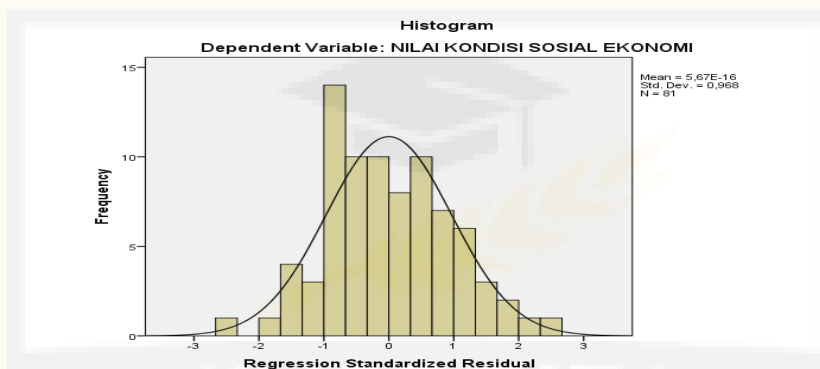
Berikut analisa dan tahapan pengujian dalam regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22 :

**a) Pemeriksaan pertama : Normalitas error**

Pemeriksaan normalitas error dalam output SPSS versi 22 dapat dilihat dari hal berikut yaitu : Distribusi Histogram, Normal PP

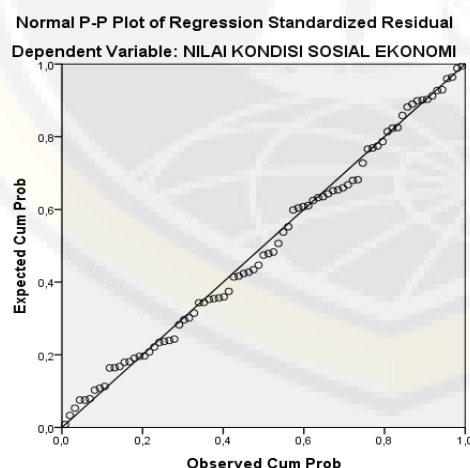
Plot of Regression Standardized Residual, dan Pengujian hipotesis standar residual melalui uji Kolmogorov-sminorv atau Shapiro Wilks.

Gambar 4.9 Grafik Histogram pemeriksaan normalitas error rumusan permasalahan pertama.



Sumber : Hasil analisa SPSS versi 22, 2017

Distribusi histogram mengikuti fungsi distribusi normal apabila berbentuk seperti Lonceng. Dari grafik tersebut, secara visual, kita bisa mengatakan bahwa distribusi histogram tersebut mengikuti distribusi normal. Untuk lebih meyakinkan karena perbedaan visualisasi dalam pandangan, maka kita melihat grafik normal PP Plot of Regression Standardized Residual berikut :



Sumber : Hasil analisa SPSS versi 22, 2017

Gambar 4. 10 Grafik Normal PP Plot of regression standardized residual rumusan permasalahan pertama

Error distribusi normal jika pencaran data terletak disekitar garis lurus miring melintang/diagonal. Melalui grafik, kita ketahui bahwa data berpencar disekitar garis lurus miring melintang sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini terpenuhi. Untuk lebih meyakinkan kita perlu melakukan pengujian hipotesis melalui uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilks.

Hipotesis :

$H_0$  = Error berdistribusi Normal

$H_1$  = Error tidak berdistribusi normal

Statistik pengujian = Uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilks

Alfa Pengujian = 5% (0,05)

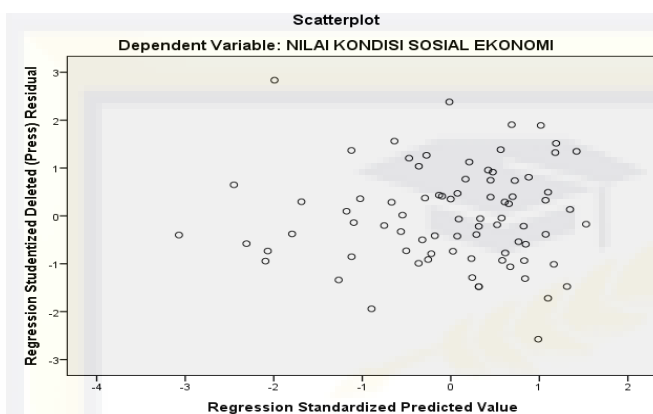
Kriteria Pengujian = ( $H_0$ ) diterima bila  $p$ -Value hasil pengujian Uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilks lebih besar ( $>$ ) daripada 5% (0,05).

Berdasarkan tabel (lihat lampiran A, tabel Test of Normality kolom sig.) diketahui bahwa  $p$ -value Uji Kolmogorov-Smirnov adalah  $0,200 > 0,05$  (atau  $p$ -value Uji Shapiro Wilks  $0,265 > 0,05$ ). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $H_0$  diterima. Oleh karena itu, asumsi error berdistribusi normal terpenuhi.

**b) Pemeriksaan kedua : error konstan (tidak ada masalah Heteroskedastistas)**

Varian error konstan untuk setiap pengamatn disebut juga homoskedastistas. Sebaliknya jika tidak konstan, maka disebut heteroskedastistas. Dengan asumsi bahwa  $H_0$  diterima jika pencaran

tidak membentuk suatu pola maka bisa dikatakan error konstan ( tidak ada masalah heteroskedastistas).



Gambar 4.11 Grafik error konstan rumusan permasalahan pertama.

Sumber : Hasil analisa SPSS versi 22, 2017

Dari hasil pengujian dengan metode grafik terlihat bahwa pencarian data bersifat acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, artinya  $H_0$  diterima (homoskedastistas) dan  $H_1$  ditolak.

### c) Pemeriksaan ketiga : ada tidaknya masalah otokorelasi

Dalam hal ini, kita mengatakan bahwa tidak ada masalah otokorelasi pada  $H_0$ , pengujian ini dapat dilakukan melalui uji Durbin Watson (nilainya dapat dilihat pada lampiran A tabel Model Summary kolom Durbin Watson). Dengan asumsi sebagai berikut :

Hipotesis :

$H_0$  = Tidak ada Otokorelasi positif dan negatif

$H_1$  = Terdapat Otokorelasi positif dan negatif

Terima  $H_0$  bila :

- Nilai  $d$  hitung atau nilai Durbin Watson Model lebih besar ( $>$ ) daripada nilai Durbin Watson tabel batas atas ( $d_U$ ) dan atau berada diantara ( $d_U < d < 4-d_U$ ).

Tolak  $H_0$  bila:

- Nilai  $d$  hitung atau nilai Durbin Watson Model lebih besar ( $>$ ) dari pada nilai Durbin Watson tabel batas bawah ( $dL$ ), yang berarti terdapat masalah otokorelasi positif ( $d < dL$ ).
- Atau, nilai  $d$  hitung atau nilai Durbin Watson Model terletak diantara nilai ( $4 - dL < d < 4$ ).

Berdasarkan tabel yang didapat dalam (lampiran A tabel Model Summary kolom Durbin Watson) didapatkan nilai Durbin Watson Hitung adalah 1,873. Sementara nilai Durbin Watson tabel dengan jumlah data  $n = 80$  adalah  $dL = 1,507$  dan  $dU = 1,772$ . Oleh karena itu nilai Durbin Watson hitung ( $d = 1,873$ ) lebih besar daripada batas atas nilai Durbin Watson tabel ( $dU = 1,772$ ) dan nilai Durbin Watson hitung berada diantara nilai ( $dU < d < 4 - dU = 1,772 - 2,228$ ). Maka kita dapat menerima  $H_0$  yang artinya tidak terdapat otokorelasi positif dan negatif

**d) Pemeriksaan keempat : tidak ada masalah multikolinieritas**

Pemeriksaan ini dapat dilihat pada nilai VIF (Lihat lampiran A tabel coefficients kolom VIF) Nilai VIF  $> 10$  menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, (Gujarati dalam sofyan yamin,dkk, 2010: 36). Berdasarkan hasil nilai yang didapatkan dalam tabel, nilai VIF untuk variabel perbaikan jalan adalah 1,133. Variabel perbaikan rumah 1,473. Variabel perbaikan drainase 1,136. Variabel pembuatan wc/jamban keluarga 1,372. Variabel pembuatan taman / rth 1,352. Semua nilai variabel tersebut lebih kecil ( $<$ ) daripada 10, dengan

demikian, dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Selanjutnya setelah asumsi regresi terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian koefisien regresi yang meliputi pengujian keterandalan model (Uji F) dan pengujian Koefisien Regresi (Uji T) serta Koefisien Determinasi.

**a. Pengujian keterandalan model (Uji F) dengan hipotesis sebagai berikut :**

**H<sub>0</sub> diterima jika :** jika nilai koefisien regresi lebih besar dari ( $>$ ) 0,05, berarti secara bersama sama, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**H<sub>1</sub> ditolak jika :** jika nilai koefisien regresi atau lebih kecil daripada ( $<$ ) 0,05, berarti secara tidak bersama sama atau terdapat satu atau sebagian variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan, statistik pengujian : nilai signifikansi, dalam tabel Anova (lihat lampiran A tabel Anova kolom sig.). Dengan alfa pengujian : 5% (0,05).

Oleh karena nilai signifikansi (sig.) statistik didapat  $0,000 < 0,005$ . Maka kita menolak H<sub>1</sub> yang artinya secara tidak bersama sama atau terdapat satu atau sebagian variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



**b. Pengujian Koefisien Regresi (Uji T) dengan hipotesis sebagai berikut :**

**H<sub>0</sub> diterima jika :** jika nilai koefisien regresi variabel independen lebih besar dari ( $>$ ) 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**H<sub>1</sub> ditolak jika :** jika nilai koefisien regresi variabel independen atau lebih kecil daripada ( $<$ ) 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan, statistik pengujian : nilai signifikansi, dalam tabel coefficients (lihat lampiran A tabel coefficients kolom sig.) dan besarnya pengaruh terdapat pada tabel coefficients kolom standardize coefficients beta. Dengan alfa pengujian : 5% (0,05).

Berdasarkan hasil nilai didapatkan untuk variabel independen perbaikan kondisi jalan adalah  $0,498 > 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen kondisi perbaikan jalan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk variabel independen perbaikan rumah adalah  $0,003 < 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen perbaikan rumah mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk variabel independen perbaikan drainase adalah  $0,745 > 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen perbaikan drainase tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk variabel independen pembuatan

wc/jamban adalah  $0,386 > 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen pembuatan wc/jamban tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk variabel independen pembuatan taman/rth adalah  $0,025 < 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen pembuatan taman/rth mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen kondisi sosial ekonomi masyarakat.

### **c. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi merupakan proporsi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam hal ini nilai koefisien determinasi dapat di ukur melalui nilai R Square dan Adjust R Square (lihat lampiran A, Model Summary kolom R Square dan adjust R square), karena variabel dependent adalah lebih dari satu maka diambil nilai Adjust R Square yaitu 0.282, maka proporsi nilai pengaruh variabel penanganan permukiman kumuh tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat hanya sebesar 28,2% saja sedangkan sisanya sebesar 71,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam model regresi dalam penelitian ini.

Model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 43,264 + 0,288 X_1 + 1,094 X_2 + (-0,131) X_3 + 0,355 X_4 + 0,775 X_5 + 6,645$$

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan diatas menggambarkan bahwa teori dasar yang dipergunakan dalam mengkaji pengaruh perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial

ekonomi masyarakat berdasarkan teori kebutuhan yang dirumuskan oleh Maslow (dalam batara surya, 41; 2011), dimana pada intinya menyebutkan bahwa individu bergerak menaiki tingkat hirarki berdasarkan pada pemenuhan kebutuhannya. Jadi pengaruh yang dihasilkan oleh intervensi fisik kedalam lingkungan permukiman bukan merupakan kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi peningkatan nilai sosial ekonomi masyarakat, hal ini didapatkan dari analisa yang dilakukan bahwa umumnya masyarakat tidak mendapatkan manfaat perubahan secara sosial dan ekonomi dalam lingkungannya.

#### **D. Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Penelitian**

Analisa Pengaruh Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial ekonomi berdasarkan Variabel dan indikator yang disusun sedemikian rupa untuk menjawab rumusan permasalahan yang menjadi bagian dari penelitian ini, adapun gambaran variabel beserta indikator dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Untuk menjawab Rumusan Permasalahan Pertama dipakai variabel berikut:

**Tabel 4.71 Indikator Variabel Penelitian**

<b>Variabel Dependen/Terikat (Y)</b>	<b>Variabel Independen/Bebas (X)</b>
Penanganan Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Lingkungan. Indikatornya, Kondisi Perbaikan Fisik Lingkungan Meliputi :	Efektivitas Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh. Indikatornya meliputi:
a) Perbaikan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan	a. Pemahaman Program Kegiatan
b) Perbaikan dan Rehabilitasi Rumah Masyarakat	b. Pencapaian Tujuan
c) Perbaikan dan Rehabilitasi Drainase	c. Target Waktu Pelaksanaan
	d. Terbentuk dan Berfungsinya Kelembagaan
	e. Kepuasan Layanan Akses dan

d) Pembuatan WC/Jamban Keluarga	Pemenuhan	Kebutuhan
e) Pembuatan Taman / RTH	lingkungan Masyarakat	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017

### 1. Pemahaman Terhadap Program Kegiatan

Berdasarkan tabel dibawah dapat diuraikan bahwa pemahaman responden terhadap program dan kegiatan yang terlaksana mencapai 83,95%, yang menjawab paham menurut responden umumnya mengatakan bahwa mereka ada yang terlibat sebagian, ada yang mendapatkan kegiatan secara langsung dan juga kegiatan tersebut berlangsung pada lingkungan mereka, sedangkan yang kurang paham sebesar 9,88%, untuk yang tidak paham sebesar 6,17%, umumnya responden yang kurang paham dan tidak paham mengatakan bahwa tidak pernah ikut dalam kegiatan rapat maupun sosialisasi.

**Tabel 4. 72**  
**Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator pemahaman program dan kegiatan**

NO	PEMAHAMAN PROGRAM DAN KEGIATAN	FREKUE NSI	PRESENTAS E (%)
1	SANGAT PAHAM	0	0,00
2	PAHAM	68	83,95
3	KURANG PAHAM	8	9,88
4	TIDAK PAHAM	5	6,17
5	SANGAT TIDAK PAHAM	0	0,00
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

## 2. Pencapaian Tujuan Kegiatan

Selanjutnya untuk indikator pencapaian tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah, responden umumnya mengatakan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama yaitu sebesar 46,91% pandangan responden umumnya menyampaikn bahwa telah berjalan dengan arahan dan aturan serta masukan dari warga disekitar lokasi penelitian, sementara angka kurang sesuai dan tidak sesuai yang bernilai sebesar 38,27% dan 14,81% didapatkan berdasarkan pandangan masyarakat bahwa kekurangsesuaian tersebut dikarenakan tidak meratanya kegiatan yang ada, masih ada beberapa kondisi yang jauh dari harapan.

**Tabel 4. 73**  
**Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan pencapaian tujuan program dan kegiatan**

NO	PENCPAIAN TUJUAN YANG DITETAPKAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	SANGAT SESUAI	0	0,00
2	SESUAI	38	46,91
3	KURANG SESUAI	31	38,27
4	TIDAK SESUAI	12	14,81
5	SANGAT TIDAK SESUAI	0	0,00
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

## 3. Pencapaian Target Waktu Pelaksanaan

Untuk indikator pencapaian target waktu pelaksanaan didapatkan nilai sesuai dengan target waktu sebesar 40,74% sedangkan kurang sesuai target sebesar 11,11% dan tidak sesuai target sebesar 48, 15%.

**Tabel 4. 74**  
**Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator pencapaian target waktu pelaksanaan kegiatan**

NO	TARGET KEGIATAN YANG DITETAPKAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	SANGAT SESUAI TARGET	0	0,00
2	SESUAI TARGET	33	40,74

3	KURANG SESUAI TARGET	9	11,11
4	TIDAK SESUAI TARGET	39	48,15
5	SANGAT TIDAK SESUAI TARGET	0	0,00
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

#### 4. Terbentuk Dan Berfungsinya Kelembagaan

Untuk indikator terbentuknya kelembagaan dan berfungsi dengan baik, umumnya responden menjawab ada kelembagaan dan berjalan sebesar 53,09%, sedangkan yang menjawab tidak ada sebesar 38,27% dan nilai sebesar 8,64 menjawab tidak tahu.

**Tabel 4. 75**  
**Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator terbentuk dan berfungsinya kelembagaan**

NO	ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROGRAM	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	ADA	43	53,09
2	KURANG TAHU	7	8,64
3	TIDAK ADA	31	38,27
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

#### 5. Kepuasan Terhadap Layanan Akses Dan Pemenuhan Kebutuhan Lingkungan Masyarakat

Untuk indikator pemanfaatan terhadap akses dan layanan, dapat dilihat dalam tabel 4.73 bahwa umumnya responden mengatakan bahwa kegiatan tersebut memenuhi hanya sebesar 35,80% nilai ini didapatkan dari resume responden yang umumnya mengatakan bahwa kegiatan tersebut telah membawa perubahan terhadap lingkungan sekitar menjadi lebih baik, sedangkan untuk respon yang kurang memenuhi sebesar 49,38% dan tidak memenuhi sebesar 14,81% hal ini dikarenakan umunya

respon yang didapatkan adalah karena kegiatan yang berlangsung belum menyeluruh, dan kegiatan tersebut menyisakan permasalahan lain yaitu menimbulkan banjir baru di dalam rumah warga akibat kondisi jalan yang lebih tinggi dari rumah dan drainase yang tertutup menyulitkan untuk dilakukan pembersihan secara rutin.

**Tabel 4. 76**  
**Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator pemenuhan akses dan harapan masyarakat**

NO	PEMENUHAN AKSES DAN HARAPAN MASYARAKAT	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	SANGAT MEMENUHI	0	0,00
2	MEMENUHI	29	35,80
3	KURANG MEMENUHI	40	49,38
4	TIDAK MEMENUHI	12	14,81
5	SANGAT TIDAK MEMENUHI	0	0,00
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

**Tabel 4. 77**  
**Presentase Jawaban Responden Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh terhadap penurunan tingkat kekumuhan indikator pilihan pemenuhan kebutuhan lingkungan dan masyarakat**

NO	KEGIATAN YANG TERLAKSANA MERUPAKAN KEGIATAN YANG PALING DIBUTUHKAN MASYARAKAT	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	SANGAT DIBUTUHKAN	51	62,96
2	DIBUTUHKAN	29	35,80
3	KURANG DIBUTUHKAN	0	0,00
4	TIDAK DIBUTUHKAN	1	1,23
5	SANGAT TIDAK DIBUTUHKAN	0	0,00
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Gambaran dampak perubahan atas perbaikan jalan yang dirasakan masyarakat dapat dilihat dari tabel dibawah, yang menunjukkan bahwa angka persentase tertinggi senilai 37, 04 % mengatakan bahwa kondisi jalan lebih nyaman untuk akses dan beraktifitas serta jalan dan lingkungan

menjadi lebih bersih dan rapi. Sementara yang mengatakan kurang berdampak sebesar 12,35% mengatakan bahwa rumah menjadi banjir karena jalan menjadi lebih tinggi akibat air tidak mengalir dengan baik di saluran pembuangan.

**Tabel 4. 78**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Perbaikan dan Rehabilitasi Jalan terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh**

NO	DAMPAK PERBAIKAN JALAN	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	MENGURANGI AIR TERGENANG DIJALAN	7	8.64
2	JALAN BECEK BERKURANG JIKA HUJAN / JALAN BAIK TIDAK BECEK DAN LEBIH NYAMAN TIDAK BANYAK GENANGAN	4	4.94
3	LEBIH NYAMAN UNTUK AKSES DAN BERAKTIFITAS	30	37.04
4	JALAN DAN LINGKUNGAN MENJADI BERSIH DAN RAPI	30	37.04
5	KURANG BERDAMPAK, RUMAH KEBANJIRAN JIKA HUJAN ( JALAN LEBIH TINGGI DARIRUMAH )	10	12.35
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017*

Untuk dampak terhadap perbaikan dan rehabilitasi rumah masyarakat umumnya mengatakan bahwa rumah sekarang menjadi lebih nyaman, aman, bersih, indah dan sangat baik senilai 48,15% sementara yang mengatakan tidak berdampak senilai 27,16% hal ini didapatkan dari responden yang tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah, secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 4. 79**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Perbaikan dan Rehabilitasi Rumah terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh**

NO	DAMPAK PERBAIKAN DAN REHABILITASI RUMAH	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN KARENA BISA MENGGANTI YANG RUSAK/RAPUH/KURANG BAIK	5	6.17
2	RUMAH TIDAK LAGI BOCOR DAN KEHUJANAN	4	4.94
3	RUMAH MENJADI LEBIH NYAMAN UNTUK DIHUNI	11	13.58
4	LEBIH NYAMAN DAN AMAN, BERSIH, INDAH DAN SANGAT BAIK (LINGKUNGAN MENJADI BERSIH)	39	48.15
5	TIDAK ADA DAMPAK, KARENA TIDAK MENDAPAT BANTUAN	22	27.16
	<b>JUMLAH RESPONDEN</b>	<b>81</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Sementara dampak yang dirasakan masyarakat terhadap perbaikan dan rehabilitasi drainase umumnya bervariasi, bahkan dari hasil respon masyarakat yang didapatkan senilai 53,09% mengatakan tidak berdampak hal ini diakibatkan karena air masih menggenang jika musim hujan, dengan kondisi drainasenya yang banyak tersumbat atau tertutup sampah dan sedimen. Sementara yang merasakan dampak yang lebih baik hanya senilai 27,16% hal ini diungkapkan karena kondisi drainase yang sudah baik dan tertutup.

**Tabel 4. 80**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Perbaikan dan Rehabilitasi Drainase terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh**

NO	DAMPAK PERBAIKAN DAN REHABILITASI DRAINASE	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	YA BAIK, SEDIKIT MENGURANGI GENANGAN / DRAINASE SUDAH BAIK	22	27.16
2	BELUM BERDAMPAK, DRAINASE TERTUTUP SUSAH UNTUK DIBERSIHKAN	2	2.47

3	BELUM BERDAMPAK, MASIH BECEK KALAU HUJAN TURUN ( DAERAH PESISIR PANTAI)	5	6.17
4	TIDAK BERDAMPAK, KARENA AIR MASIH MENGENANG JIKA TURUN HUJAN	43	53.09
5	TIDAK TAHU, KARENA MASIH ADA BANJIR JIKA HUJAN	9	11.11
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Untuk dampak pembuatan WC/jamban keluarga yang dirasakan masyarakat didapat nilai sebesar 43,21% dan 13,58% warga sudah tidak buang air sembarangan sehingga tidak lagi mencemari lingkungan kesehatan terjaga dengan baik dan yang paling utama adalah warga sudah memiliki WX/jamban sendiri, sementara yang belum merasakan dampaknya akibat belum mendapatkan bantuan pembuatan WC/jamban serta karena masih ada yang perlu diperbaiki terkait penyediaan yang menyeluruh dan penyediaan air bersih. Didapati nilai sebesar 23,46% dan 14,81%, sementara nilai 4,94% tidak berdampak karena masih ada yang buang air besar sembarangan.

**Tabel 4. 81**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Pembuatan WC/Jamban Keluarga terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh**

NO	DAMPAK PEMBUATAN DAN PEMBANGUNAN WC / JAMBAN KELUARGA	FREKUENSI	PRESENTASE (%)
1	TIDAK MENGOTORI LINGKUNGAN, KARENA SUDAH MEMILIKI WC / JAMBAN SENDIRI	11	13.58
2	TIDAK BUANG AIR BESAR SEMBARANG TEMPAT DAN LINGKUNGAN SERTA KESEHATAN TERJAGA DENGAN BAIK	35	43.21
3	BELUM BERDAMPAK, KARENA MASIH PERLU PERBAIKAN	19	23.46
4	BELUM BERDAMPAK, KARENA BELUM MENDAPAT BANTUAN PEMBUATAN WC/JAMBAN KELUARGA	12	14.81

5	TIDAK ADA DAMPAK KARENA MASIH BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN	4	4.94
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Sedangkan untuk dampak yang dirasakan dengan kegiatan pembuatan taman/RTH yaitu lingkungan menjadi lebih nyaman sebesar 61,73%, indah dan ramai dikunjungi, sebagai tempat bermain anak agar lebih aman dan nyaman sebesar 25,93% dan sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi sebesar 3,70%. Sementara yang merespon dengan jawaban belum berdampak dan tidak berdampak sebesar 6,17% dan 2,47% karena taman tersebut masih butuh perbaikan dan penambahan atribut taman karena sudah mulai ada kerusakan.

**Tabel 4. 82**  
**Presentase Jawaban Responden Dampak Pembuatan Taman / RTH terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Penanganan Permukiman Kumuh**

NO	DAMPAK PEMBUATAN DAN PEMBANGUNAN TAMAN / RTH	FREKUENS I	PRESENTASE (%)
1	LINGKUNGAN LEBIH NYAMAN, INDAH DAN RAMAI DIKUNJUNGI SERTA MENGHIJAUKAN LINGKUNGAN	50	61.73
2	TEMPAT BERMAIN UNTUK ANAK-ANAK LEBIH AMAN DAN NYAMAN	21	25.93
3	TEMPAT UNTUK BERKUMPUL DAN BERINTERAKSI WARGA SEKITAR	3	3.70
4	KURANG BERDAMPAK, KARENA MASIH PERLU PERBAIKAN ATRIBUT TAMAN	5	6.17
5	TIDAK TAHU	2	2.47
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>		<b>81</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2017

Dari uraian pembahasan diatas kemudian selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan perangkat SPSS versi 22 dan Regresi linier berganda/majemuk digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan jumlah variabel

independen lebih daripada satu, matematis dalam regresi linier berganda adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Dimana

**Y** = Variabel Dependen (Nilai Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat)

**X** = Variabel Independen ( Nilai Kondisi fisik penanganan lingkungan permukiman kumuh)

**$\beta$**  = koefisien regresi

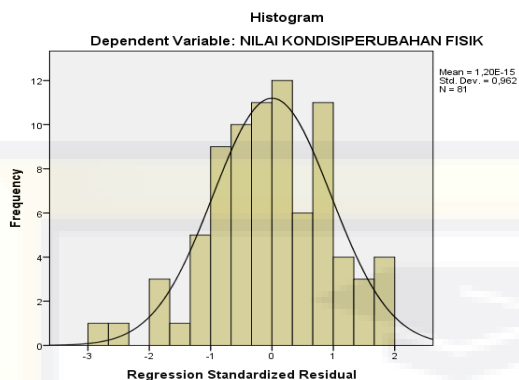
**e** = error

dengan asumsi regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

- a.  $e_1 = N(0,0)$ , error mengikuti fungsi distribusi normal
- b.  $Var = \sigma^2$  varians error konstan atau varians error bersifat homoskedastisitas (tidak ada masalah dengan heteroskedastisitas)
- c.  $Cov = 0$ , variabel diantara pengamatan error bersifat independen (tidak ada masalah otokorelasi)
- d. Tidak ada masalah multikolinieritas (terdapat korelasi tinggi diantara variabel independen)

#### **a) Pemeriksaan pertama : Normalitas error**

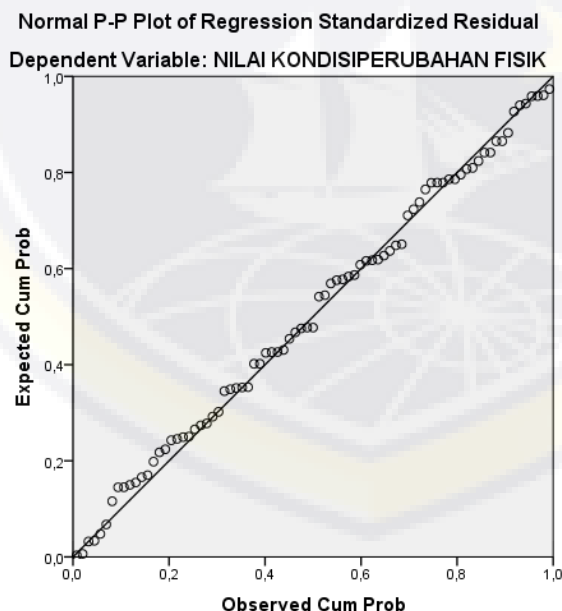
Pemeriksaan normalitas error dalam output SPSS versi 22 dapat dilihat dari hal berikut yaitu : Distribusi Histogram, Normal PP Plot of Regression Standardized Residual, dan Pengujian hipotesis standar residual melalui uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilks.



Gambar 4.12 Grafik Histogram pemeriksaan normalitas error rumusan permasalahan kedua.

Sumber : Hasil analisa SPSS versi 22, 2017

Distribusi histogram mengikuti fungsi distribusi normal apabila berbentuk seperti Lonceng. Dari grafik tersebut, secara visual, kita bisa mengatakan bahwa distribusi histogram tersebut mengikuti distribusi normal. Untuk lebih meyakinkan karena perbedaan visualisasi dalam pandangan, maka kita melihat grafik normal PP Plot of Regression Standardized Residual berikut :



Gambar 4. 13 Grafik Normal PP Plot of regression standardized residual rumusan permasalahan kedua

Sumber : Hasil analisa SPSS versi 22, 2017

Error distribusi normal jika pencaran data terletak disekitar garis lurus miring melintang/diagonal. Melalui grafik, kita ketahui bahwa data teklah berpencar disekitar garis lurus miring melintang sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini terpenuhi. Untuk lebih meyakinkan kita perlu melakukan pengujian hipotesis melalui uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilks.

Hipotesis :

$H_0$  = Error berdistribusi Normal

$H_1$  = Error tidak berdistribusi normal

Statistik pengujian = Uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilks

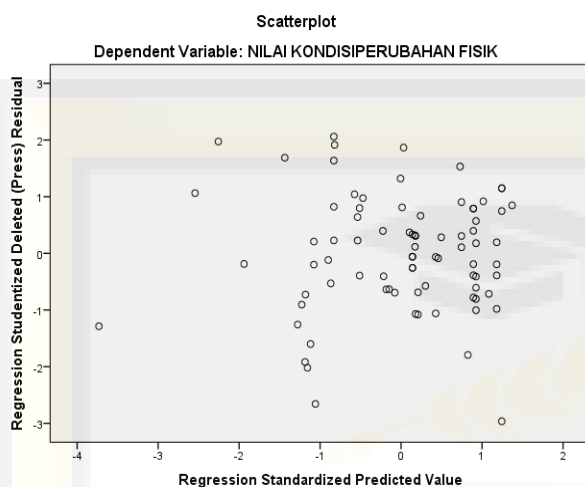
Alfa Pengujian = 5% (0,05)

Kriteria Pengujian = ( $H_0$ ) diterima bila  $p$ -Value hasil pengujian Uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilks lebih kecil (<) daripada 5% (0,05).

Berdasarkan tabel (lihat lampiran B, tabel Test of Normality kolom sig.) diketahui bahwa  $p$ -value Uji Kolmogorov-Smirnov adalah  $0,021 > 0,05$  (atau  $p$ -value Uji Shapiro Wilks  $0,007 > 0,05$ ). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $H_0$  diterima. Oleh karena itu, asumsi error berdistribusi normal terpenuhi.

**b) Pemeriksaan kedua : error konstan (tidak ada masalah Heteroskedastistas)**

Varian error konstan untuk setiap pengamatn disebut juga homoskedastistas. Sebaliknya jika tidak konstan, maka disebut heteroskedastistas. Dengan asumsi bahwa  $H_0$  diterima jika pencaran tidak membenuk suatu pola maka bisa dikatan error konstan ( tidak ada masalah heteroskedastistas).



Gambar 4.14 Grafik error konstan rumusan permasalahan kedua

Sumber : Hasil analisa SPSS versi 22, 2017

Dari hasil pengujian dengan metode grafik terlihat bahwa pencarian data bersifat acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, artinya  $H_0$  diterima (homoskedastitas) dan  $H_1$  ditolak.

### c) Pemeriksaan ketiga : ada tidaknya masalah otokorelasi

Dalam hal ini, kita mengatakan bahwa tidak ada masalah otokorelasi pada  $H_0$ , pengujian ini dapat dilakukan melalui uji Durbin Watson (nilainya dapat dilihat pada lampiran B tabel Model Summary kolom Durbin Watson).

Dengan asumsi sebagai berikut :

Hipotesis :

$H_0$  = Tidak ada Otokorelasi positif dan negatif

$H_1$  = Terdapat oOtokorelasi positif dan negatif

Terima  $H_0$  bila :

- Nilai  $d$  hitung atau nilai Durbin Watson Model lebih besar ( $>$ ) daripada nilai Durbin Watson tabel batas atas ( $d_U$ ) dan atau berada diantara ( $d_U < d < 4-d_U$ ).

Tolak  $H_0$  bila:

- Nilai  $d$  hitung atau nilai Durbin Watson Model lebih besar ( $>$ ) daripada nilai Durbin Watson tabel batas bawah ( $d_L$ ), yang berarti terdapat masalah otokorelasi positif ( $d < d_L$ ).
- Atau, nilai  $d$  hitung atau nilai Durbin Watson Model terletak diantara nilai ( $4 - d_L < d < 4$ ).

Berdasarkan tabel yang didapat dalam (lampiran B tabel Model Summary kolom Durbin Watson) didapatkan nilai Durbin Watson Hitung adalah 1,931. Sementara nilai Durbin Watson tabel dengan jumlah data  $n = 80$  adalah  $d_L = 1,480$  dan  $d_U = 1,801$ . Oleh karena itu nilai Durbin Watson hitung ( $d = 1,931$ ) lebih besar daripada batas atas nilai Durbin Watson tabel ( $d_U = 1,801$ ) dan nilai Durbin Watson hitung berada diantara nilai ( $d_U < d < 4-d_U = 1,772 - 2,500$ ). Maka kita dapat menerima  $H_0$  yang artinya tidak terdapat otokorelasi positif dan negatif

#### **d) Pemeriksaan keempat : tidak ada masalah multikolinieritas**

Pemeriksaan ini dapat dilihat pada nilai VIF (Lihat lampiran B tabel coefficients kolom VIF) Nilai VIF  $> 10$  menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, (Gujarati dalam sofyan yamin,dkk, 2010: 36). Berdasarkan hasil nilai yang didapatkan dalam tabel, nilai VIF untuk variabel pemahaman program kegiatan adalah 1,565. Variabel pencapaian tujuan 1,960. Variabel target pelaksanaan 1,107. Variabel ada dan berfungsinya kelembagaan 1,132. Variabel pemenuhan akses



2,159. Variabel kebutuhan kegiatan 1,060. Semua nilai variabel tersebut lebih kecil (<) daripada 10, dengan demikian, dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Selanjutnya setelah asumsi regresi terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian koefisien regresi yang pengujian keterandalan model (Uji F) dan pengujian Koefisien Regresi (Uji T) serta Koefisien Determinasi.

**a. Pengujian Keterandalan Model (Uji F) dengan hipotesis sebagai berikut :**

**H<sub>0</sub> diterima jika :** jika nilai koefisien regresi lebih besar dari (>) 0,05, berarti secara bersama sama, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**H<sub>1</sub> ditolak jika :** jika nilai koefisien regresi atau lebih kecil daripada (<) 0,05, berarti secara tidak bersama sama atau terdapat satu atau sebagian variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan, statistik pengujian : nilai signifikansi, dalam tabel Anova (lihat lampiran B tabel Anova kolom sig.). Dengan alfa pengujian : 5% (0,05).

Oleh karena nilai signifikansi (sig.) statistik didapat  $0,000 < 0,005$ . Maka kita menolak H<sub>1</sub> yang artinya secara tidak bersama sama atau terdapat satu atau sebagian variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**b. Pengujian Koefisien Regresi (Uji T) dengan hipotesis sebagai berikut :**

**H<sub>0</sub> diterima jika :** jika nilai koefisien regresi variabel independen lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**H<sub>1</sub> ditolak jika :** jika nilai koefisien regresi variabel independen atau lebih besar daripada ( $>$ ) 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan, statistik pengujian : nilai signifikansi, dalam tabel coefficients (lihat lampiran B tabel coefficients kolom sig.) dan besarnya pengaruh terdapat pada tabel coefficients kolom standardized coefficients beta. Dengan alfa pengujian : 5% (0,05).

Berdasarkan hasil nilai didapatkan untuk variabel independen pemahaman program kegiatan adalah  $0,134 > 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen pemahaman program kegiatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen efektivitas penanganan permukiman kumuh. Untuk variabel independen pencapaian tujuan adalah  $0,297 > 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen pencapaian tujuan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen efektivitas penanganan permukiman kumuh. Untuk variabel independen target waktu pelaksanaan adalah  $0,697 > 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen target waktu pelaksanaan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen efektivitas penanganan permukiman kumuh.

Untuk variabel independen terbentuk dan berfungsinya kelembagaan adalah  $-0,0862 < 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen terbentuk dan berfungsinya kelembagaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen efektivitas penanganan permukiman kumuh. Untuk variabel independen pelayanan akses adalah  $0,803 > 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen pelayanan akses mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen efektivitas penanganan permukiman kumuh. Untuk variabel independen pemenuhan kebutuhan kegiatan adalah  $2,497 > 0,05$ . Dengan demikian dikatakan bahwa variabel independen pemenuhan kebutuhan kegiatan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dengan variabel dependen efektivitas penanganan permukiman kumuh.

### **c. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi merupakan proporsi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam hal ini nilai koefisien determinasi dapat di ukur melalui nilai R Square dan Adjust R Square (lihat lampiran B, tabel Model Summary kolom R Square dan adjust R square), karena variabel dependent adalah lebih dari satu maka diambil nilai Adjust R Square yaitu 0.278, maka proporsi nilai pengaruh variabel penanganan permukiman kumuh tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat hanya sebesar 27,8% saja sedangkan sisanya sebesar 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam model regresi dalam penelitian ini.

Model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 26,764 + 1,264 X_1 + 2,539 X_2 + 0,454 X_3 + (-0,565) X_4 + 1,023 X_5 + 2,675 X_6 + 5,712$$

Hasil analisa statistik menggunakan SPSS versi 22 (lihat lampiran B tabel nilai coefficients kolom sig.) didapatkan nilai sebagai berikut :

a. Pemahaman Program dan Kegiatan

Nilai koefisien sig. terhadap pemahaman program dan kegiatan didapatkan sebesar 0.263, dari hasil nilai didapatkan bahwa kegiatan tersebut dikatakan **Tidak Efektif**, nilainya berada diantara 0,200 – 0,399. Hasil ini menyatakan bahwa variabel dependent tidak efektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel independent dalam pengurangan tingkat kekumuhan kawasan studi penelitian.

b. Tujuan Kegiatan

Nilai koefisien sig. terhadap tujuan kegiatan didapatkan sebesar 0.028, dari hasil nilai didapatkan bahwa kegiatan tersebut dikatakan **Sangat Tidak Efektif**, nilainya berada diantara 0,000 – 0,199. Hasil ini menyatakan bahwa variabel dependent sangat tidak efektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel independent dalam pengurangan tingkat kekumuhan kawasan studi penelitian.

c. Target Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Nilai koefisien sig. terhadap target waktu pelaksanaan kegiatan didapatkan sebesar 0.488, dari hasil nilai didapatkan bahwa kegiatan tersebut dikatakan **Kurang Efektif**, nilainya berada diantara 0,400 – 0,599. Hasil ini menyatakan bahwa variabel dependent kurang efektif

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel independent dalam pengurangan tingkat kekumuhan kawasan studi penelitian.

d. Terbentuk dan berfungsinya Kelembagaan

Nilai koefisien sig. terhadap terbentuk dan berfungsinya kelembagaan didapatkan sebesar 0.391, dari hasil nilai didapatkan bahwa kegiatan tersebut dikatakan **Tidak Efektif**, nilainya berada diantara 0,200 – 0,399. Hasil ini menyatakan bahwa variabel dependent tidak efektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel independent dalam pengurangan tingkat kekumuhan kawasan studi penelitian.

e. Penerima Manfaat Puas dan Layanan dan Kualitas Kegiatan

- *Pemenuhan Akses Kegiatan terhadap masyarakat*

Nilai koefisien sig. terhadap pemenuhan akses masyarakat didapatkan sebesar 0.424, dari hasil nilai didapatkan bahwa kegiatan tersebut dikatakan **Kurang Efektif**, nilainya berada diantara 0,400 – 0,599. Hasil ini menyatakan bahwa variabel dependent tidak efektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel independent dalam pengurangan tingkat kekumuhan kawasan studi penelitian.

- *Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat*

Nilai koefisien sig. terhadap pemenuhan akses didapatkan sebesar 0.015, dari hasil nilai didapatkan bahwa kegiatan tersebut dikatakan **Sangat Tidak Efektif**, nilainya berada diantara 0,000 – 0,199. Hasil ini menyatakan bahwa variabel dependent tidak efektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel independent dalam pengurangan tingkat kekumuhan kawasan studi penelitian.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam point efektivitas tersebut diatas dijadikan acuan dasar untuk analisa dalam kesimpulan teori yang dipergunakan yaitu bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana kegiatan tersebut tercapai dan sesuai dengan yang diinginkan serta memberikan efek, hasil dan manfaat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pemahaman teori dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman tidak efektif mengurangi tingkat kekumuhan, berdasarkan indikator pemahaman kegiatan, pencapaian tujuan, pencapaian target waktu, terbentuk dan berfungsinya kelembagaan serta kepuasan masyarakat atas layanan akses dan tingkat pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman masyarakat. Simpulan efektivitas ini berdasarkan kondisi fisik yang telah terlaksana di lokasi penelitian.

## **E. Sintesis Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Penanganan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi pada Lokasi Penelitian.**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan adanya penanganan permukiman kumuh didapatkan melalui data yang dikumpulkan dan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yaitu Tokoh Masyarakat, warga paling lama berdomisili di wilayah tersebut, ketua RT dan ketua BKM, dimana kondisi sosial secara umum digambarkan bahwa dinamika sosial yang ada masih tergolong rendah hal tersebut dikarenakan tidak adanya

kelompok komunitas dalam lingkungan yang lebih dominan. Struktur sosial yang terbentuk dalam lingkungan dapat disimpulkan bahwa status sosial masyarakat umumnya adalah status tunggal hal ini didapatkan berdasar pada data yang ada adalah umumnya hanya memiliki satu status sosial yaitu Kepala Rumah Tangga, untuk tingkatan strata sosial yang tercipta yaitu kelas menengah dan kelas bawah dari data yang dihimpun didapatkan bahwa tingkatan sosial kehidupan dan tingkatan pendidikan yang diperoleh, sementara itu untuk kelas sosial yang ada umumnya adalah masyarakat kelas rendah/low class hal ini didapatkan berdasar pada strata sosial. Selanjutnya terkait peran dan posisi sosial masyarakat dilihat dalam ukuran partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dimana terdapat partisipasi aktif artinya masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan sosial. Selanjutnya terkait pola interaksi sosial yang terjadi dan terbentuk yaitu untuk hubungan sosial terjadi simbiosis mutualisme yang artinya terjadi interaksi yang erat dan khusus dalam lingkungan sosial masyarakat dan interaksinya tinggi serta adaptasi sosial juga tinggi hal ini didapati dari pengamatan lapangan dan berdasar pada wawancara mendalam bahwa terjadi interaksi yang tinggi. Terakhir adalah mobilitas sosial, kondisi yang tergambar adalah bahwa mobilitas sosial yang terjadi hanya mobilitas sosial vertikal dimana tidak terjadi perubahan atau peningkatan dimana profesi yang mereka lakoni secara turun temurun dari warisan orang terdahulu mereka, sedangkan untuk pergeseran struktur penduduk juga demikian dimana tidak ada pergeseran atau perubahan struktur penduduk melihat kecenderungan mereka yang telah lama bermukim pada lingkungan tersebut. Kondisi sosial yang di uraikan tersebut merupakan

gambaran kondisi sosial baik itu sebelum adanya penanganan maupun setelah adanya penanganan lingkungan permukiman.

Untuk kondisi ekonomi / kesejahteraan dan pendapatan didapatkan bahwa sistem ekonomi yang terbangun dalam masyarakat adalah sistem ekonomi subsisten dan komersil dimana kondisi ini merupakan kegiatan perdagangan yang berlaku dalam skala yang terbatas, hanya sebagian kecil saja produksi masyarakat yang diperdagangkan, sementara untuk komersil dimaknai sebagai kegiatan ekonomi dengan tingkat produksi menengah ke atas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat demi mengarah ke tingkatan sejahtera. Selanjutnya sedangkan untuk lapangan usaha dan pekerjaan orientasi yang terbangun dan mendominasi pada lokasi penelitian adalah sebagai Buruh Harian, Nelayan dan Pedagang. Untuk kondisi ekonomi yang diuraikan tersebut didapatkan bahwa kondisi tersebut juga tidak banyak mengalami perubahan artinya tidak mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat baik sebelum dan setelah adanya penanganan permukiman kumuh.

Adaptasi teori yang dipergunakan dalam perubahan atau pengaruh perbaikan kondisi fisik lingkungan permukiman yang berlangsung pada lokasi penelitian yaitu Hirarki Teori Kebutuhan Maslow (dalam Batara Surya;2011-41), dimana Bahwa dalam diri setiap manusia terdapat hirarki dari lima kebutuhan, hirarki tingkatan kebutuhan manusia yaitu : (1) Fisiologi; (2) Rasa Aman; (3) Sosial; (4) Penghargaan; (5) Aktualisasi Diri. Dasar teori ini menyebutkan bahwa pada intinya menyebutkan bahwa individu bergerak menaiki tingkat hirarki, dimana pemenuhan kebutuhan hirarki ditujukan untuk memahami kondisi dan situasi dimana seseorang



berada dan fokus untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara J.F.C Turner mengungkapkan bahwa konsep rumah dalam suatu permukiman yaitu rumah merupakan bagian yang tidak dapat dilihat sebagai hasil fisik yang rampung semata, melainkan suatu proses yang berkembang dan berkaitan dengan mobilitas sosial – ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu.

Artinya bahwa penanganan permukiman kumuh melalui intervensi kegiatan pembangunan fisik lingkungan akan memberikan pengaruh baik itu positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat apabila perencanaan fisik yang dilaksanakan dibarengi dengan perencanaan dan pembangunan sosial ekonomi yang berjalan dengan baik telah memenuhi dan sesuai dengan hirarki kebutuhan manusia tersebut.

## **2. Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh dalam mengurangi Kekumuhan pada Lokasi Penelitian.**

Pencapaian efektivitas didapatkan melalui sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk menurangi kekumuhan kawasan, serta sejauh mana kegiatan penanganan permukiman kumuh itu memberikan pengaruh, adanya perubahan dan memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat dalam meberikan perubahan terhadap kondisi fisik, sosial dan ekonomi.

Secara fisik kegiatan penanganan permukiman kumuh memang memberikan dampak perubahan yang baik bagi lingkungan, namun belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat, secara pencapaian tujuan dapat dikatakan telah

mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau dikehendaki sebelumnya yaitu untuk memperbaiki / meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Hal ini didapatkan dari persepsi masyarakat yang diambil umumnya menyatakan bahwa kegiatan tersebut yaitu umumnya memahami program dan kegiatan yang berjalan, telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sesuai dengan sasaran waktu pelaksanaan, tersedianya kelembagaan dan pelayanan akses prasarana telah memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat. Namun hal tersebut bukan semata menjadi ukuran yang dijadikan alat untuk pengukuran efektivitas kegiatan penanganan tersebut. Dimana penilaiannya juga tidak terlepas dari keberhasilan kegiatan tersebut memberikan manfaat serta efek pengaruh yang positif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi yang telah disimpulkan sebelumnya.

Berdasarkan pula pada wawancara mendalam terhadap pelaku pembangunan yang terlibat didalam penanganan permukiman kumuh seperti Bappeda, Dinas PU, BKM, KSM dan Masyarakat dimana didapatkan bahwa umumnya menyatakan bahwa tingkatan perencanaan yang terlaksana dengan baik sesuai dengan rule atau garis yang telah ditetapkan bersama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat, telah berjalan dengan baik, namun kendala utama yang menjadi persoalan adalah minimnya gelontoran anggaran dalam merealisasikan rencana yang telah disusun, sehingga tidak mampu untuk mengcover seluruh kegiatan yang telah direncanakan bersama, namun hanya mampu membiayai kegiatan yang secara fisik telah terlaksana dilapangan.

Adaptasi teori umum yang dipergunakan dalam penilaian efektivitas adalah yang dikemukakan oleh Emerson dalam handayaningrat yang menyatakan bahwa : Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Serta pandangan yang diutarakan oleh the liang gie yang mengutarakan bahwa : efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki.

Artinya bahwa kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui intervensi kegiatan pembangunan fisik lingkungan telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun, namun kegiatan tersebut masih parsial belum menyeluruh dan menyentuh aspek perencanaan sosial ekonomi, hal ini didapatkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisa secara bersama, dimana kegiatan yang berjalan hanya fokus pada perencanaan fisik saja, sedangkan kegiatan perencanaan sosial dan ekonomi belum berjalan atau tidak berjalan, sehingga pengukuran fisik saja tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan analisa dan pembahasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penanganan permukiman kumuh pada lokasi studi didapatkan dalam analisa hasil dan pembahasan bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi penelitian, dimana simpulan ini didapatkan berdasarkan variabel kondisi sosial ekonomi dengan indikator Struktur Sosial, Posisi dan Peran Sosial, Pola Interaksi Sosial, Mobilitas Sosial, Kesejahteraan, Pendapatan, Lapangan Usaha, Lapangan Pekerjaan. Hasil analisa didapatkan umumnya responden, narasumber dan data yang didapatkan tidak mendapatkan nilai sosial ekonomi yang dapat dirasakan karena konsep penanganan yang terlaksana umumnya hanya merupakan intervensi kegiatan fisik semata.
2. Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Penelitian dikatakan Tidak efektif berdasarkan variabel penanganan dan indikator keefektifan yang digunakan yaitu Pemahaman Program Kegiatan, Pencapaian Tujuan, Target Waktu Pelaksanaan, Terbentuk dan Berfungsinya Kelembagaan, Kepuasan Layanan Akses dan Pemenuhan Kebutuhan lingkungan Masyarakat. Simpulan dalam hasil analisis hasil pembahasan didapati bahwa kegiatan penanganan melalui intervensi fisik yang direncanakan telah sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak perubahan dan manfaat secara fisik untuk lingkungan permukiman, namun tidak

memberikan dampak atau efek terhadap kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan.

## **B. SARAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Saran**

- a) Upaya untuk mengurangi tingkat kekumuhan di lokasi penelitian maka diperlukan program kegiatan yang tidak hanya menyentuh perbaikan fisik semata, tapi juga bagaimana caranya dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar besarnya terhadap peningkatan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat. Yakni perlunya intervensi atau pengaruh yang baik dan berkesinambungan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan cara diberikan pelatihan, diberi kesempatan mengembangkan kemampuan, diberi modal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka secara mandiri. Karena kumuh tidak hanya melihat aspek fisik semata tapi juga bagaimana merencana sosial ekonomi kawasan kumuh tersebut secara bersama dan berkelanjutan.
- b) Walaupun hasil yang didapatkan secara keseluruhan dikatakan sudah efektif, namun upaya pengembangan program dan kegiatan yang lebih menyeluruh serta merata diperlukan guna untuk membangun kemandirian suatu kawasan, tidak hanya diintervensi secara fisik semata, namun harus juga memperhatikan aspek jangka panjang dari kegiatan tersebut, agar mampu dijaga dan diwariskan dengan baik oleh masyarakat agar tidak kembali ke kondisi seperti semula.

Perlunya aspek evaluasi secara bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat terhadap program dan pelaksanaan kegiatan.

- c) Dukungan penuh dari pemerintah dalam hal kebijakan agar mampu mendorong tidak berkembangnya permukiman kumuh dan pelibatan swasta dalam keikutsertaan untuk menjaga lingkungan permukiman menjadi lebih baik lagi.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan serta kesimpulan yang sebelumnya telah diuraikan maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil studi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya pembinaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukimannya, khususnya penghuni kawasan kumuh perkotaan melalui peningkatan kesadaran di masyarakat tentang tanggung jawabnya untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih baik. Selain itu, pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun dan direhabilitasi, masyarakatpun perlu secara bersama-sama ditumbuhkan kesadarannya dalam memelihara lingkungan permukiman karena masyarakatlah yang akan menentukan kondisi lingkungan kedepan.
- b. Perlu pelibatan peran pihak ketiga atau swasta dalam penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, karena saat ini sulit untuk hanya mengandalkan dana dari pemerintah, mengingat luas dan banyaknya spot kawasan kumuh yang tersebar diseluruh kota makassar. Lebih lanjut adanya pergeseran peran dari pemerintah yang tidak lagi bertanggung jawab

secara menyeluruh sebagai penyedia dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh.

- c. Perlu juga peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan sebagai subyek tidak lagi menjadi obyek dalam kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan, agar kegiatan dan program tersebut dapat dipahami secara bersama mulai dari unsur masyarakat, pemerintah dan swasta, agar mampu berperan penting dalam pengurangan tingkat kekumuhan kawasan. Serta pemberdayaan kelembagaan sebagai wadah masyarakat untuk bisa berperan lebih aktif dalam setiap kegiatan program dan kegiatan yang berlangsung di wilayah mereka.



**BOSOWA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, E. 1992. Sejumlah Masalah Permukiman Kota. Alumni, Bandung.
- Budihardjo, E. 1994. Percikan Masalah : Arsitektur, Perumahan, Perkotaan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Budiman, A. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kuswartojo, T. 2005. Perumahan dan Permukiman Di Indonesia, ITB Bandung.
- Prayitno, Budi. 2016. Skema Inovatif, Penanganan Permukiman Kumuh. Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Rangkuti, F. 2009. Mengukur Efektivitas Program Promosi dan Analisis Kasus Menggunakan SPSS. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Surya, B. 2011. Urbanisasi dan Perkembangan Kota. Fahmis Pustaka, Makassar.
- Sadana, Agus, S. 2014. Perencanaan Kawasan Permukiman. Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Steers, R.M. 1985. Efektivitas Organisasi. Seri Manajemen No. 47. Terjemahan. PPM, Erlangga, Jakarta.
- Surya, B. 2014. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota. Fahmis Pustaka Makassar.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.
- Turner, J.F.C. 1976. Housing By People: Towards Autonomy in Building Environments. Marion Boyars, London, Boston.
- Yamin, S. Dkk. 2011. Regresi dan Korelasi Dalam Genggaman Anda : Aplikasi dengan Software SPSS, Eviews, MINTAB, dan STATGRAPHICS. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mekaryani, H. 1997. **Tesis** : *Dampak Program Perbaikan Permukiman Kumuh terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Perkembangan Wilayah (Studi Kasus: Kelurahan Mariana dan Kelurahan Kampung Dalam Bugis Kotamadya Pontianak)*. Institut Pertanian Bogor.
- Suwanda. 2000. **Tesis** : *Pengaruh Perbaikan Permukiman Kumuh terhadap Keberlanjutan Komunitas (Studi Kasus: Kawasan Permukiman Kumuh Bandarharjo Semarang)*, Universitas Diponegoro.
- Gusmaini. 2010. **Tesis** : *Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)*, Institut Pertanian Bogor.
- Kuntadi, H. 2005. **Tesis** : *Efektivitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam mendukung Pengembangan Wilayah Barat Kabupaten Sleman*. Universitas Diponegoro.
- Wijaya, N. 2006. **Tesis** : *Kajian Tingkat Pelayanan Infrastruktur Di Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Studi Kasus Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Cobleng, Kota Bandung*. Institut Teknologi Bandung.
- Hutagalung, S. .... *Efektivitas Program Perbaikan Infrastruktur Lingkungan PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Studi Kasus: RW 15 Kelurahan Tamansari*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V1N2 | 237.
- ..... 2016. Panduan Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat



- Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
- ..... 2015. Penanganan Kawasan Permukiman: *Panduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Aprini, D.M. 2015. Outline Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
- ....., 2014. *Panduan kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman kumuh*. Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
- ....., 2014. Petunjuk Teknis : *Penataan lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas*. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
- ..... 2014. Kebijakan dan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- ..... 2013. *SAPOLA (Slum Alleviation Policy and Action Plan), Kebijakan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- ....., 2012. Buku Panduan : *Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)*. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001. Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- SNI 03-1733-2004 *Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan* ICS 91.020; 91.040.30 .Badan Standardisasi Nasional.
- Buku Laporan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Makassar Tahun 2010, Bappeda Kota Makassar.
- Buku Laporan Identifikasi Kawasan kumuh Kota Makassar Tahun 2015, Bappeda Kota Makassar.
- Buku Laporan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Tallo Kota Makassar Tahun 2015.
- Buku Laporan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Tallo Kota Makassar Tahun 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta.

Budaya Permukiman Kumuh Posted on <https://nabilahwitsqa.wordpress.com/2016/10/11/budaya-permukiman-kumuh/> \_ October 11, 2016 by nabilahwitsqa.



**FORMAT OBSERVASI**

**PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN  
(Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar)**

**1. VARIABEL FISIK (PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH / PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN)**

NO	INDIKATOR PENGUKURAN	RENCANA PROGRAM KEGIATAN				KONDISI		KETERLIBATAN MASYARAKAT		PEMANFAATAN OLEH MASYARAKAT		KEPUASAN MASYARAKAT	
		Target Pelaksanaan	Realisasi Target	Tahun Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan	Sebelum	Sesudah	Aktif	Pasif	Penggunaan	Perubahan	Penggunaan	Perubahan
1	Perbaikan / peningkatan kualitas Jalan Lingkungan												
2	Rehabilitasi Bangunan Rumah												
3	Perbaikan / Rehabilitasi Drainase												
4	Pembuatan / Rehabilitasi Jamban Keluarga												
5	Penyediaan Air Bersih / Air Minum												
6	Sistem Persampahan												
7	Proteksi Kebakaran												
8	Pembuatan Taman / RTH												

**2. VARIABEL SOSIAL**

NO	INDIKATOR	PENGUKURAN	UKURAN PENILAIAN	KONDISI (Dengan Keberadaan Kegiatan Penanganan Lingkungan Permukiman)	
				PERUBAHAN / PERKEMBANGAN	PENGARUH
9	<b>Struktur Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strata Sosial</li> <li>• Status Sosial</li> <li>• Kelas Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berdasarkan Kondisi Hunian, Pekerjaan dan Pendapatan</li> <li>• Kedudukan sosial dalam masyarakat</li> <li>• Gaya hidup dan Pemilikan barang dan harta</li> </ul>		
10	<b>Posisi Dan Peran Sosial Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individu</li> <li>• Kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan peran serta sosial masyarakat secara individu dan kelompok dalam kelembagaan</li> </ul>		
11	<b>Pola Interaksi Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola kekerabatan</li> <li>• Interaksi sosial dalam lingkungan</li> <li>• Kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berdasarkan Perubahan perkembangan interaksi sosial dalam masyarakat</li> </ul>		

12	<b>Mobilitas Sosial Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Vertikal</li><li>•Horisontal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Perubahan status sosial dari miskin menjadi mampu</li><li>•Perubahan / pergantian masyarakat lama (kurang mampu) menjadi masyarakat baru (menengah ke atas)</li></ul>		
----	------------------------------------	---	--	--	--





NO	KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI TARGET PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN	KONDISI		KETERLIBATAN MASYARAKAT		PEMANFAATAN MASYARAKAT	
		LUAS (M2)	JUMLAH			SEBELUM	SESUDAH	AKTIF	PASIF	PENGUNAAN	PERUBAHAN
<b>E K O N O M I</b>											
1	Paket Bantuan Modal Usaha		50								
2	Pengadaan Area Untuk Jualan Makanan & Cinderamata		1								
3	Pengadaan Bank Sampah		1								
4	Perahu Motor untuk Nelayan		5								
5	Pengelolaan Kepiting Rajungan		5								
<b>I N F R A S T R U K T U R</b>											
<b>A. J A L A N</b>											
1	Perbaikan dan Finishing Jalan Setapak (Paving)	1100		1.100	2015	jalan yang ada hanya perkerasan dan berlubang	terlihat rapi dengan paving			akses warga sekitar	akses menjadi nyaman, jalan tidak lagi becek dan kotor
2	Pekerjaan Paving Baru	300		300	2016	jalan becek, dan terjadi genangan jika hujan	terlihat rapi dengan paving dan tidak menggenang air			akses warga sekitar	akses menjadi nyaman, jalan tidak lagi becek dan kotor
3	Pengadaan Kelengkapan Jalan (Street Furniture)		50								
<b>B. J A R I N G A N L I S T R I K</b>											
1	Pengadaan Jaringan Listrik (PLN) Pada Rumah Yang Belum Memiliki Listrik		25								
2	Pengadaan Lampu Jalan		30								
<b>S A N I T A S I &amp; A I R B E R S I H</b>											
<b>A. D R A I N A S E</b>											









Lampiran . KUESIONER

**DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)**  
**Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan**  
**(Studi Kasus : Permukiman Kumuh Tallo Kelurahan Tallo Kota Makassar)**

**Petunjuk Umum Pengisian :**

1. Daftar pertanyaan ini sebaiknya diisi oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa dan mengerti baca tulis.
2. Jawab dan pilihlah jawaban untuk pertanyaan yang berupa pilihan dengan memberikan tanda silang (x) serta beri alasan untuk jawaban tersebut.
3. Jawablah semua pertanyaan yang ada, dan diisi dengan pendapat anda sendiri pada tempat yang tersedia.
4. Jawablah seluruh pertanyaan.

**DATA RESPONDEN**

Nama KK : .....

Usia : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Jumlah Pendapatan per bulan : .....

Jumlah Anggota Keluarga : .....

Lama Tinggal dan berdomisili di Lingkungan ini : .....

Status Kepemilikan Tanah : (a) Hak Milik; (b) HGB; (c) Lainnya .....

Status Kepemilikan Rumah : (a) Rumah Sendiri; (b) Sewa/Kontrak;  
(c) Rumah Orang Tua; (d) Lainnya .....

Rumah Tangga ini merupakan penerima bantuan sosial dan bantuan lainnya :  
(a) YA (b) TIDAK

**A. FISIK LINGKUNGAN**

1. Adanya kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, menurut saudara bagaimana kondisi jalan di lingkungan ini?  
.....
2. Apakah menurut saudara dengan kondisi jalan tersebut telah memperbaiki dan memengaruhi akses dan kondisi lingkungan sekitar?  
**a) SETUJU                      b) KURANG SETUJU    c) TIDAK SETUJU**  
Jika SETUJU, jelaskan  
.....  
Jika KURANG SETUJU, Jelaskan  
.....  
Jika TIDAK SETUJU Jelaskan,  
.....
3. Bagaimana kondisi jalan tersebut sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman? .....
4. Apa dampak perubahan yang saudara rasakan dengan adanya kegiatan perbaikan jalan lingkungan tersebut?  
.....
5. Adanya kegiatan perbaikan dan rehabilitasi rumah, menurut saudara bagaimana kondisi rumah pada lingkungan ini?  
.....
6. Apakah menurut saudara kondisi rumah yang telah di perbaiki dan direhabilitasi pada lingkungan ini sudah lebih baik dan layak huni?

- a) YA. SUDAH CUKUP BAIK
- b) MASIH KURANG BAIK
- c) TIDAK ADA PERUBAHAN

Jelaskan pilahan jawaban saudara

- 7. Bagaimana kondisi rumah di lingkungan ini menurut saudara, sebelum adanya kegiatan perbaikan dan rehabilitasi rumah? .....
- 8. Apa dampak perubahan yang saudara rasakan, dengan adanya perbaikan dan rehabilitasi rumah pada lingkungan ini? .....
- 9. Adanya kegiatan perbaikan dan rehabilitasi drainase, menurut saudara bagaimana kondisi drainase pada lingkungan ini? .....
- 10. Apakah menurut saudara kondisi tersebut sudah dapat mengurangi dampak banjir dan genangan pada lingkungan ini?
  - a) YA,
  - b) BELUM,
  - c) TIDAK TAHU
 jelaskan pilihan jawaban saudara .....
- 11. Bagaimana kondisi drainase dilingkungan ini, sebelum adanya kegiatan perbaikan dan rehabilitasi drainase?.....
- 12. Adanya kegiatan perbaikan / pembuatan jamban keluarga, menurut saudara bagaimana kondisi jamban /WC keluarga pada lingkungan ini? .....
- 13. Apakah dengan kondisi jamban/WC keluarga tersebut ada perubahan terhadap dampak kesehatan dan tidak ada lagi rembesan air kotor terhadap tanah dan lingkungan sekitar?
  - a) ADA PERUBAHAN
  - b) MASIH PERLU PERBAIKAN
  - c) TIDAK ADA PERUBAHAN
 Jelaskan pilihan jawaban saudara.....
- 14. Bagaimana kondisi jamban/WC keluarga yang ada pada lingkungan ini sebelum adanya perbaikan dan rehabilitasi? .....
- 15. Sebelum adanya kegiatan pembangunan / pembuatan taman /RTH, menurut saudara bagaimana kondisinya? .....
- 16. Apakah menurut saudara dengan kondisi tersebut ada perubahan penggunaan fasilitas untuk bermain dan berinteraksi?
  - a) YA.
  - b) TIDAK ADA PERUBAHAN
  - c) TIDAK TAHU
 Jika YA, jelaskan .....
- Jika TIDAK Jelaskan, .....
- 17. Bagaimana kondisinya sebelum adanya kegiatan pembuatan taman?.....
- 18. Apa dampak perubahan yang saudara rasakan dengan adanya kegiatan pembuatan taman/RTH di lingkungan ini? .....

**B. SOSIAL MASYARAKAT**

**i. Struktur Sosial (Strata, Status dan Kelas Sosial)**

- 19. Adanya perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana kondisi pekerjaan saudara? .....
- a) MENGUNTUNGGKAN
- b) MERUGIKAN
- c) TIDAK BERPENGARUH
- Apa alasan saudara .....
- 20. apakah saudara memiliki pekerjaan sampingan?
  - a) YA
  - b) TIDAK
 (Jika TIDAK, silahkan ke pertanyaan nomor 21)

Jika YA, Apa pekerjaan sampingan saudara? .....

Jika YA, Apakah pekerjaan sampingan saudara telah ada sebelum kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?

a) YA                                      b) TIDAK

21. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah ada perubahan terhadap pekerjaan saudara?

a) ADA PERUBAHAN                      c) TIDAK ADA PERUBAHAN

Jelaskan                                      jika                                      ADA                                      dan                                      TIDAK

.....

22. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, Apakah saudara memiliki jabatan/kedudukan formal?

a) YA                                      b) TIDAK

(Jika TIDAK, silahkan lanjut ke pertanyaan nomor 23)

Jika YA, sebutkan .....

Bagaimana anda memperoleh jabatan/kedudukan tersebut?.....

23. Apakah anda memilikinya sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?

a) YA                                      b) TIDAK

24. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah saudara memiliki jabatan/kedudukan informal dalam masyarakat?

a) YA                                      b) TIDAK

(Jika TIDAK, silahkan lanjut ke pertanyaan nomor 26)

Jika YA, sebutkan .....

25. Bagaimana anda memperoleh jabatan/kedudukan tersebut?.....

Apakah anda memilikinya sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?

a) YA                                      b) TIDAK

26. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, Apakah saudara memiliki kedudukan penting dalam masyarakat?

a) YA                                      b) TIDAK

(Jika TIDAK silahkan lanjut ke nomor 27)

Jika YA, sebutkan .....

Jika YA, apakah kedudukan penting tersebut anda peroleh sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan?

a) YA                                      b) TIDAK

27. Menurut saudara, apakah faktor pendidikan, kekeluargaan / kekerabatan yang menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat?

a) YA                                      b) TIDAK

Jika YA, jelaskan .....

.....

Jika TIDAK, sebutkan menurut pendapat saudara .....

.....

28. Apakah menurut saudara ada individu / kelompok yang dijadikan panutan utama dalam masyarakat?

a) YA                                      b) TIDAK

Jika YA, sebutkan .....

(Jika TIDAK, silahkan lanjut ke pertanyaan nomor 29)



38. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana kondisi relasi / hubungan ke tetangga menurut saudara?  
.....
39. Apakah menurut saudara, terjadi interaksi yang baik, saling berkunjung, saling membantu?  
 a) SERING c) TIDAK PERNAH  
 b) KADANG KADANG  
 Jelaskan alasan jawaban saudara .....
40. Bagaimana kondisi hubungan ketetangga, sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman? .....
41. Apakah ada kegiatan pertemuan rutin yang saudara ikuti, untuk mempererat kekerabatan dan kekeluargaan warga di lingkungan ini?  
 a) ADA dan RUTIN c) TIDAK ADA  
 b) ADA tapi TIDAK RUTIN  
 Jika ADA, sebutkan  
 .....  
 (*Jika TIDAK ADA silahkan ke pertanyaan nomor 42*)
42. Apakah saudara selalu berkunjung ketempat tetangga sekitar lingkungan ini?  
 a) YA, selalu c) TIDAK PERNAH, kecuali ada undangan  
 b) YA, Kadang-kadang d) sama sekali TIDAK PERNAH  
 Berikan alasan saudara .....
43. Apakah tingkat kekayaan seseorang mempengaruhi hubungan, interaksi dan kerjasama dengan tetangga?  
 a) YA b) TIDAK  
 Jika YA dan TIDAK beri alasan saudara .....
44. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, menurut saudara bagaimana kekerabatan dan kekeluargaan yang terjalin dalam masyarakat di lingkungan saudara?  
 .....
45. Apakah menurut saudara, terjadi perubahan sesudah adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?  
 a) SANGAT BERUBAH c) TIDAK BERUBAH  
 b) BERUBAH  
 Jika YA, jelaskan .....  
 Jika TIDAK, jelaskan  
 .....
46. Bagaimana kondisi kekerabatan dan kekeluargaan yang terjalin dalam masyarakat sebelum ada perbaikan lingkungan permukiman?  
 .....
47. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana saudara bertukar informasi dengan tetangga dan masyarakat disekitar lingkungan saudara?  
 a) SERING c) TIDAK PERNAH  
 b) KADANG-KADANG
48. Apakah menurut saudara, cara ini baik untuk menjaga kerukunan sesama warga dilingkungan ini?  
 a) YA b) TIDAK  
 Jika YA, jelaskan .....

Jika

TIDAK,

jelaskan

.....

49. Bagaimana kondisi bertukar informasi tersebut sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?  
.....

50. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana kerjasama saudara dengan tetangga dan masyarakat disekitar lingkungan saudara?  
.....

51. Apakah menurut saudara, kerjasama antar tetangga dan warga dilingkungan ini telah mengalami perubahan?

a) SANGAT BERUBAH

c) TIDAK BERUBAH

b) BERUBAH

Jika YA, jelaskan .....

Jika TIDAK, jelaskan .....

52. Bagaimana kondisi kerjasama antar tetangga dan warga sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?  
.....

53. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, Bagaimana pola kerjasama warga dilingkungan saudara?

a) GOTONG ROYONG

c) TIDAK ADA

b) KEKERABATAN/KEKELUARGAAN

Tolong jelaskan pilihan jawaban saudara .....

54. Bagaimana kondisi pola kerjasama tersebut sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?.....

55. Apakah pola kerjasama tersebut telah mengalami perubahan dan pergeseran?  
.....

56. Apakah dalam lingkungan warga, terdapat norma atau tradisi yang dianut dan dijalankan baik secara individu maupun bersama kelompok?

a) ADA

b) TIDAK ADA

c) TIDAK TAU

(Jika TIDAK ADA silahkan lanjut ke nomor 57)

Jika ADA, Sebutkan dan Jelaskan  
.....

57. Apakah norma atau tradisi tersebut telah ada dan berjalan sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman?

a) YA

b) TIDAK

iv. **Mobilitas Sosial (perubahan status sosial dan pergeseran struktur penduduk)**

58. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah ada pengaruh perubahan terhadap kehidupan saudara?

a) ADA

c) ADA tapi TIDAK BERUBAH

b) TIDAK BERPENGARUH

Jika YA, jelaskan .....

Jika TIDAK, jelaskan .....

59. Apakah kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, membawa perubahan terhadap struktur penduduk lama digantikan oleh penduduk baru?



- a) YA    b) TIDAK

Jika YA, jelaskan .....

Jika TIDAK, jelaskan .....

60. Apakah kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, memengaruhi kepemilikan lahan dan bangunan pada lingkungan ini?

- a) YA    b) TIDAK

Jika YA, jelaskan .....

Jika TIDAK, jelaskan .....

### C. EKONOMI MASYARAKAT

#### i. Kesejahteraan

61. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana pemenuhan kebutuhan anda terhadap makan, pakaian, rumah dan kebutuhan lainnya?

.....

62. Apakah pemenuhan kebutuhan saudara tersebut mengalami perubahan dari sebelum adanya kegiatan tersebut?

- a) SANGAT BERUBAH    c) TIDAK BERUBAH

- b) BERUBAH

jelaskan alasan saudara .....

63. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana kondisi rasa aman dari bahaya fisik dan emosional yang saudara rasakan?

.....

64. Apakah kondisi tersebut mengalami perubahan setelah adanya kegiatan perbaikan lingkungan?

- a) YA    b) TIDAK

Jelaskan alasan pilihan jawaban saudara .....

65. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana kepemilikan barang dan harta saudara?

.....

66. Apakah dengan adanya kegiatan tersebut, kepemilikan barang dan harta saudara mengalami peningkatan dan perubahan dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan tersebut?

- a) ADA PERUBAHAN    c) TIDAK ADA PERUBAHAN

- b) BERUBAH

jelaskan    jika    ADA    dan    TIDAK

.....

67. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah saudara mampu menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?

- a) MAMPU    c) TIDAK MAMPU

- b) KURANG MAMPU

jelaskan jawaban saudara.....

68. Bagaimana kondisinya sebelum adanya kegiatan tersebut, apakah ada perubahan yang saudara rasakan?

.....

69. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah saudara mampu mengakses dan membayar pelayanan kesehatan?

- a) YA    b) TIDAK

Jika YA, jelaskan .....  
Jika TIDAK, jelaskan .....

70. Bagaimana kondisinya sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman tersebut?  
.....

71. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana kondisi persahabatan dan rasa kasih sayang yang ada dalam keluarga dan lingkungan?  
.....

72. Apakah rasa persahabatan dan kasih sayang yang terjalin dalam keluarga dan terhadap tetangga mengalami perubahan dan perkembangan dibandingkan sebelum adanya kegiatan tersebut?  
a) SANGAT BERUBAH                      c) TIDAK BERUBAH  
b) BERUBAH  
Jelaskan jawaban saudara .....  
Menurut saudara apa yang menentukan tingkat kesejahteraan seseorang?  
.....

**ii. Pendapatan**

73. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana kondisi pendapatan saudara?  
.....

74. Apakah pendapatan saudara dapat memenuhi kebutuhan saudara dan keluarga?  
a) DAPAT MEMENUHI                      c) TIDAK MEMENUHI  
b) KURANG MEMENUHI  
Jelaskan jawaban saudara .....  
Bagaimana kondisi pendapatan saudara sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?  
.....

75. Apakah kegiatan perbaikan lingkungan permukiman, meningkatkan pendapatan saudara?  
a) BERPENGARUH                      b) TIDAK BERPENGARUH  
b) KURANG BERPENGARUH  
Jelaskan jawaban saudara .....

76. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan / peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah saudara memiliki pendapatan / penghasilan lain?  
a) ADA                      b) TIDAK ADA  
Jika ADA, sebutkan .....  
*(jika TIDAK ADA, silahkan pertanyaan nomor 77)*  
Jika ADA, apakah pendapatan lain tersebut anda peroleh sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?  
a) YA                      b) TIDAK

**iii. Lapangan Usaha dan Pekerjaan**

77. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, bagaimana kondisi lapangan usaha dan pekerjaan menurut saudara?  
.....

78. Apakah lapangan usaha dan pekerjaan tersedia banyak dengan adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?  
a) TERSEDIA   b) KURANG TERSEDIA                      c) TIDAK TERSEDIA



Jika TERSEDIA, jelaskan

Jika KURANG TERSEDIA, jelaskan

Jika TIDAK TERSEDIA, jelaskan

(jika KURANG dan TIDAK silahkan lanjutkan ke nomor 79)

79. Bagaimana kondisi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan sebelum adanya kegiatan perbaikan lingkungan permukiman?

80. Apakah kondisinya sama dengan saat ini?

81. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, menurut saudara lapangan usaha dan pekerjaan apa saja yang tersedia?

82. Bagaimana tanggapan saudara terkait pernyataan, jika perbaikan lingkungan permukiman kumuh terlaksana dengan baik, maka akan membuka peluang usaha dan pekerjaan yang lebih baik pula?

- a) SETUJU
- b) KURANG SETUJU
- c) TIDAK SETUJU

Apa alasan saudara memilih jawaban tersebut, jelaskan :

iv. Efektivitas Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh (Pemahaman Program Kegiatan, terbentuknya organisasi, akses dan kepuasan masyarakat terhadap layanan prasarana yang dibangun)

83. Dalam lingkungan saudara telah terlaksana kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah saudara memahami program dan kegiatan yang telah berjalan tersebut?

- a) PAHAM
- b) KURANG PAHAM
- c) TIDAK PAHAM

Jika PAHAM, jelaskan .....

Jika KURANG PAHAM, jelaskan .....

Jika TIDAK PAHAM, jelaskan .....

Apa saja kegiatan perbaikan lingkungan permukiman yang saudara ketahui pada lingkungan ini? (silahkan dijawab jika jawaban saudara PAHAM, dan jika KURANG dan TIDAK silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya nomor 84)

84. Apakah menurut saudara, kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai?

- a) SESUAI
- b) KURANG SESUAI
- c) TIDAK SESUAI

Jelaskan jawaban pilihan saudara .....

85. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan target waktu dan pelaksanaannya?

- a) YA, SESUAI
- b) TIDAK SESUAI TARGET

86. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah ada kelembagaan masyarakat yang terbentuk untuk menangani kegiatan tersebut?

- a) ADA                                b) TIDAK ADA  
(jika Jawaban saudara TIDAK ADA, silahkan lanjutkan ke nomor 87)

Jika ADA, sebutkan .....

Jika ADA, Apakah saudara ikut terlibat dalam organisasi tersebut?

- a) TERLIBAT                                b) TIDAK TERLIBAT

Jika TERLIBAT, Apa bentuk keterlibatan saudara?

.....

87. Adanya kegiatan perbaikan lingkungan/peningkatan kualitas lingkungan permukiman, apakah telah memenuhi harapan saudara?

- a) MEMENUHI                                b) BELUM MEMENUHI                                c) TIDAK MEMENUHI

Jika MEMENUHI, jelaskan

.....

Jika BELUM MEMENUHI, jelaskan

.....

Jika TIDAK MEMENUHI, jelaskan

.....

88. Apakah kegiatan yang terlaksana di lingkungan saudara tersebut, merupakan kegiatan yang paling saudara dan warga butuhkan di lingkungan ini?

- a) SANGAT DIBUTUHKAN                                c) TIDAK DIBUTUHKAN

- b) DIBUTUHKAN

Jika SANGAT DIBUTUHKAN,  
jelaskan.....

Jika DIBUTUHKAN, jelaskan

.....

Jika TIDAK DIBUTUHKAN,  
jelaskan.....

(Jelaskan pendapat jawaban saudara)

## LAMPIRAN A

```

SAVE OUTFILE='F:\HASIL PENGOLAHAN DAN TABULASI DATA PENELITIAN AGUSTUS 2017\PENGARUH PERBAIKAN '+
'FISIK TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI.sav'
/COMPRESSED.
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5
/SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/SAVE ZRESID.
    
```

## Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI	72,02	6,782	81
PERBAIKAN JALAN	13,62	1,617	81
PERBAIKAN RUMAH	12,36	2,164	81
PERBAIKAN DRAINASE	8,14	1,708	81
PEMBUATAN WC/JAMBAAN	8,68	1,850	81
PEMBUATAN TAMAN / RTH	12,01	2,211	81

Correlations

		NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI	PERBAIKAN JALAN	PERBAIKAN RUMAH	PERBAIKAN DRAINASE	PEMBUATAN WC/JAMBAAN	PEMBUATAN TAMAN / RTH
Pearson Correlation	NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI	1,000					
	PERBAIKAN JALAN	,236	1,000				
	PERBAIKAN RUMAH	,500	,325	1,000			
	PERBAIKAN DRAINASE	,137	,005	,217	1,000		
	PEMBUATAN WC/JAMBAAN	,359	,121	,454	,141	1,000	
	PEMBUATAN TAMAN / RTH	,419	,166	,365	,317	,398	1,000
Sig. (1-tailed)	NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI	.	,017	,000	,112	,000	,000
	PERBAIKAN JALAN	,017	.	,002	,481	,140	,070
	PERBAIKAN RUMAH	,000	,002	.	,026	,000	,000
	PERBAIKAN DRAINASE	,112	,481	,026	.	,105	,002
	PEMBUATAN WC/JAMBAAN	,000	,140	,000	,105	.	,000
	PEMBUATAN TAMAN / RTH	,000	,070	,000	,002	,000	.
N	NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI	81	81	81	81	81	81
	PERBAIKAN JALAN	81	81	81	81	81	81
	PERBAIKAN RUMAH	81	81	81	81	81	81
	PERBAIKAN DRAINASE	81	81	81	81	81	81

PEMBUATAN WC/JAMBAN	81	81	81	81	81	81
PEMBUATAN TAMAN / RTH	81	81	81	81	81	81

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PEMBUATAN TAMAN / RTH, PERBAIKAN JALAN, PERBAIKAN DRAINASE, PEMBUATAN WC/JAMBAN, PERBAIKAN RUMAH <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,572 <sup>a</sup>	,327	,282	5,747	1,873

a. Predictors: (Constant), PEMBUATAN TAMAN / RTH, PERBAIKAN JALAN, PERBAIKAN DRAINASE, PEMBUATAN WC/JAMBAN, PERBAIKAN RUMAH

b. Dependent Variable: NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1202,865	5	240,573	7,284	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2477,086	75	33,028		
	Total	3679,951	80			

a. Dependent Variable: NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI

b. Predictors: (Constant), PEMBUATAN TAMAN / RTH, PERBAIKAN JALAN, PERBAIKAN DRAINASE, PEMBUATAN WC/JAMBAN, PERBAIKAN RUMAH

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	43,264	6,645		6,511	,000		
	PERBAIKAN JALAN	,288	,423	,069	,681	,498	,882	1,133
	PERBAIKAN RUMAH	1,094	,360	,349	3,035	,003	,679	1,473
	PERBAIKAN DRAINASE	-,131	,401	-,033	-,326	,745	,880	1,136
	PEMBUATAN WC/JAMBAN	,355	,407	,097	,872	,386	,729	1,372
	PEMBUATAN TAMAN / RTH	,775	,338	,253	2,292	,025	,739	1,352

a. Dependent Variable: NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

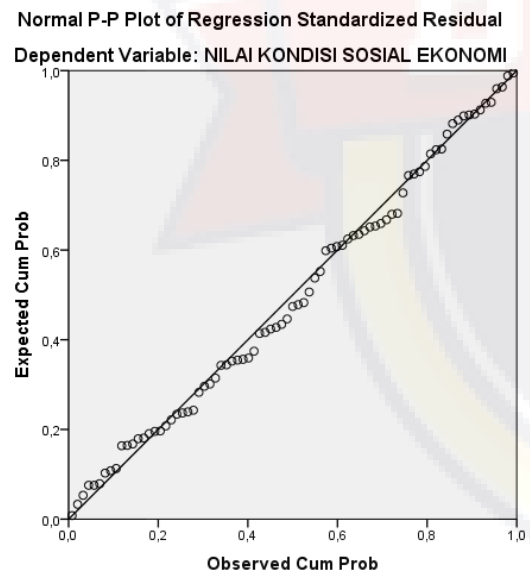
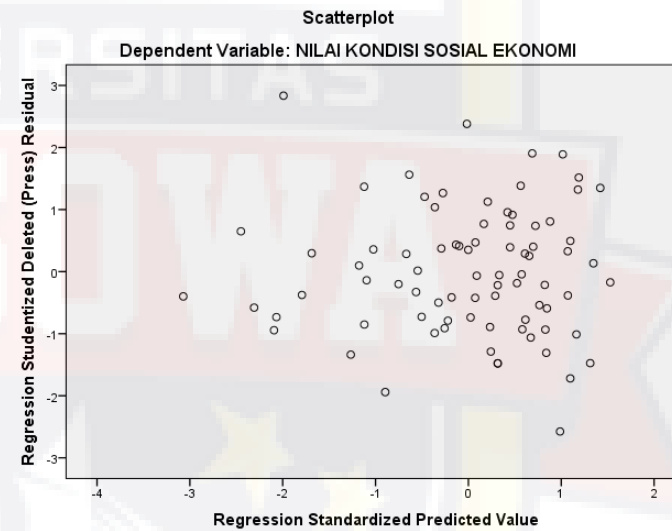
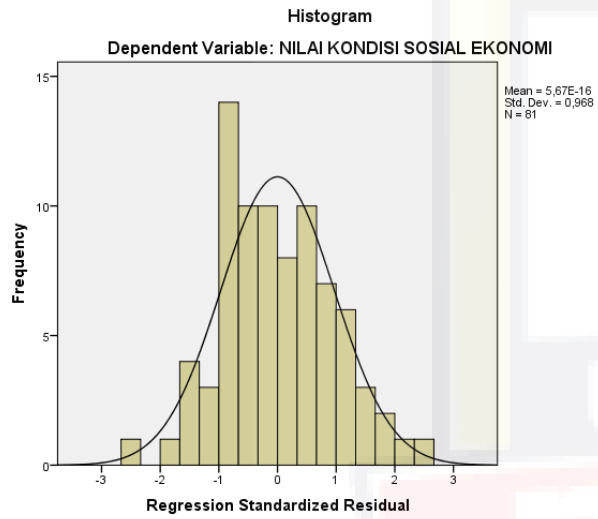
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	PERBAIKAN JALAN	PERBAIKAN RUMAH	PERBAIKAN DRAINASE	PEMBUATAN WC/JAMBAN	PEMBUATAN TAMAN / RTH
1	1	5,893	1,000	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,038	12,502	,00	,00	,02	,60	,28	,00
	3	,027	14,655	,04	,16	,02	,17	,35	,04
	4	,020	17,240	,00	,00	,08	,14	,12	,93
	5	,016	19,254	,07	,05	,86	,00	,22	,03
	6	,006	31,221	,89	,78	,03	,09	,03	,00

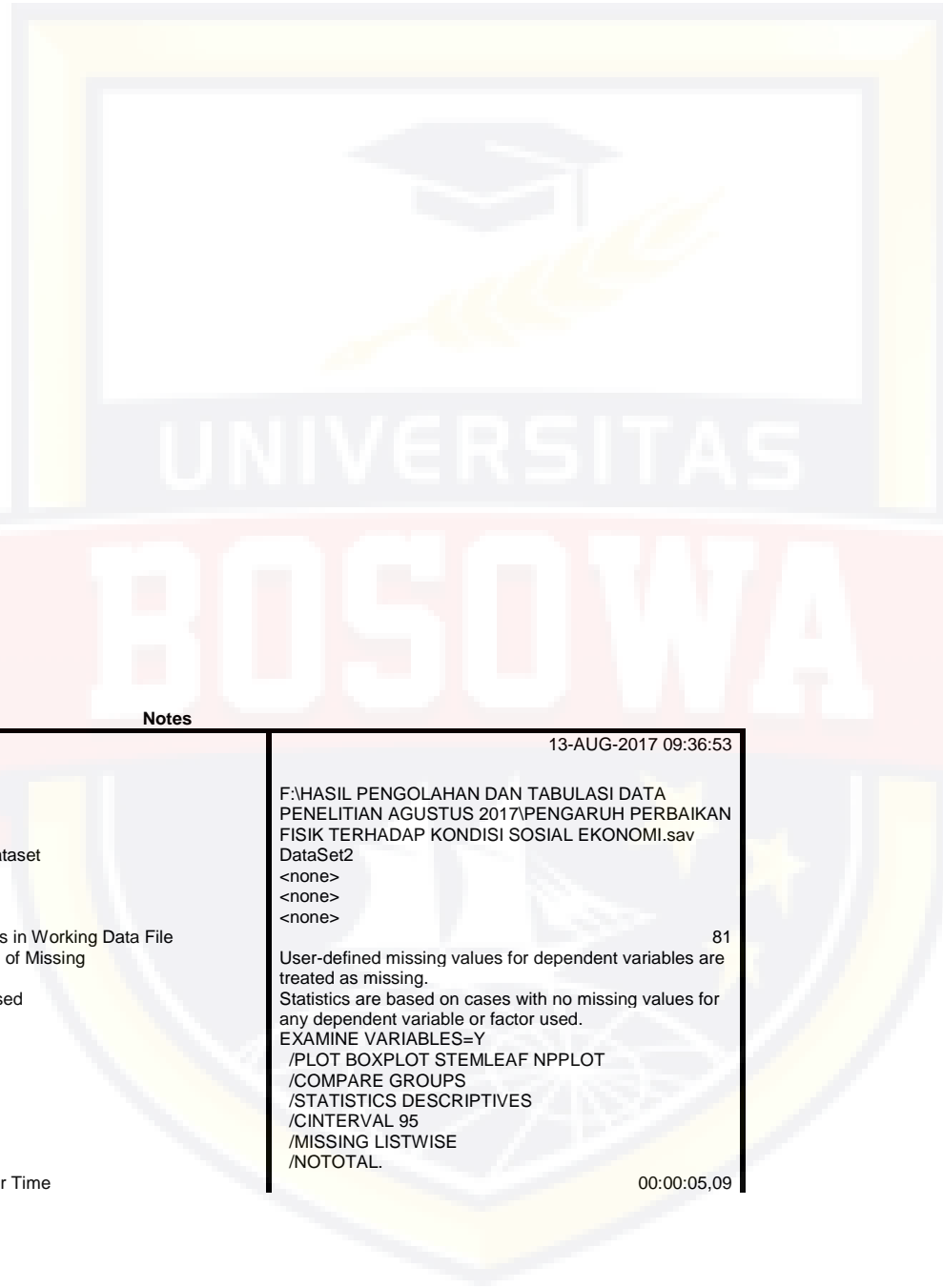
a. Dependent Variable: NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	60,12	77,95	72,02	3,878	81
Std. Predicted Value	-3,071	1,528	,000	1,000	81
Standard Error of Predicted Value	,713	2,657	1,505	,430	81
Adjusted Predicted Value	60,51	78,05	72,04	3,909	81
Residual	-13,853	14,698	,000	5,564	81
Std. Residual	-2,410	2,558	,000	,968	81
Stud. Residual	-2,484	2,710	-,002	1,008	81
Deleted Residual	-14,713	16,506	-,020	6,033	81
Stud. Deleted Residual	-2,576	2,835	,000	1,021	81
Mahal. Distance	,244	16,115	4,938	3,390	81
Cook's Distance	,000	,151	,014	,023	81
Centered Leverage Value	,003	,201	,062	,042	81

a. Dependent Variable: NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI





```
EXAMINE VARIABLES=Y  
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT  
/COMPARE GROUPS  
/STATISTICS DESCRIPTIVES  
/CINTERVAL 95  
/MISSING LISTWISE  
/NOTOTAL.
```

## Explore

### Notes

Output Created		13-AUG-2017 09:36:53
Comments		
Input	Data	F:\HASIL PENGOLAHAN DAN TABULASI DATA PENELITIAN AGUSTUS 2017\PENGARUH PERBAIKAN FISIK TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI.sav
	Active Dataset	DataSet2
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	81
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values for dependent variables are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any dependent variable or factor used.
Syntax		EXAMINE VARIABLES=Y /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT /COMPARE GROUPS /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:05,09

Elapsed Time

00:00:05,24

## Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI	81	100,0%	0	0,0%	81	100,0%

## Descriptives

		Statistic	Std. Error	
NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI	Mean	72,02	,754	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	70,53	
		Upper Bound	73,52	
	5% Trimmed Mean	72,03		
	Median	72,00		
	Variance	45,999		
	Std. Deviation	6,782		
	Minimum	58		
	Maximum	86		
	Range	28		
	Interquartile Range	10		
	Skewness	,007	,267	
	Kurtosis	-.442	,529	

## Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI	,062	81	,200 <sup>*</sup>	,981	81	,265

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction



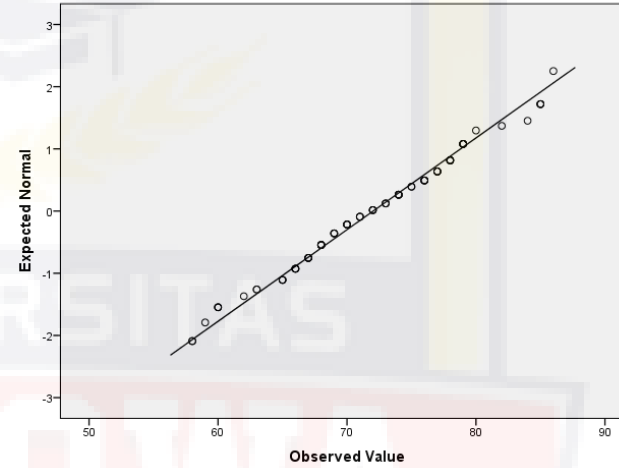
# NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI

NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI Stem-and-Leaf Plot

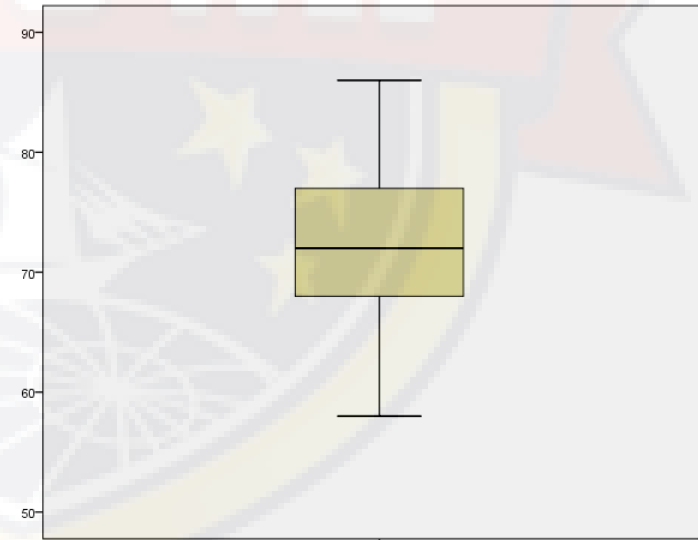
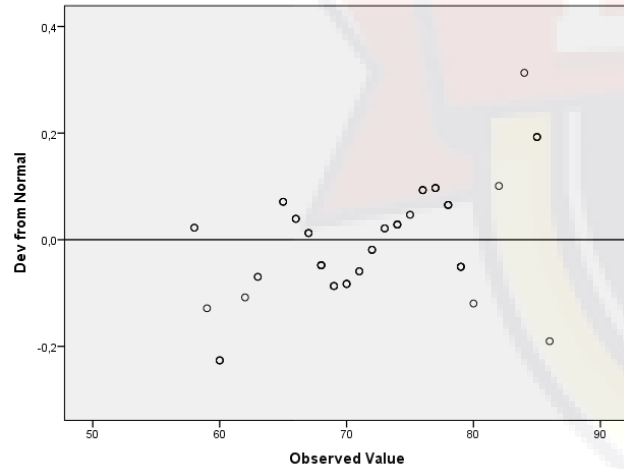
Frequency	Stem & Leaf
3,00	5 . 889
6,00	6 . 000233
22,00	6 . 55566667777888888899999
21,00	7 . 000001112222333444444
21,00	7 . 556666777788888999999
3,00	8 . 024
5,00	8 . 55556

Stem width: 10  
Each leaf: 1 case(s)

Normal Q-Q Plot of NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI



Detrended Normal Q-Q Plot of NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI



NILAI KONDISI SOSIAL EKONOMI

**LAMPIRAN B**

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 X6
/SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/SAVE ZRESID.
    
```

**Regression**

**Notes**

Output Created		13-AUG-2017 17:28:06
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet3
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
Missing Value Handling	N of Rows in Working Data File	81
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 X6 /SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /SAVE ZRESID.
Resources	Processor Time	00:00:04,03
	Elapsed Time	00:00:04,01

Variables Created or Modified	Memory Required Additional Memory Required for Residual Plots ZRE_1	5600 bytes 600 bytes Standardized Residual
-------------------------------	--	--

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK	54,80	6,165	81
PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN	3,51	,654	81
PENCAPAIAN TUJUAN	3,32	,722	81
TARGET WAKTU	2,93	,946	81
KELEMBAGAAN	3,15	,950	81
PEMENUHAN AKSES	3,23	,676	81
KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN	4,60	,563	81

### Correlations

		NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK	PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN	PENCAPAIAN TUJUAN	TARGET WAKTU	KELEMBAGAAN	PEMENUHAN AKSES	KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN
Pearson Correlation	NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK	1,000	,388	,472	,195	,003	,416	
	PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN	,388	1,000	,472	,223	,079	,548	
	PENCAPAIAN TUJUAN	,472	,472	1,000	,218	,167	,638	
	TARGET WAKTU	,195	,223	,218	1,000	,110	,067	
	KELEMBAGAAN	,003	,079	,167	,110	1,000	-,094	
	PEMENUHAN AKSES	,416	,548	,638	,067	-,094	1,000	
	KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN	,327	,176	,162	,132	,134	,115	
Sig. (1-tailed)	NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK	.	,000	,000	,041	,490	,000	
	PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN	,000	.	,000	,023	,242	,000	
	PENCAPAIAN TUJUAN	,000	,000	.	,025	,068	,000	
	TARGET WAKTU	,041	,023	,025	.	,165	,277	
	KELEMBAGAAN	,490	,242	,068	,165	.	,203	
	PEMENUHAN AKSES	,000	,000	,000	,277	,203	.	
	KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN	,001	,058	,074	,120	,116	,153	
N	NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK	81	81	81	81	81	81	
	PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN	81	81	81	81	81	81	

PENCAPAIAN TUJUAN	81	81	81	81	81	81
TARGET WAKTU	81	81	81	81	81	81
KELEMBAGAAN	81	81	81	81	81	81
PEMENUHAN AKSES	81	81	81	81	81	81
KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN	81	81	81	81	81	81

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN, PEMENUHAN AKSES, TARGET WAKTU, KELEMBAGAAN, PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN, PENCAPAIAN TUJUAN <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,576 <sup>a</sup>	,332	,278	5,239	1,931

a. Predictors: (Constant), KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN, PEMENUHAN AKSES, TARGET WAKTU, KELEMBAGAAN, PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN, PENCAPAIAN TUJUAN

b. Dependent Variable: NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1009,990	6	168,332	6,134	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2030,850	74	27,444		
	Total	3040,840	80			

a. Dependent Variable: NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK

b. Predictors: (Constant), KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN, PEMENUHAN AKSES, TARGET WAKTU, KELEMBAGAAN, PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN, PENCAPAIAN TUJUAN

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26,764	5,712		4,685	,000		
	PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN	1,264	1,120	,134	1,128	,263	,639	1,565
	PENCAPAIAN TUJUAN	2,539	1,136	,297	2,235	,028	,510	1,960
	TARGET WAKTU	,454	,652	,070	,697	,488	,903	1,107
	KELEMBAGAAN	-,565	,656	-,087	-,862	,391	,883	1,132
	PEMENUHAN AKSES	1,023	1,273	,112	,803	,424	,463	2,159
	KEGIATAN SANGAT DIBUTUHKAN	2,675	1,071	,244	2,497	,015	,943	1,060

a. Dependent Variable: NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions						
				(Constant)	PEMAHAMAN PROGRAM KEGIATAN	PENCAPAIAN TUJUAN	TARGET WAKTU	KELEMBAGAAN	PEMENUHAN AKSES	
1	1	6,772	1,000	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,080	9,184	,00	,01	,01	,00	,69	,04	
	3	,078	9,301	,00	,00	,01	,91	,02	,02	
	4	,031	14,696	,07	,00	,22	,03	,12	,03	
	5	,019	19,013	,01	,76	,26	,00	,03	,00	
	6	,012	23,441	,00	,23	,49	,06	,12	,86	
	7	,007	31,470	,91	,00	,01	,00	,02	,05	

a. Dependent Variable: NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK

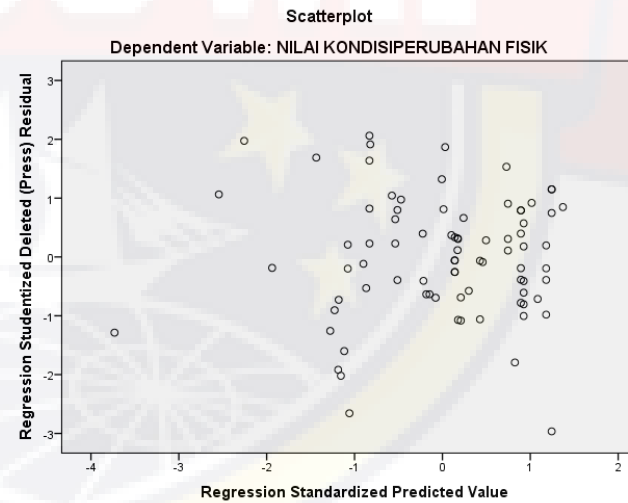
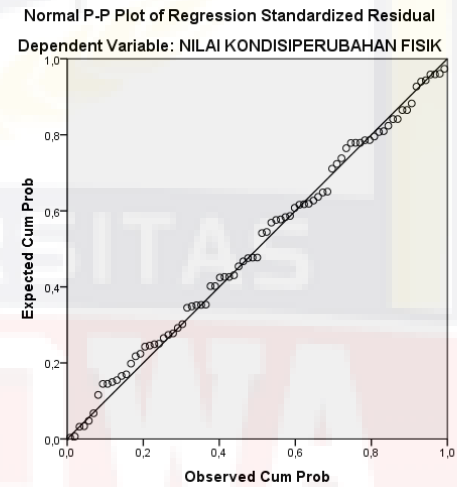
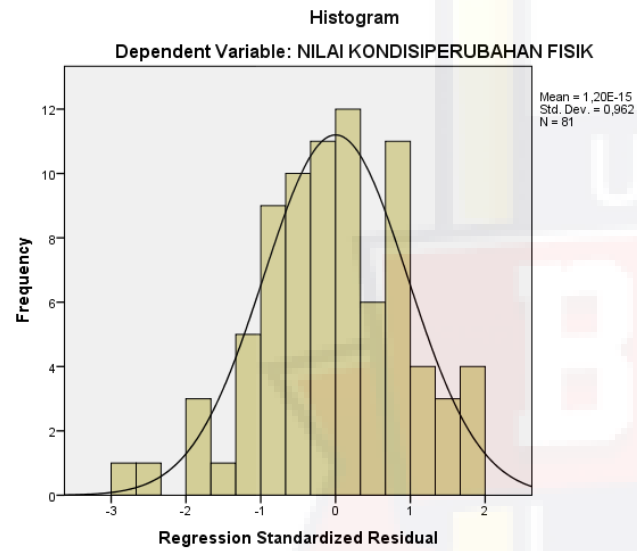
**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	41,54	59,67	54,80	3,553	81
Std. Predicted Value	-3,732	1,371	,000	1,000	81
Standard Error of Predicted Value	,916	2,951	1,508	,313	81
Adjusted Predicted Value	44,12	60,35	54,78	3,549	81
Residual	-14,219	10,149	,000	5,038	81
Std. Residual	-2,714	1,937	,000	,962	81
Stud. Residual	-2,820	2,017	,002	1,011	81
Deleted Residual	-15,348	11,165	,024	5,573	81
Stud. Deleted Residual	-2,965	2,061	,000	1,026	81
Mahal. Distance	1,459	24,404	5,926	3,223	81

Cook's Distance	,000	,113	,016	,025	81
Centered Leverage Value	,018	,305	,074	,040	81

a. Dependent Variable: NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK

### Charts



```

EXAMINE VARIABLES=Y
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT
/COMPARE GROUPS
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.

```

**Explore**

**Notes**

Output Created		13-AUG-2017 17:41:07
Comments		
Input	Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File	DataSet3 <none> <none> <none> 81
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values for dependent variables are treated as missing. Statistics are based on cases with no missing values for any dependent variable or factor used.
Syntax	Cases Used	EXAMINE VARIABLES=Y /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT /COMPARE GROUPS /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Resources	Processor Time Elapsed Time	00:00:04,69 00:00:04,61

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK	81	100,0%	0	0,0%	81	100,0%

**Descriptives**

		Statistic	Std. Error
NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK	Mean	54,80	,685
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	53,44
		Upper Bound	56,17

5% Trimmed Mean	55,13	
Median	56,00	
Variance	38,010	
Std. Deviation	6,165	
Minimum	36	
Maximum	65	
Range	29	
Interquartile Range	8	
Skewness	-,781	,267
Kurtosis	,742	,529

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK	,108	81	,021	,955	81	,007

a. Lilliefors Significance Correction

**NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK**

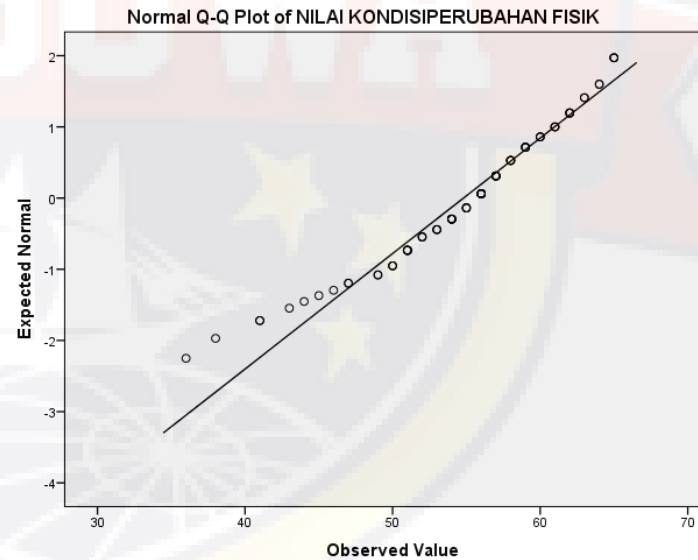
NILAI KONDISIPERUBAHAN FISIK Stem-and-Leaf Plot

```

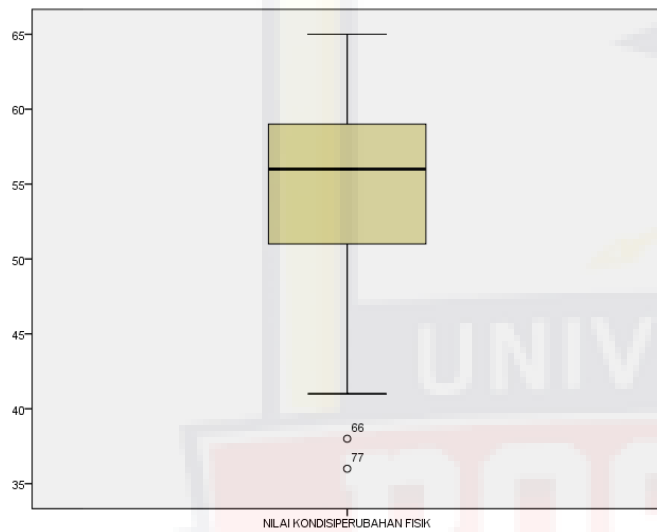
Frequency      Stem & Leaf
 2,00 Extremes      (<=38)
 4,00      4 .  1134
 6,00      4 .  567799
22,00      5 .  0001111111222333444444
30,00      5 .  555566666666677777888889999
14,00      6 .  00011122223344
 3,00      6 .  555

Stem width:      10
Each leaf:      1 case(s)

```

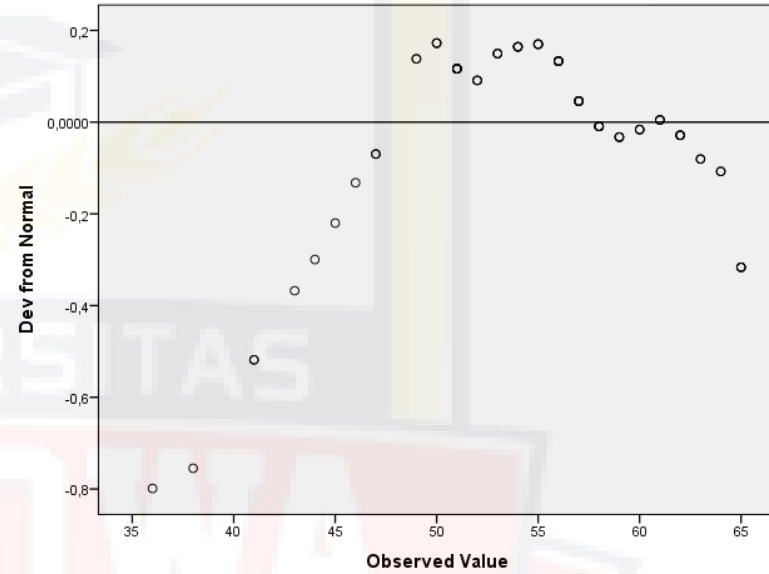






NILAI KONDISI PERUBAHAN FISIK

Detrended Normal Q-Q Plot of NILAI KONDISI PERUBAHAN FISIK



## DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN









